



LAPORAN PENGADUAN

**REKAPITULASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI MELALUI
APLIKASI SP4N-LAPOR! PERIDODE 2023 – AGUSTUS 2025**

**PUSAT PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI SP4N-LAPOR!

A. Latar Belakang

SP4N-LAPOR! telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan sesuai Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan telah ditetapkannya SP4N-LAPOR! sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan nasional maka Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan SP4N-LAPOR! untuk mengelola pengaduan. Oleh karena itu LAPOR! yang semula dikembangkan oleh UKP4 pada tahun 2010 kini berkembang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Kerja sama pengelolaan SP4N LAPOR! tersebut tertuang dalam nota kesepahaman nomor 119/4916/SJ tanggal 9 September 2021 tentang Sinergi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat.

Dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! Kementerian Dalam Negeri memiliki peran sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. melakukan penguatan kelembagaan penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Kementerian Dalam Negeri memiliki berbagai jenis pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Melalui SP4N-LAPOR mencatat jumlah pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada Kementerian Dalam Negeri terus meningkat dari tahun ketahun. Partisipasi dan Antusiasme untuk menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Dalam Negeri yang semakin meningkat perlu diimbangi dengan kesiapan untuk dapat merespon dan menanggapi serta menyelesaikan setiap pengaduan dengan baik.

B. Pengelolaan Pengaduan Kementerian Dalam Negeri tahun 2023

Tabel. 1 Rekapitulasi Laporan Pengaduan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

Tahun	Pengduan Berdasarkan Jenis		Persentase Penyelesaian	Persentase Waktu Tindak Lanjut
2023	Pengaduan tidak berkadar pengawasan	:1460	100%	11,7 Hari Kerja
	Pengaduan Berkadar Pengawasan	: 98		

	Aspirasi	: 31		
	Permohonan Informasi	: 31		
	Total	: 1709		
2024	Pengaduan tidak berkadar pengawasan	: 2003	100%	6 Hari Kerja
	Pengaduan Berkadar Pengawasan	: 171		
	Aspirasi	: 26		
	Permohonan Informasi	: 22		
	Total	: 2222		
Januari - Agustus 2025	Pengaduan tidak berkadar pengawasan	: 431	97%	8 Hari Kerja
	Pengaduan Berkadar Pengawasan	: 56		
	Aspirasi	: 3		
	Permohonan informasi	: 39		
	Total	: 529		

Tabel. 2 Top 5 Topik Pengaduan

Tahun	No.	Topik Aduan	Jumlah Aduan
2023	1.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1019 Aduan
	2.	Layanan Aplikasi Pemerintah	87 Aduan
	3.	Mutasi Pegawai	70 Aduan
	4.	Ketertiban Umum	37 Aduan
	5.	Pelanggaran ASN & Pejabat	34 Aduan
2024	1.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1183 Aduan
	2.	Layanan dan Informasi Terkait Aplikasi Pemerintah	119 Aduan
	3.	Mutasi Pegawai	37 Aduan
	4.	Penyalahgunaan Wewenang	25 Aduan
	5.	Pemerintahan Desa	16 Aduan
Januari - Agustus 2025	1.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	157 Aduan
	2.	Layanan Online/Aplikasi Pemerintah	23 Aduan
	3.	CPNS	6 Aduan
	4.	Pemerintah Desa	4 Aduan
	5.	Mutasi Pegawai	3 Aduan

Dalam kerangka kebijakan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait pengelolaan pengaduan, secara spesifik telah diatur target penyelesaian pengaduan masyarakat adalah sebesar 90%. Penetapan target ini dimaksudkan untuk menjamin setiap suara pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat direspon atau ditanggapi dengan baik oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik termasuk di lingkup Kementerian Dalam Negeri.

C. Sampel Pengelolaan Pengaduan Periode 2023 - Agustus 2025

No	Tanggal	Nama Pelapor	Jenis Laporan	Judul Laporan	Isi Laporan Awal	Status	Tindak Lanjut
2023							
1	2 Jan 2023	Aly Handartoputra	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	No Kk Dan Nik Tidak Sesuai	mohon bantuannya Bapak/Ibu.saya ALY HANDARTOPUTRANIK KK ketika membuka web sscasn untuk membuat akun gagalmuncul kotak dialog "no kk dan nik tidak sesuai"mohon bantuan untuk di sesuaikan	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi Portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengaduan Saudara, setelah kami Cek kedalam database Ditjen Dukcapil, sbb: Aly Handartoputra NIK. NO. KK. sudah sesuai dan sudah ada datanya, dokumen terlampir terkait kendala dalam hal layanan, mohon menghubungi instansi terkait terima kasih dan salam sehat jangan lupa 5 (lima) bintangnya
2	3 Jan 2023	Mohammad Rizki	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pendaftaran Ktp Digital	Permohonan pendaftaran KTP digital	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,karena yang bisa melakukan verifikasi Barqode hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
3	3 Jan 2023	Hale Foi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengaduan & Permohonan Mutasi Tugas Ke Provinsi Papua Tengah	Dengan Hormat,Nama saya Hendrison Ondi, NIP. Jabatan Staf pada UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek Biak (TBTA) Biak PapuaSaya ajukan pengaduan & mohon petunjuk dan pertimbangan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Jajaran sbb :Saya adalah PNS kabupaten Biak Numfor (Jabatan sebelum mutasi ke Provinsi Papua	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait hal ini Pak. Hendrison Ondi bahwa untuk promosi adalah merupakan kewenangan PPK jadi saran kami untuk berkoordinasi ke Pimpinan ataupun permohonan untuk dipromosikan oleh PPK. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah

				<p>sebagai kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Biak Numfor). Setelah pengalihan oleh BKN sebagai staf pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prov. Papua dan ditugaskan sebagai staf pada UPTD TBTA Biak Numfor, Hak kami untuk dapat promosi jabatan dan pengurusan pangkat tidak diperhatikan/diurus dengan baik. Sehingga karir kami sebagai PNS terhenti sejak dialihkan sbg staf ke Provinsi Papua per 01 Januari 2018. Kami tidak diberi kesempatan ikut promosi jabatan. Promosi Jabatan hanya diberikan bagi Pegawai Provinsi Papua Kami dari daerah yang mutasi ke provinsi tidak mendapat promosi jabatan. Saya sudah 5 tahun di provinsi dan tidak pernah dipromosi dan tidak bisa usul pangkat (tidak ada jabatan). Pangkat saya sudah tertahan 2 periode atau 9 tahun. Pangkat terakhir saya Pembina /IVa sejak 01 April 2014. Mohon kiranya Bapak Mendagri dan Jajarannya ikut memperhatikan, menertibkan, intervensi (pembinaan aparatur) di daerah Provinsi Papua agar kinerjanya lebih baik, adil dan bijaksana serta profesional ke depan. Demikian Aduan ini dan mohon kiranya kami juga dapat dipertimbangkan untuk promosi jabatan di provinsi Papua atau provinsi pemekaran dari provinsi Papua. Untuk itu kami juga lampirkan surat permohonan mutasi ke daerah provinsi pemekaran, kiranya dapat di</p>	
--	--	--	--	--	--

					pertimbangkan. TksBiak, 03 Januari 2023 Hormat SayaTtd Hendrison Ondi		
4	4 Jan 2023	Firdaus Laporan Warga Laporcovid 19	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mohon Ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri - Pengaduan Warga Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Bermasalah	Perkenalkan Kami dari Tim Laporan Warga Laporcovid-19, bersama dengan sejumlah organisasi profesi kesehatan dan juga jejaring masyarakat sipil lainnya bekerja sama untuk mengumpulkan laporan masyarakat terkait insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid 19. Melalui laporan yang masuk, kami mendapati adanya warga yang mengeluhkan permasalahan pada pemberian insentif di RSUD dr. H. M. Ansari Saleh. Adapun keluhan yang dimaksud yakni :Nama Faskes : RSUD dr. H. M. Ansari SalehAlamat Faskes : Jl. Brig Jend. Hasan Basri No.1, Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan SelatanJenis Faskes : Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Permasalahan yang dilaporkan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengatur ketentuan insentif tenaga kesehatan hanya 30% dari nilai yang diatur pada Kepmenkes 770 Tahun 2022 sehingga tenaga kesehatan hanya mendapatkan insentif 30% pada bulan Januari - Oktober 2022.	Selesai	Yth. Bpk Firdaus Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi pengaduan yang disampaikan. Terkait hal diatas dapat kami sampaikan bahwa: 1. Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. 2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyatakan bahwa: a. Diktum Kesatu menyatakan bahwa: Menetapkan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). b. Diktum Kedua menyatakan bahwa: Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Mena
5	5 Jan 2023	Anonim	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Blangko Ektp Habi	Yth. Bapak / Ibu, perkenalkan saya Citra bertanya sampai saat ini 5 Januari 2022 blangko ektp wilayah kabupaten semarang dan temanggung masih belum tersedia. Kami warga hanya mendapatkan hanya dapat surat keterangan lembar	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Berkenaan dengan pertanyaan Saudara, kami informasikan bahwa stok blangko KTP-el di awal januari 2023 masih dalam tahap distribusi ke

					<p>hvs. Jd kami susah utk berpergian apalagi musim hujan membawa kerta surat adalah kendala besar terjadinya kertas rusak. Apakah bisa dibantu? Terima kasih.</p>		<p>daerah. Untuk kabupaten/kota yang stok blanko KTP-el nya telah minim atau habis maka agar segera mengambil ke Ditjen Dukcapil di Jakarta baik melalui pejabat/petugas Disdukcapil di Provinsi atau dapat langsung diambil oleh pejabat/petugas Disdukcapil kabupaten/kota secara langsung. Kami informasikan juga bahwa lama pencetakan KTP-el dapat dipengaruhi oleh banyaknya antrian pada masing masing Dukcapil. Untuk itu, kami sarankan agar Saudara menghubungi tempat pelayanan Dukcapil di domisili saudara untuk memperoleh informasi pencetakan KTP-el saudara. Saat ini juga tersedia KTP Digital dengan mengundul dalam playstore Identitas kependudukan Digital dan melakukan aktivasi di Disdukcapil setempat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan,</p>
6	5 Jan 2023	Ahmad Septian	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Blanko Yang Tak Kunjung Ada	<p>saya mau melaporkan kendala ktp yang belum jadi di karenakan alasan banko ktp yg belum di kirim dari kemendigrat, saya membuat laporan ini supaya bisa di tinjak lanjuti untuk wilayah tambun selatan</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Berknaan dengan pertanyaan Saudara, kami informasikan bahwa stok blanko KTP-el di awal januari 2023 masih dalam tahap distribusi ke daerah. Untuk kabupaten/kota yang stok blanko KTP-el nya telah minim atau habis maka agar segera mengambil ke Ditjen Dukcapil di Jakarta baik melalui pejabat/petugas Disdukcapil di Provinsi atau dapat langsung diambil oleh pejabat/petugas Disdukcapil kabupaten/kota secara langsung. Kami informasikan juga bahwa lama pencetakan KTP-el dapat dipengaruhi oleh banyaknya antrian pada masing masing Dukcapil. Untuk itu, kami sarankan agar Saudara menghubungi tempat pelayanan Dukcapil di domisili saudara untuk</p>

							memperoleh informasi pencetakan KTP-el saudara. Saat ini juga tersedid KTP Digital dengan mengundul dalam playstore Identitas kependudukan Digital dan melakukan aktivasi di Disdukcapil setempat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan,
7	6 Jan 2023	St Atira Badanur	Pengaduan Tidak	Ktp Tidak Dapat Di Aktifkan	Mohon pengaktifan KTP saya	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP El) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
8	8 Jan 2023	Anonim	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengelolaan Akun Kepala Pd Pada Sipd-Ri	Izin adminSaya admin sipd perencana utk kab. AgamSaya lapor di sini karena call centre sipd-RI tidak memberikan tanggapan apapun terhadap permasalahan saya sejak rabu kemarinPada awalnya di sipd kemendagri lama ada akun kepala PD yg mengampu 2 opd, satu sebagai PA satu sebagai Plt karena adanya pemecahan terhadap opd bersangkutan sebagai akibat perda sotk baruSewaktu system meng import data ken sipd ri akun tersebut tetap mengampu 2 perangkat daerah. Dan ketika akun ybs log in, pada menu dashboard kosong.. Tidak ada menu apapun sama sekali. Setelah pelantikan... Salah satu akun sudah saya ganti dengan pejabat baru dan berhasilTapi akun kepala PD yg lama masih belum berubah (dashboard nya masih kosong) Saya sudah coba	Selesai	selamat siang, untuk permasalahan tersebut sudah ada update terbaru. silahkan di cek kembali. terimakasih

					refresh berkali2 tapi tetap gagalMohon arahnya		
9	9 Jan 2023	Junius Yosua	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ktp Elektrik Saya Tak Kunjung Jadi Dari Bulan November	Ktp elektrik saya tak kunjung jadi dari bulan november tahun 2022 sampai dengan hari ini, dengan alasan blangko ktp kehabisan.. Saya memohon untuk segera di proses ktp saya, dikarenakan tidak adanya ktp saya tidak bisa melamar pekerjaan, sedangkan anak istri saya perlu di nafkahi. Terima kasih.	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Berkenaan dengan pertanyaan Saudara, kami informasikan bahwa stok blangko KTP-el di awal januari 2023 masih yang stok blangko KTP-el nya telah minim atau habis maka agar segera mengambil ke Ditjen Dukcapil di Jakarta baik melalui pejabat/petugas Disdukcapil di Provinsi atau dapat langsung diambil oleh pejabat/petugas Disdukcapil kabupaten/kota secara langsung. Kami informasikan juga bahwa lama pencetakan KTP-el dapat dipengaruhi oleh banyaknya antrian pada masing masing Dukcapil. Untuk itu, kami sarankan agar Saudara menghubungi tempat pelayanan Dukcapil di domisili saudara untuk memperoleh informasi pencetakan KTP-el saudara. Saat ini juga tersedia KTP Digital dengan mengundul dalam playstore Identitas kependudukan Digital dan melakukan aktivasi di Disdukcapil setempat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan,
10	16 Jan 2023	Anonim	Permintaan Informasi	Pengawasan Terhadap Pemda	Saya ingin bertanya:1. Kepada siapa masyarakat melaporkan tindakan Satpol pp pemerintah kota (bahkan dapat dikatakan pemkot itu sendiri, karena pemda membiarkan/mendukung) yang menegakkan Perda dengan tafsir sangat luas atau bahkan penafsiran sesuai pendapat pribadi, dikarenakan Perda yang diacu tidak secara gamblang menjelaskan definisi suatu tindakan. Sebagaimana Polri memiliki	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

					divisi propam.2. Apa tindakan pemerintah pusat (diwakili Kemendagri) untuk mengatasi hal-hal tersebut? Seperti yang dapat dibidang "raja-raja kecil" atau "jendral-jendral kecil" di daerah. Otonomi namun tidak disertai pengawasan bukankah dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang?		
11	01 Februari 2023	Silvia Rachman	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Data Nama Ibu Kandung Tidak Sesuai	<p>Selamat malam, saya silvia rachman harahap. berikut data diri saya:# nik nama lengkap : silvia rachman harahap# nomor_kartu_keluarga () # no hp: # permasalahan: saya mau lapor terkait penulisan nama ibu kandung saya yg tdk sesuai. pada kk tertulis an: emma chaniago,seharusnya yang benar adalah: erma chaniagosaya sudah pernah lapor melalui twitter dan katanya data sudah diupdate dan saya mendapatkan notifikasi melalui sms bahwa data sudah diupdate. nah karena tidak dikirimkan bukti bahwa data sudah sesuai. saya tlp ke call center dukcapil 1500537 tgl 24 januari 2023 diterima oleh an. ayu. betapa kagetnya saya ternyata data nama ibu kandung saya dirubah bukan menjadi benar, malah dihilangkan nama belakangnya (chaniago) jadi info petugasnya hanya: emma. lalu saya bilang bahwa itu semakin tidak benar, saya minta diubah lagi, tapi disuruh datang langsung ke dukcapil karena hanya bisa diubah disana. kok bisa... sedangkan nama yg saat ini aja udah</p>	Selesai	<p>Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu.</p> <p>Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya</p>

					diubah tanpa saya datang, kenapa sekarang saya malah disuruh datang langsung ke kantor. benar-benar tidak masuk akal. jika ada ketentuan melalui media sosial hanya bisa dirubah 1x, seharusnya diinfokan saja. jangan bilang tidak bisa ubah data, sedangkan itu aja sudah berubah dari data awal. dan saya dapat informasi dari teman saya dulu pernah melakukan perubahan data dengan permasalahan yg sama dengan saya, bisa dilakukan hanya melalui whatsapp saja. apakah berbeda-beda ketentuan tiap kelurahan/kecamatan? mohon penjelasannya. bukannya saya tidak mau datang langsung ke kantor dukcapil, tapi saya kerja senin-jum'at jam 8-17 setiap hari. hanya libur weekend, sedangkan kantor dukcapil tidak ada yg beroperasi di weekend. mohon dengan sangat perhatian dan kebijaksanaannya. silvia rachman harahap		
12	02 Februari 2023	Zulfahrizal	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ingin Mengetahui Apakah Nomor Kk Dan Nik Saya Terdaftar Di Kemendagri	Assalamualaikum . saya ingin mengecek apakah nomor kk dan nik saya sudah terdaftar di kemendagri dan di dukcapil. nomor kk: nomor nik:	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Setelah kami lakukan pengecekan, NIK/NoKK yang dimaksud terbaca dalam database kependudukan. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
13	03 Februari 2023	Bastian Affandi	Permintaan Informasi	Mengetahui Nik Dan Alamat Sekarang	Nik atas nama indri putri hasanah valid atau tidak, dan alamat rumah sekarang	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Setelah kami lakukan pengecekan, NIK yang dimaksud

							tidak terbaca dalam database kependudukan. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
14	03 Februari 2023	Christa Vencia	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pencetakan Dokumen Akta Kelahiran	Bolehkah saya minta dikirimkan dokumen akta kelahiran anak saya a/n crystal joylynn winata dengan nik apakah aktanya sudah bisa online cetak sendiri ya? kalau bisa, saya bisa minta datanya?	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat, karena yang bisa melakukan verifikasi Barqode hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
15	02 Februari 2023	Davian Mochammad Agasi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Data Tidak Sama Dengan E Ktp Saya	E ktp data dengan dukcapil berbeda	Selesai	terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengaduan Saudara, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP El) untuk memudahkan kami dalam hal pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Demikian kami tunggu Dokumennya. terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa 5 bintangnya
16	07 Maret 2023	Arik Desy	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Sk Mutasi	Yth. kementerian dalam negeri saya salah satu guru mengajukan mutasi dari pemerintah kabupaten lombok barat, ntb ke pemerintah kabupaten buleleng, bali nama lengkap: kadek desy ariyati, s.pd. sekolah: sd negeri 1 sekotong tengah saya bermaksud menanyakan berapa lama sk mutasi keluar dari kemendagri setelah pertek keluar? saya sudah mengajukan mutasi dari pemerintah kabupaten lombok barat ntb ke pemerintah kabupaten	Selesai	Yth. Pelapor. Seluruh proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di proses melalui SIASN Badan Kepegawaian Negara dan E-Mutasi Kementerian Dalam Negeri. adapun proses Mutasi PNS yang melebihi batas waktu sesuai aturan yang berlaku dikarenakan adanya antrian proses sesuai usul yang masuk pada sistem Aplikasi. Jika demikian ada melebihi batas waktu agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Penerima/Tujuan untuk selanjutnya di Koordinasikan ke

					<p>buleleng, bali pada bulan oktober 2022 , dan pertek bkn keluar pada 2 desember 2022. sudah 3 bulan saya menunggu sk mutasi keluar dari kemendagri. ada rekan saya mutasi dari pemerintah kabupaten sumba barat daya ntt ke pemerintah kabupaten buleleng bali, beliau mengajukan bulan november 2022 dan keluar pertek bkn pada bulan desember akhir 2022 dan sk mutasi nya sudah keluar pada bulan januari 2023. saya yang keluar duluan perteknya namun sampai saat ini sk mutasi saya belum keluar. untuk itu, kami mohon informasi nya dari pihak terkait.mohon informasi dan terima kasih.</p>		<p>Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Otonomi Daerah. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah</p>
17	06 Maret 2023	Kuuga	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Air Pdam Di Kelurahan Lempake Lagi- Lagi Berwarna Kuning	<p>Selamat siang bapak/ibu inspektorat kementerian dalam negeri, nama saya selamat alamat jalan bedeng kelurahan lempake kecamatan samarinda utara, pada tanggal 05 maret 2023 pukul 13.55 wita ingin mengadukan pemkot kota samarinda dan perumdam tirta kencana samarinda terkait air bersih pdam yang berwarna kuning dan sudah berkali-kali dilaporkan tetapi tidak ada perubahan kualitas air pdam, air pdam masih saja berwarna kuning (sangat tidak layak konsumsi), padahal perusahaan umum daerah air minum tirta kencana samarinda atau pdam periode sebelumnya telah mendapatkan alokasi anggaran rp 9 miliar dan akan mendapatkan tambahan alokasi rp 10 miliar di apbd perubahan 2023, tolong untk</p>	Selesai	<p>Selamat siang bapak/ibu @kementeriandalamnegeri dan @direktoratbumd,bluddanbarangmilikdaerah, nama saya selamat alamat jalan bedeng kelurahan lempake kecamatan samarinda utara, pada tanggal 09 maret 2023 pukul 16.05 wita ingin mengadukan kembali terkait air bersih pdam yang berwarna kuning dan sudah berkali-kali dilaporkan tetapi tidak ada perubahan kualitas air pdam (video terlampir), tolong tindakannya terimakasih</p>

					bapak/ibu inspektorat kementerian dalam negeri untuk dapat mengaudit keuangan perumdam tirta kencana samarinda (video terlampir), terimakasih		
18	23 Feb 2023	Benny Andono	Permintaan Informasi	Meminta Keringanan Syarat Membuat Ektp	Apa syarat membuat ektp selain harus membawa surat pindah...?	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!</p> <p>Kami sampaikan persyaratan pencetakan KTP-el untuk beberapa kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernebitan KTP-el baru untuk WNI <ol style="list-style-type: none"> a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru. 2. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI <ol style="list-style-type: none"> a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang) <p>Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Laport!</p>
19		Wiji Wahyu Irdyanto	Pengaduan Tidak	Mutasi	Kolom alasan pada emutsi atas nama wiji wahyu irdynto nip	Selesai	

			Berkadar Pengawasan		19831062011011001 (yang usul mutasi tahun lalu) cara melihatnya dimna, soalnya kata admin kami dapodik saya harus ganti sk pelaksana.		
20	27 Februari 2023	Faiqul Mustafid	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mutasi Pns Antar Daerah	Selamat siang, saya faiqul mustafid dengan nip. 199510042018081002 sedang proses mutasi antar instansi antar provinsi, sampai saat ini belum ada pemberitahuan mengingat pertimbangan teknis bkn sudah diterima sejak 13 januari 2023. mohon informasi terkait mutasi saya tersebut.	Selesai	Yth Pelapor Terkait Mutasi Pegawai Negeri Sipil a.n Faiqul Mustafid sudah selesai pertanggal 23 Februari 2023, untuk selanjutnya agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Penerima/ Tujuan. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah
21	02 Maret 2023	Indah Lestari	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pungli	Tanggal 23 february saya membuat rekaman ktp di kantor kecamatan tangeung dan diberikan bukti rekaman, lalu saya disuruh mengambil ktp saya ke kantor disdukcapil cibinong kapanpun saya mau, tapi tetangga saya menawarkan menitipkannya kepada pekerja yang berada di sana, lalu pada saat saya di suruh mengambil ktp dari pekerja tersebut saya harus membayar sebesar 100.000 rupiah.	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang dialami. Berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, yang artinya proses pengurusan Dokumen Kependudukan Saudara gratis dan tidak dipungut biaya. Berkenaan dengan pengaduan Saudara akan kami koordinasikan ke dukcapil setempat terkait terdapat indikasi praktek pungli. Saudara juga dapat menghubungi Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor di nomor 081311248085. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
22	02 Maret 2023	Nor Rochim	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mau Cek Kk Dan Ktp	Mau mengecek apakah data kk dn ktp saya sudah terdaftar setelah cabut berkas.? setelah kk sudah jadi kini sedang pembaruan dan, saya beserta istri saya sudah rekaman ektp. namun	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada

					<p>perubahan data di kk belum jadi juga. ektp saya dan istri saya juga belum keluar dan berhubung saya bekerja di pt.kelapa sawit, saya membutuhkan ektp dan kk, untuk data diri kami dan juga untuk pendaftaran bpjs kesehatan dn tenaga kerja. dan. apakah kk pertama kami yang belum di perbarui sudah benar benar terdaftar atw belum. dan apakah bisa digunakan untuk data kami di desa!? bagaimana carak cek kk ? mengapa begitu sulit untuk memperbaiki kesalahan pada kartu keluarga kami, dan mengapa sudah 3 bulan ini kk dan ektp kami belum jadi.!?</p> <p>bagaimana mana kami bisa cek kk dn mendapatkan ektp secara resmi.</p>		<p>aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya</p>
23	01 Maret 2023	Ilham Syahputra	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	<p>Kendala Alamat Pada Ktp Tidak Terdaftar Di Dukcatpil Saat Daftar Oss Padahal Sudah Ada Ektp</p>	<p>Kpd yth bapak/ ibu dukcatpil saya mengalami masalah data alamat saya terbaca tidak sesuai terus pada saat mendaftar oss padahal ktp saya sudah e ktp.mohon di tindak lanjuti untuk nik ktp saya :</p> <p style="text-align: right;">an : ilham syahputra</p>	Selesai	<p>terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengaduan Saudara, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam hal pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Demikian kami tunggu Dokumennya.terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa 5 bintangnya</p>
24	13 Maret 2023	Media Fakta	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	<p>Sk Mutasi Kemendagri</p>	<p>Bapak mendagri yang terhormat. sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 58 tahun 2019 tentang mutasi pegawai negeri sipil antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antarprovinsi. proses penerbitan surat keputusan mutasi pegawai negeri sipil selama 15 hari kerja. mohon untuk diperbaiki sistem dalam</p>	Selesai	<p>Yth, Pelapor. Terimakasih atas masukan dan saran yang disampaikan. Terimakasih,Ditjen Otonomi Daerah.</p>

					penerbitan sk mutasi kepegawaian sehingga dapat lebih cepat atau minimal tepat waktu sesuai aturan yang ditetapkan. terima kasih.		
25	10 Maret 2023	J Septiawan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Sk Mutasi Pns	Yth. menteri dalam negeri mohon tindak lanjut penerbitan sk mutasi an: jayu septiawan nip.198809232015041002 yang telah diberikan pertimbangan teknis dari bkn no: au-21502000001 tanggal 6 february 2023, terhitung sudah 2 bulan dan sudah lewat dari tanggal tmt mutasi 1 maret 2023 yang dikeluarkan bkn, tetapi sampai sekarang tahapan penerbitan sk mutasi saya belum ada pergerakan. ini berdampak ppk melalui bkd tidak dapat menerbitkan sk pengangkatan dan saya juga menjadi tidak dapat memohon usul kenaikan pangkat periode april 2023 karena masih terblok di siasn. mohon diberikan solusi untuk dapat saya sampaikan ke bkd. atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait Mutasi PNS a.n Jaya Septiawan sedang dalam proses penerbitan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri. dimohon untuk tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Penerima/ Tujuan agar dikoordinasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah
26	10 Maret 2023	J Septiawan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Sk Mutasi Pns	Yth. menteri dalam negeri mohon tindak lanjut penerbitan sk mutasi an: jayu septiawan nip.198809232015041002 yang telah diberikan pertimbangan teknis dari bkn no: au-21502000001 tanggal 6 february 2023, terhitung sudah 2 bulan dan sudah lewat dari tanggal tmt mutasi 1 maret 2023 yang dikeluarkan bkn, tetapi sampai sekarang tahapan penerbitan sk mutasi saya belum ada pergerakan. ini berdampak ppk melalui bkd tidak dapat menerbitkan sk pengangkatan dan saya juga	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait Mutasi PNS a.n Jaya Septiawan sedang dalam proses penerbitan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri. dimohon untuk tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Penerima/ Tujuan agar dikoordinasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah

					menjadi tidak dapat memohon usul kenaikan pangkat periode april 2023 karena masih terblok di siasn. mohon diberikan solusi untuk dapat saya sampaikan ke bkd. atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.		
27	10 Maret 2023	Helmi Gunawan Harahap	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Siapa Bupati Aktif Pada Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara	Setelah terbitnya surat bapak menteri dalam negeri nomor :100.2.7/1284/sj tanggal 2 maret 2023 perihal : optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten padang lawas, pada poin no.2 menyebutkan agar bupati padang lawas kembali melaksanakan tugas dan wewenangnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten padang lawas.namun pada kenyataannya setelah diterbitkan surat tersebut diatas, plt.bupati padang lawas an. ahmad zarnawi pasaribu masih terus beraktivitas melaksanakan tugas-tugasnya sebagai plt.bupati padang lawas dengan dalih masih menunggu keputusan dari gubernur sumatera utara terkait pemberhentian sk plt.bupati padang lawas	Selesai	Yth. Pelapor, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Padang Lawas mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/1284/SJ tanggal 2 Maret 2023 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Padang Lawas, sampai adanya kebijakan lebih lanjut. Terima kasih
28	28 Maret 2023	Rendi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Bagaimana Mengurus Akte Yang Hilang	Assalamualaikum, kepada yth,bpk/ibu.izin bertanya, bagaimana cara mengurus akte kelahiran yang hilang sedangkan, copy akte kelahiran yang hilang tidak ada?	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Apabila kutipan akta kelahiran hilang maka dapat diterbitkan kembali di tempat domisili dengan membawah surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi aktanya. Dinas Dukcapil akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil yang menerbitkan akta tersebut untuk mencari register/arsip aktanya. Jika register tidak ditemukan, fotokopi juga tidak ada dan tidak ditemukan datanya dalam database kependudukan,

							maka tidak dapat diterbitkan kembali aktanya. Dianggap belum memiliki akta kelahiran, sehingga perlu mengurus kembali akta kelahiran.
29	28 Maret 2023	Desa Wisata Pentagen	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengaduan Maladministrasi Bupati Kerinci Dalam Proses Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pendung Talang Genting Pada Pilkades Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021	Sampai saat ini desa pendung talang genting kecamatan danau kerinci, kabupaten kerinci, provinsi jambi belum dilantik oleh bapak bupati kerinci adi rozalmohon kiranya kepada pihak kemendagri khusus nya kepada bapak menteri dalam negeri prof. drs. h. muhammad tito karnavian m.a., ph.duntuk segera menindaklanjuti tentang laporan kami ini...terima kasih	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima kasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. 2. Sehubungan dengan pengaduan Saudara tentang Maladministrasi Bupati Kerinci Dalam Proses Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pendung Talang Genting Pada Pilkades Serentak Kabupaten Kerinci Tahun 2021, Saudara dapat mengajukan gugatan ke PTUN Jambi. selanjutnya hasil PTUN menjadi dasar bupati melaksanakan keputusan tersebut. 3. Undang-Undang PTUN Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 116 ayat (4) bahwa "Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif." 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 huruf b bahwa kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan inkrah PTUN merupakan salah satu unsur peraturan perundang-undangan. 5. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
30	28 Maret 2023	M Andi Saputra	Pengaduan Tidak	Laporan	Melalui surat ini dengan hormat kami laporkan permasalahan pelanggaran sistim merid dan pelanggaran	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal

			Berkadar Pengawasan		prosedur lelang jabatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten labuhanbatu selatan untuk mohon kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan guna mewujudkan ASN yang profesional berakhlak.		tersebut telah kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan segera ditindaklanjuti.
31	01 April 2023	Ahmad Fauzi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Proses Cetak Kk Tak Kunjung Selesai!	<p>#1806250706930001</p> <p>#ahmad fauzi</p> <p>#3603110711220005</p> <p>#085212546202</p> <p>#berdasarkan informasi dari admin ig dukcapil kab.tangerang bahwa kk tersebut sudah selesai di proses tinggal menunggu file di kirim ke email yg bersangkutan untuk di cetak mandiri.. tapi sampai saat ini belum juga ada email yg masuk. mohon agar segera di kirim kan file nya ke pemohon untuk proses pencetakan. terima kasih</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!</p> <p>Berkaitan dengan keluhan saudara, pengiriman file KK hanya dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kab. Tangerang tempat saudara mengurus. Kami sarankan untuk kembali menghubungi Disdukcapil Tangerang untuk dapat segera dikirimkan jika memang telah tercetak.</p> <p>Berkenaan dengan kendala yang Saudara alami dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, kami atas nama keluarga besar Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami dalam menyampaikan layanan administrasi kependudukan yang tujuan akhirnya adalah untuk membahagiakan masyarakat. Kami akui bahwa saat ini civitas kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terus menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat.</p>

							Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Laport!
32	01 April 2023	Wahyudi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nik Ganda Yang Tidak Kunjung Ada Perubahan	Nik saya terdaftar atas nama orang lain di dukcapil pusat. sehingga data saya tidak bisa digunakan untuk mendaftar apapun seperti rekening bank.dll. sudah dikonsolidasikan oleh dukcapil kota surabaya tahun lalu. dan sudah rekam ulang ktp. tetapi masih belum ada perubahan untuk nik saya. mohon solusi saya sudah bolak balik ke dispenduk surabaya dan kecamatan. tetapi tidak ada solusi untuk saya. kerugian saya dari masalah ini : 1. tidak bisa ikut pemilu, 2. tidak bisa ambil dana blt, 3. tidak bisa membuat rekening bank, dll.	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
33	03 April 2023	Warga Minahasa Selatan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pelantikan Pimpinan Dprd Minahasa Selatan	Saat ini masyarakat kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara banyak yang mempertanyakan terkait di perlambatnya pelantikan ketua dewan kabupaten minahasa selatan mengingat mantan ketua dprd sebelumnya sudah meninggal dunia namun hingga saat ini baik pergantian maupun pelantikan ketua dprd seperti sengaja di perlambat pihak	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait tindaklanjut pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan wewenang provinsi sehingga hal tersebut akan kami

					<p>pemerintah kabupaten minahasa selatan maupun sekretarian dewan minahasa selatan sehingga kedudukan saat ini masih di jabat oleh plt ketua dprd minahasa selatan</p> <p>untuk itu selaku masyarakat mengharapkan agar kemendagri dapat mengambil tindakan tegas akan diperlambatnya pelantikan ketua dprd minsel maupun anggota dewan yang melakukan paw.</p>		<p>teruskan kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagai wakil pemerintah pusat.</p>
34	03 April 2023	Kuuga	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Air Pdam Berwarna Hitam (Seperti Air Parit)	<p>Selamat siang bapak/ibu @kementeriandalamnegeri, nama saya irwan jalan giri rejo rt. 24 kel. lempake kec. samarinda utara izin melaporkan bahwa pada tanggal 03 april 2023 pukul 09.00 wita air pdam kembali keruh berwarna hitam (seperti air parit), kondisi seperti ini sudah berulang kali dilaporkan ke pemkot kota samarinda dan perumda tirta kencana mahakam samarinda tetapi tetap tidak ada perubahan kualitas air. tolong kementerian dalam negeri untuk dapat sesegera mungkin dapat mengaudit perumda tirta mahakam samarinda dan memberikan sanksi tegas terhadap pejabat terkait, karena kondisi seperti ini sudah berulang kali terjadi. perumda tirta kencana mahakam samarinda tidak becus dalam mengelola air di kota samarinda kondisi air keruh (tidak layak konsumsi) seperti ini tidak hanya terjadi di kelurahan lempake tetapi</p>	Selesai	<p>Yth. Pelapor,</p> <p>Terima Kasih atas laporan Bapak dan Ibu yang kami sampaikan, Permasalahan yang Bapak/Ibu sampaikan sudah kami konsultasikan langsung dengan Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Mohon kesediaanya untuk menunggu tindak lanjut.</p> <p>Terima Kasih</p>

					diseluruh kelurahan kota samarinda. tolong tindakan tegasnya terimakasih		
35	11 April 2023	Windy Hidajat	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cetak Blanko E-Ktp	<p>Tolong pak/ibu, dengan sangat mohon dibantu. saya ingin menanyakan untuk blanko e-ktp apakah di kelurahan kemayoran kosong?</p> <p>karena saya mau cetak e-ktp baru karena ada perubahan pada alamat dan status pernikahan?</p> <p>dari tgl 20an maret saya urus dan ktp asli saya sudah di ambil sama kelurahan kemayoran , tp kemarin saya ke kelurahan kemayoran dan info dari petugas disana blanko nya masih kosong</p> <p>saya tanya estimasi nya kapan ada ? petugas nya hanya jawab : saya juga tidak tahu, mungkin lama , bisa 1 bulan atau habis lebaran</p> <p>saya mau pakai itu e-ktp karena saya butuh yang asli untuk pembelian tiket pesawat di online</p> <p>minggu depan sudah lebaran , saya tidak bisa tunggu sampai lama begini saya minta untuk diinfo kapan tersedia nya , karena saya telepon ke sudin jakarta pusat dan kelurahan kemayoran tidak ada satu pun yang mengangkat telepon!</p> <p>seharusnya pelayanan publik di indonesia khususnya di jakarta itu memudahkan warga, bukan menyulitkan</p> <p>karena saya ini orang kerja, jadi gak mungkin tiap hari harus tanya ke kelurahan apakah sudah tersedia atau belum</p> <p>saya minta laporan saya segera ditindaklanjuti</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!</p> <p>Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan bahwa sejak awal tahun 2023 blanko KTP-el cukup banyak stok di Kemendagri, kami sarankan agar Saudara dapat datang segera ke Disdukcapil setempat guna menyampaikan hal tersebut, Stok blanko saat ini ada 1,1 Juta keping untuk 514 kabupaten/kota se-Indonesia dan DKI Jakarta telah mendapat suplai blanko dari Kemendagri sebanyak 255.500 keping pada tanggal 10 April 2023</p> <p>Kami persilakan Sudin Dukcapil Jakarta Pusat segera mengambil ke Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, dan Disdukcapil Provinsi DKI segera mengambilnya lagi untuk tambahan stok di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan mengajukan permohonan surat kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri Jakarta.</p> <p>Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapori!</p>

36	11 April 2023	Herald Steven	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Lulusan Pondok Pesantren Gontor	Assalamualaikum wr.wb...dengan ini saya sedikit bertanya ke kementerian dalam negeri di mana ipdn bernaung di bawah kementerian ini apa lulusan pondok pesantren gontor tidak bisa mendaftar di ipdn? mengingat pondok pesantren gontor kurikulum nya tidak mengikuti pemerintah atau depag... dan di pilihan asal sekolah tidak ada pilihan lain nya kecuali madrasah aliyah...terima kasih	Selesai	Walaikumsalam Wr. Wb., untuk lulusan tahun 2020-2022, dapat mendaftar dengan mengunggah Ijazah asli/legalisir Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, jika pendaftar merupakan lulusan tahun 2023 dapat melampirkan Surat Keterangan Kelas XII SMA/MA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap/distempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan Tahun 2023 untuk dokumen awal persyaratan pendaftaran. Untuk pilihan sekolah dapat memilih Madrasah Aliyah. Terima Kasih
37	27 April 2023	Yansi Ayuningtyas Hadi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cetak Kk Online Di Depok?	Bagaimana cara cetak kk online di depok? saya belum dapat info yg lengkap dan kompeten. terim kasih	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Berkaitan dengan pertanyaan sudara, proses pelayanan adminduk secara online merupakan kewenangan masing-masing Dinas Dukcapil. Jadi kami sarankan untuk menghubungi Disdukcapil Kota Depok atau melalui https://disdukcapil.depok.go.id/Home/silondo untuk mendapatkan info yang sesuai. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!
38	24 April 2023	Bayu Sutrisno	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permintaan Informasi Keterangan Kematian	Kepada yth. pengurus dukcapil. dengan ini saya mohon informasi tentang kelengkapan berkas untuk dapat mengetahui informasi tanggal kematian nenek yang lahir pada tahun	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait

					1949. dan apakah bisa cukup meminta informasi melalui pesan ini. terimakasih.		dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,, Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
39	29 April 2023	Mohammad Muhshon	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Update Dan Cetak Kk	1. bagaimana cara up date kk secara online? 2. bagaimana cara cetak kk mandiri secara online?	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,karena yang bisa melakukan verifikasi Barqode hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
40	27 April 2023	Tazkiah Unida	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ktp Digital Tidak Bisa Untuk Pengguna Ios	Selamat siang, mohon solusinya untuk para pengguna ios yang belum dapat menginstal aplikasi identitas kependudukan digital karena belum tersedia versi nya di apps store, mohon agar segera dibuat sehingga kami bisa dimudahkan karena kami juga memerlukan ktp digital	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP El) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
41	03 Mei 2023	Rahmat Mahesa	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Blokir Akses Jalan Didepan Rumah	Dengan ini melaporkan dan mengadukan kehadiran yang terhormat bapak mendagri selaku penyelenggara negara dan penentu kebijakan segala peraturan pemerintah dan peraturan peraturan lainnya yang berlaku di wilayah nkri, adapun dumas (aduan masyarakat) ini, terkait mengenai tidak hadirnya negara / tidak adanya kehadiran negara pada sat warga negaranya terzholimi olen pengusaha.adapun bentuk ketidakhadiran negara / tidak	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

					<p>hadirnya negara tsb adalah ketika saya berulang kali membuat dumas di tempat tinggal saya, yang ditujukan kepada camat sukaraja, satpol pp kabupaten bogor atas musibah yang saya alami dari kesewenang wenangan seorang pengusaha yang bernama sdr. nandang sutendi yang teiah memblokade / memblokir akses jalan dean rumah say dengan membuat benteng pembatas sehingga segala aktifitas kehidupan rumah tanga say terisolasi dengan adanya bangunan blockade jalan depan rumah saya tsb (bukti terlampir dalam dumas ini) sedangkan pengusaha tsb telah mengalihfungsikan ruman tempt tinggalnya menjadi bangunan pabrik yang tok ada imb dan tidak ada ijin-ijin lainnya, yang sudah jelas jelas melanggar segala bentuk peraturan pemerintah maupun perda yang ada dan dampak dari alifungsi rumah tempat tingg al menjadi bangunan pabrik tsb mengakibatkan adanya kebisingan / polusi suara dari aktifitas pabrik tsb, lalu sayapun melaporkan / membuat dumas kepada satpol ppkabupaten bogor dan instansi instansi terkait lainnya.namun apa yang say harapkan dari dumas yang sudah say ajukan ternyata sungguh diluar dugaan dan diluar nalar saya, dimana pihak satpol pp kabupaten bogor malah menanyakan ke saya, kesanggupan saya untuk mengeluarkan biaya operasional jika akan dilakukan pembongkaran terhadap obyek bangunan yang tok</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>mempunyai imb dan ilin-ilin lainnya dengan alasan anggaran sudah habis (bapak mendagri yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan pertanyaan saya kepada bapak adalah apakah memang seperti itu mekanismenya kalau anggaran sudah habis maka biaya operasional dibebankan kepada masyarakat yang sah jelas jelas menjadi korban dari kesewenang-wenangan pengusaha tsb?. lalu kenapa harus rakyat yang dibebankan?????)bapak mendagri yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, dengan datangnya dumas dari saya kehadiran bapak, saya berharap negara benar-benar hadir disaat rakyatnya membutuhkan dan mengharap perlindungan dari negara baik dari sesama anak bangsa yang melakukan penindasan terhadap anak bangsa lainnya (pengusaha tsb terhadap say) maupun aparat penegak peraturan daerah dalam hal ini satpol pp</p>		
42	03 Mei 2023	Nita Sri Wahyuni	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mengecek Kk	Kk belum online bisa tolong untuk di online .kan	Selesai	<p>Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya</p>

43	03 Mei 2023	Maryani Umar	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Laporan Nik Tidak Valid	Saya mendapati informasi dari pihak pengelola beasiswa kirk bahwa nik saya tidak valid	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP El) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
44	03 Mei 2023	Kuuga	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Air Pdam Kembali Berwarna Kuning	Selamat siang bapak/ibu @kementeriandalamnegeri, nama saya sutarji jalan belimau rt. 24 kel. lempake kec. samarinda utara izin melaporkan bahwa pada tanggal 28 april 2023 pukul 13 .07 wita air pdam kembali keruh (warna kuning), kondisi seperti ini sudah sering kali terjadi, sudah dilaporkan ke pemkot kota samarinda dan ke kantor perumda tirta kencana samarinda tetapi hanya diiyakan dan tetap tidak ada perubahan kualitas air. tolong kementerian dalam negeri untuk dapat sesegera mungkin dapat mengaudit perumda tirta mahakam samarinda dan memberikan sangsi tegas terhadap pejabat terkait, karena kondisi seperti ini sudah berulang kali terjadi. manajemen perumda tirta kencana samarinda tidak becus dalam mengelola air di kota samarinda kondisi air keruh (tidak layak konsumsi) seperti ini sudah terjadi puluhan tahun dan tidak ada perubahan sama sekali, dan juga ini tidak hanya terjadi di kelurahan lempake tetapi diseluruh kelurahan	Selesai	Yth. Pelapor, Terima Kasih atas laporan Bapak dan Ibu yang kami sampaikan, Permasalahan yang Bapak/Ibu sampaikan sudah kami konsultasikan langsung dengan Perumdam Tirta Kencana Samarinda mohon untuk dapat menunggu. Terima Kasih

					kota samarinda (ada yang air pdamnya keruh, mati). foto air keruh terlampir, tolong tindakan tegasnya terimakasih.		
45	11 Mei 2023	Ani Oktiana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Reformasi Birokrasi	<p>Hari selasa mengantar adik mencari ktp di kantor kecamatan diwek - kabupaten jombang, sampai kantor diinfo system sedang error disarankan kembali keesokkan hari.</p> <p>hari rabu kembali dan bisa dilakukan perekaman, dan untuk hasil cetak bisa diambil hari kamis.</p> <p>hari kamis (hari ini) kembali lagi ke kantor kecamatan diwek - kabupaten jombang, sekitar jam 10 pagi, dan diinfo jika nomor antrian sudah habis, padahal jam tersebut masih jam aktif operasional, dan tidak ada antrian di kantor.</p> <p>sedangkan kami, perlu efisiensi waktu, dan kerja cepat demi mendukung terciptanya program pemerintah 1 data</p> <p>apa karena pelayanan tidak ada biaya administrasi jadi sistem pelayanan dibuat seenaknya saja?</p> <p>mohon bisa dijadikan koreksi dan perhatian untuk kebaikan bersama. terima kasih.</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!</p> <p>Berkaitan dengan laporan saudara, kami sampaikan dan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kendala yang dialami. Kami juga mengucapkan terimakasih atas keluhan yang saudara sampaikan. Laporan saudara akan kami tindaklanjuti dan melakukan perbaikan di Disdukcapil Jombang.</p> <p>Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!</p>
46	09 Mei 2023	Heri	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengurusan Kartu Keluarga Dan Ktp Hilang	Kartu keluarga dan ktp saya hilang saya mengajukan pencetakan baru apakah bisa tanpa persyaratan	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!</p> <p>Berkenaan dengan pernyataan saudara, silakan datang ke Disdukcapil sesuai domisili dan membawa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. Nanti akan dibantu petugas Disdukcapil untuk mengisi formulir F-1.02 dan memproses pencetakan KTP-el dan KK</p>

							<p>saudara. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapo!</p>
47	19 Mei 2023	Budi Hartono Atatang	Aspirasi	<p>Usulan Kebutuhan Hukum Mengatur Penambahan Elemen Data Nama Kepala Keluarga Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik</p>	<p>kebutuhan hukum dibuatkan peraturan menteri dalam negeri atau surat edaran yang mengatur penambahan elemen data nama kepala keluarga dalam kartu tanda penduduk elektronik yang beredar saat ini tidak dicantumkan nama kepala keluarga terkait diduga ada berlakunya/diterbitkannya kartu tanda penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran asli, ijasah asli, kartu keluarga asli tujuan:mmpersempit ruang gerak calo/oknum dalam pengurusan dokumen kependudukan adanya pemadanan nama kepala keluarga antara akta kelahiran, ijazah, kartu keluarga bila nama kepala keluarga adalah bapak/ibu dan untuk adanya kepastian hukum tertibnya administrasi kependudukan kepala keluarga yang menjadi penanggung jawab pada penduduk yang sudah memenuhi persyaratan memiliki kartu tanda penduduk pada saat emergency/penyelenggaraan pendaftaran pemilih pada tahapan pemilu untuk mengetahui pada satu bangunan/hunian ada berapa kepala</p>	Selesai	<p>Permasalahan ada pada pendaftaran penduduk tanpa kelengkapan dokumen saat perekaman di kantor camat kuta utara bisa masif terjadi hampir di seluruh kecamatan di propinsi Bali bahkan di kabupaten sidoarjo asal penduduk dibesarkan yang mana orang tuanya memiliki ktp asli setempat. Sudah saya sampaikan kepada panitia pemungutan kecamatan seksi pemerintah kecamatan Kuta utara nama ibu wendiati untuk disampaikan kepada ibu ade kepala seksi pemerintah kecamatan Kuta Utara terkait permasalahan penduduk diduga memiliki ktp tanpa pernah ada kartu keluarga yang hardcopy diajukan/dimohonkan oleh kepala keluarga dengan melengkapi persyaratan asal nama dari akta kelahiran asli, ijasah asli atau dari perubahan nama melalui penetapan pengadilan setempat.</p>

					keluarga tanpa perlu melihat kartu keluarga yang dibawa oleh kepala keluarga.karena adanya peraturan perundangan yang mengatur nama kepala keluarga tidak harus nama orang tua bisa nama diri sendiri atau nama orang lain yang menampung penduduk yang sudah cukup umur yang tercantum dalam kartu keluarga. perubahan elemen data kartu keluarga terkait perubahan kepala keluarga akan merubah nomor kartu keluarga dan wajib diikuti perubahan elemen data pada kartu tanda penduduk bila adanya penambahan elemen data nama kepala keluarga dalam kartu tanda penduduk elektronik yang beredar.		
48	17 Mei 2023	M Sayfuddin Anshori	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Tindak Lanjut Pemerintah Setelah Organisasi Kesehatan Dunia (Who) Mencabut Status Pandemi Covid-19	Mohon buat pemerintah, terlebih khusus instansi terkait, agar segera menindaklanjuti keputusan who mengenai pencabutan status wabah covid-19 sebagai pandemi, antara lain: (1) pemberitaan yang lebih masif dan intensif mengenai pencabutan status pandemi kepada masyarakat melalui media massa dan daring. saya perhatikan informasi mengenai pencabutan status pandemi di media yang ada di indonesia amat kurang dan masih kalah populer ketimbang isu pemberitaan lain. akibatnya, masyarakat sampai sekarang masih banyak belum mengetahui sehingga ada yang masih takut akan ancaman covid-19. (2) menyusun regulasi oleh presiden dan/atau kementerian/lembaga terkait	Selesai	Selamat Pagi Bapak/Ibu Terima kasih atas masukan yang telah disampaikan. Pada Inmendagri 53 Tahun 2022, Pemerintah Pusat mengajurkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker pada kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat, ruangan tertutup dan sempit, serta bagi masyarakat yang memiliki gejala penyakit pernapasan. Aturan ini sifatnya anjuran dimana masyarakat yang dapat menilai perlu atau tidaknya memakai masker pada situasi tertentu. hal ini merupakan strategi pemerintah pusat untuk menuju endemi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. pemerintah pusat juga terus melakukan monitoring dan kajian untuk dapat menyusun regulasi terkait status pandemi/endemi di masyarakat Terima Kasih Salam sehat,Direktorat Manajemen

					mengenai pencabutan kewajiban memakai masker di tempat-tempat tertentu. mengingatkan sebuah peraturan perundang-undangan akan terus berlaku selama belum dicabut. ini tentunya berdampak mengenai sikap dari pelaku usaha dan instansi pemerintahan/bumn/bumd mengenai penerapan protokol kesehatan kepada pegawainya maupun masyarakat penerima layanan. masyarakat awam jadinya kesulitan di dalam melihat ekspresi wajah maupun suara secara sangat jelas dari para pelayan masyarakat akibat pemakaian masker. terima kasih.		Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Email: ditmpbk.adwil@kemendagri.go.id
49	26 Mei 2023	Nohan Tamim Syandana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Validasi Nik Dan Kk	Cek nik atas nama nohan tamim syandana dan aktivasi kartu keluarga nik	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
50	26 Mei 2023	Sudarman	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kapan Sk Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Dilantik	Kepada yth kemendagri menteri dalam negeri republik indonesia bapak tito karnavian kapan sk wakil bupati bangka tengah keluar, dan untuk dilantik, karena sampai sekarang setelah proses pemilihan di dprd, kabar itu belum juga ada kami masyarakat bangka tengah sudah merindukan sosok wakil bupati,	Selesai	Sekarang banyak rencana kerja yg tertunda, kegiatan2 bersama warga sering tidak dihadiri Bupati atau pejabat lainnya, andai ada wakil bupati, kerja bupati bisa terbantu meski di masa waktu yg tidak begitu lama lagi, tetapi masyarakat merindukan sosok wakil bupati, tolong Kemendagri, mohon untuk segera di proses jgn di tunda lagi, terimakasih

					<p>karena sudah 2 kali bangka tengah ditinggalkan wakil bupatinya peran pengganti seorang bupati di lingkungan masyarakat tidak bisa digantikan oleh sekda dan kepala lainnya kecuali wakil bupati, dan wakil bupati juga bisa menjadi teman bincang bupati untuk sebuah pembangunan jadi kami mohon, segerakan pak, mudahkan pak segala urusannya, jangan biarkan bangka tengah kami kembali merana, selalu di ledek daerah lain, truk aja punya gandengan, masa&#x27; bupati bangka tengah tidak ada. terimakasih semoga bapak sehat dan sukses selalu, aamiin</p>		
51	07 Juni 2023	Ojak Situmorang	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Skmj Sudah Terbit, Tapi Ditebus 400 Ribu Di Bkd Humbang Hasundutan	<p>Setelah lebih setahun, skmj guru terbit. namun, oleh salah satu rekan sama sama pengangkatan cpns yang ditempatkan di bkd humbang hasundutan meminta melalui saluran media sosial ketika ditanya, skmj harus ditebus 400 ribu. saya sebagai guru prihatin melihat keadaan tersebut. jiwa korsa saya sebagai guru yang sudah mendapatkan skmj secara gratis dari dulu langsung tergugah. saya melaporkan ini melihat belakang ini, mengurus skmj di humbang penuh dengan drama. saat itu, kami asn angkatan 2018 dikirim oleh casn juga untuk membuat skmj guru. namun, harus membayar rp1 juta rupiah. di saat yang sama, asn guru pemprovsu membuat skmj. tapi tidak membayar apa apa.</p>	Selesai	<p>Yth. Pelapor,</p> <p>Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal mohon untuk juga menambahkan dokumen sebagai bukti tambahan agar kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!</p>

					<p>tidak terima pungutan tersebut, saya menanyakan bahwa apakah benar bahwa dinas pendidikan membuat arahan untuk mengurus skmj. dinas pendidikan mengaku tidak tahu. dinas pendidikan humbang hasundutan juga mengatakan bahwa guru pns angkatan 2019 tidak bisa mengurus skmj karena belum ada sertifikat pendidik.</p> <p>karena guru asn angkatan 2019 ramai ramai mengurus berkas ke bkd humbang hasundutan, saya bertanya langsung pada bkd humbang hasundutan. kata bkd humbang hasundutan, tidak ada arahan pengurusan tersebut.</p> <p>nyatanya, teman teman asn muda banyak yang menvayar rp1 juta rupiah dan akhirnya mereka mendapatkan skmj.</p> <p>tahun ini, karena sertifikat pendidik saya sudah keluar, kami tetap membayar rp300.000 untuk mengurus skmj. dan, kata bkd, kami baru bisa naik pangkat 4 tahun lagi. sementara itu, teman teman yang membayar 1 juta untuk mengurus skmj, sudah naik pangkat. kini, skmj terbit dan kami harus menebus 400 ribu oleh rekan sepeangkatan asn di bkd humbang hasundutan</p> <p>mohon untuk ditindaklanjuti pak/bu. salam hormat dan salam percaya pada lapor.go.id</p>		
52	26 Juni 2023	Juwita Anggraeni	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Tidak Melayani Dengan Baik	<p>Selamat pagi bapak kementerian kemendagri, saya juwita anggraeni ingin melaporkan bahwa ada pelayanan capil yang tidak sama</p>	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR!

					sekali menanggapi rakyat dalam pengurusan dokumen, saya sudah pelaporan lewat whatsapp pengaduan capil di nomor 082317006403 tapi sama sekali tidak ada tanggapan sudah 5 hari ini . mohon di tindak lanjuti permasalahan ini , karena pelayanan tidak sesuai sop tidak sama sekali membantu pengurusan dokumen. tidak ada respon atau tanggapan. tolong bantu rakyat , pihak capil ini tidak peduli dengan rakyatnya. mohon di tindak tegas . terimakasih		Sebelumnya kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Perlu kami informasikan kami selalu melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat bahagia. Sekali lagi terimakasih atas masukan dan sarannya. Salam Dukcapil Prima, Indonesia Maju. Jangan lupa untuk memberikan feedback dengan Bintang 5 pada akun Lapor Saudari. Terima kasih.
53	24 Juni 2023	N4	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Sk Pppk Terhambat Oleh Kemendagri	Sudah 6 bulan dari pengumuman kelulusan pppk kota tasikmalaya tidak mendapatkan hak yaitu sk yang harusnya diterima tidak lama dari kelulusan.berita dari bkpsdm kota tasikmalaya sk yang tidak kunjung terbit dikarnakan masih belum adanya persetujuan dari kemendagri.mau sampai kapan?ketika alasannya karna pj walikota, apakah etis mengorbankan para pejuang nafkah sampai dengan 6 bulan?yang melengkapi berkasbrlajarmengikuti seleksiwaktu, materil sudah dikorbkan para peserta yang sudah lulus, sekarang mohon hak peserta yang lulus dipenuhi. terimakasih	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait pengangkatan PPPK merupakan kewenangan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah
54	24 Juni 2023	Ari Saputra	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kalender Diklat Tahun 2023	Mohon informasi kalender diklat ppsdm kemendagri regional bukitinggi untuk tahun 2023	Selesai	terima kasih atas pertanyaanya, berikut kami lampirkan File PDF kalender pelaksanaan pelatihan di PPSPDM Regional Bukititnggi Kementerian Dalam Negeri :
55	24 Juni 2023	Ilham	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Perangan Jalan	Lampu penerangan jalan dari asrama menuju mesjid ppsdm kemendagri regional bukitinggi sering hidup-mati, sehingga para peserta pelatihan	Selesai	Terima kasih atas pertanyaan dan masukan yang berharga bagi kami, dan sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanan fasilitas Lampu

					kurang nyaman melakukan perjalanan dari mesjid ke asrama pada malam hari.		penerangan jalan dari asrama menuju mesjid ppsdm kemendagri regional bukititnggi saat ini lampu penerangan jalan sudah kami perbaiki dan kami tambahkan lampu tambahan/lampu sorot untuk mengantisipasi lampu utama jika terjadi kerusakan serta juga menambah intensitas cahaya saat malam lokasi asrama menuju masjid PPSDM Regional Bukititnggi terima kasih..
56	30 Juni 2023	Saekullah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Keluhan Atas Aplikasi Identitas Kependudukan Digital	Asalamualaikum pak/buk saya sebagai warga negara mengeluhkan atas sulitnya membuat e-ktp, karna kekosongan belangko, dan di terbitkannya aplikasi ikd namun di dalam aplikasi trsbut tidak bisa di cetak atau di donlod mohon solusinya....	Selesai	Tolong pak/Bu agar bisa di kasih solusinya... Krna e-KTP LG sangat di butuhkan
57	28 Juni 2023	Jeli Farida	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permintaan File Kartu Keluarga	Mohon dapat dikirimkan file asli kartu keluarga saya untuk keperluan pembuatan paspor. nik saya	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,, Karena yang bisa melakukan perbaikan elemen data itu hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK..Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
58	28 Juni 2023	Hendiana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Perubahan Data Kk Dan Akta Tempat Lahir Anak	Selamat sore, saya hendiana saya ingin bertanya perihal kk dan akta anak apakah bisa di rubah karena di kk dan akta tertulis tempat lahir gombang, pemasalahannya gombang itu kecamatan, bukan kabupaten saya ingin merubah menjadi kabupaten kebumen karena di takutkan saat nanti mendaftar sekolah	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,, Karena yang bisa melakukan perbaikan elemen data itu hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK...

					di permasalahan mohon jawaban nya terima kasih		Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
59	28 Juni 2023	Wahyu Susanto	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Tidak Bisa Ganti Tanda Tangan E- Ktp	Mohon izin melapor kemarin saya mengurus ktp baru karena pindah domisili, sekaligus niatnya mau ganti tanda tangan, namun sesampainya di dukcapil kata petugas perekaman e-ktp, untuk ganti tanda tangan tidak bisa. jadi kemarin hanya cetak e-ktp dengan alamat baru tanpa ganti tanda tangan. apakah memang aturan sekarang begitu tidak boleh ganti tanda tangan?	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Berkaitan dengan laporan saudara, kami sampaikan bahwa mempedomani Permendagri No. 74 Tahun 2015, untuk pergantian ttd pada KTP-el dapat dilakukan di Dinas Dukcapil setempat. Namun kami ingatkan bahwa pergantian ttd pada KTP-el dapat mempengaruhi dokumen lainnya yang menggunakan ttd sejenis sebelumnya dan itu diluar tanggung jawab dukcapil. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapo!
60	26 Juni 2023	Aidil Fikri Japnur	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Terkait Dengan Usulan Pj Bupati Kabupaten Aceh Utara	Assalamualaikum pak menteri saya aidil fikri, seorang warga di kabupaten aceh utara, provinsi aceh. saya membaca berita yang isinya soal usulan pj bupati aceh utara yang diusulkan oleh dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh utara, dimana katanya dalam berita yang diusulkan adalah satu nama tunggal yaitu t aznal zahri. maka dengan ini saya berusaha mengirimkan email ini dengan harapan dibaca oleh bapak menteri dan staff untuk jadi bahan pertimbangan dalam menetapkan pj bupati aceh utara, karena menurut penelusuran saya, bapak t aznal zahri	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan. Oleh karena itu kami mohon untuk mencantumkan dokumen tambahan sebagai bukti agar kami dapat segera menindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

					<p>pernah terkena sanksi dari kemendagri akibat pemalsuan sk kenaikan jabatan. seharusnya seorang pimpinan itu harus memiliki rekam jejak integritas dan moralitas yang baik.semoga saja bapak menteri dan staff bisa membaca email saya ini dan menjadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan pj bupati aceh utara.terimakasih bapak menteri</p>		
61	03 Juli 2023	Welly Bano	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Aktivasi Akun	<p>Selamat siang. saya atas nama welhelmina m. bano, s.pd ingin menyampaikan bahwa; akun saya belum diaktivasi. mohon untuk diproses, terimakasih.bukti registrasi terlampir.</p>	Selesai	<p>Selamat siang. Untuk pengajuan konsultasi datang langsung ke Kementerian Dalam Negeri, bisa langsung datang ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Jl. Medan Merdeka Utara, No. 7 Jakarta Pusat) Gedung B lantai Lobby. Terima kasih.Biro Organisasi dan Tatalaksana</p>
62	03 Juli 2023	Olive Resmana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Aktivasi Kemendagri App	<p>Selamat siang, saya membutuhkan surat domisili tinggal di bali untuk persyaratan perpanjang passport. sebenar ny saya sudah membawa paspor lama dan ektp namun pihak imigrasi ingin saya membawa surat domisili bali juga. saya sudah ke kantor desa untuk urus dan harus lewat online, saya sudah daftar tapi masih proses verifikasi. kantor desa bilang 1x24jam tapi ini sudah lebih dari 24 jam dan akun saya masih belum terverifikasi, apa bisa d bantu? karena saya butuh cepat, pihak imigrasi hanya memberi waktu sebentar untuk saya melengkapi surat domisili ini.saya sudah kontak dukcapil surabaya dan bali namun respond nya saling tunjuk2. saya dm instagram kemendagri juga belum d respond.</p>	Selesai	<p>Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP El) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu.Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya</p>

63	15 Juli 2023	Siti Fatimah Sgz	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pembuatan Surat Domisili Terhambat	<p>Senin, 10 juli 2023 saya mendaftar akun di https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id/auth untuk keperluan membuat surat domisili sementara di kabupaten sleman namun sampai saat ini (sabtu, 15 juli 2023) akun saya belum diverifikasi oleh dindukcapil kabupaten banyumas (alamat sesuai ktp) saya sudah menghubungi dukcapil banyumas melalui whatsapp dari hari rabu, 12 juli 2023, namun belum ada tindak lanjut sama sekali sampai hari ini, akun saya belum diverifikasi dan belum aktif, sehingga terhambat dalam pembuatan surat domisili surat domisili tersebut akan saya gunakan untuk melamar kerja, batasnya senin, 17 juli 2023 mohon untuk segera ditindaklanjuti, terima kasih.</p>	Selesai	terima kasih atas tindak lanjutnya sampai hari ini, selasa 18 juli pendaftaran kerja sudah ditutup dan akun saya belum diverifikasi sama sekali, sangat menyulitkan masyarakat kalau seperti ini, hilang sudah kesempatan saya, semoga lebih gercep lagi kedepannya, terima kasih.
64	15 Juli 2023	Iddo Irawan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Susahnya Mendapat Antrian Pencetakan E-Ktp Di Pontianak	<p>Singkat cerita saya membantu paman saya untuk mengambil antrian di https://online.disdukcapil.pontianak.go.id/. pendaftaran di buka setiap jumat pukul 14.00 wib. di minggu pertama tepatnya tanggal 7 juli 2023 saya melakukan pendaftaran di website di atas sekitar pukul 15.30, namun ketika saya lihat antrian untuk tanggal 10-14 july sudah penuh semua. di pikiran saya mungkin saya telat mendaftar dan kebetulan ramai yang mendaftar sehingga baru 1.30 menit saja pendaftaran di buka slot utk 300 orang sudah penuh. namun di minggu ke dua terjadi lagi, kali ini saya mendaftar tepat di tanggal</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang dialami. Sejak tahun 2018, Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil kabupaten/kota telah menginisiasi layanan Administrasi Kependudukan secara daring/online. Layanan tersebut telah diimplementasikan di hampir seluruh wilayah di Indonesia melalui berbagai platform (whatsapp, email, website dan/atau aplikasi berbasis android) yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan untuk masyarakat. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Saudara dapat menghubungi Kepala Dinas Dukcapil Kota</p>

					<p>14 juli 2023 pukul 14.00. website https://online.disdukcapil.pontianak.go.id/ sempat tidak dapat di akses pada 14.00 dan ini terus saya coba untuk akses sampai pada 14.10 wib. barulah website tersebut bisa di buka. namun setelah mengisi data paman saya, dan memilih tanggal saya merasa heran, karena semua slot untuk tanggal dari 17 juli - 21 july semua sudah terisi penuh. saya mengisi data paman saya tidak sampai 2 menit sejak website bisa di akses. tepatnya pukul 14.12 wib semua slot untuk 17 juli - 21 july sudah penuh lagi.</p> <p>saya merasa ada yang aneh dengan sistem antrian online ini, apabila ada kendala di sistem mohon diperbaharui dan diperbaiki. namun jika memang ada kecurangan tolong juga untuk segera di tindak.</p> <p>saya memiliki bukti tangkapan layar pada tanggal 7 dan juga 14 juli. akan saya lampirkan bersama laporan ini.</p>		<p>Pontianak, Ibu Erma Suryani di Nomor 081522897748 dengan menunjukkan screenshoot laporan ini. Selain hal tersebut, kami juga akan melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap layanan pada kantor Dinas Dukcapil Kota Pontianak.</p> <p>Demikian kami sampaikan, salam L4POR!</p>
65	13 Juli 2023	Yera Tiara	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Panggilan Untuk Melakukan Pergantian Foto Dan Elemen Alamat Di Ktp Serta Ketersediaan Blanko	<p>Salam hormat, saya yera tiara berasal dari Palembang. pada tanggal 09 februari 2023 yang lalu saya pergi ke dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang untuk mengganti elemen alamat dan foto di ktp saya. ketika sampai disana saya diberitahu untuk melakukan pendaftarannya terlebih dahulu dengan meninggalkan fotocopy kartu keluarga serta nomor handphone dan diminta untuk menunggu paling lama sampai akhir bulan februari untuk dihubungi untuk melakukan foto dan mengganti elemen di ktp. tetapi sampai saat ini</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!</p> <p>Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan bahwa sejak awal tahun 2023 Kota Palembang sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 telah Kemendagri telah mendistribusikan blangko KTP-el sebanyak 70.000 keping.</p> <p>Kami persilakan Saudara untuk kembali mendatangi Disdukcapil Kota Palembang, untuk mengajukan permohonan pencetakan ulang KTP-el karena perubahan elemen data dengan membawa kelengkapan persyaratan</p>

					<p>saya belum juga di panggil. kemudian beberapa hari yang lalu pada senin 10 juli 2023 saya pergi ke mal pelayanan publik palembang bagian disdukcapil untuk melakukan pergantian elemen alamat di ktp dan mereka bilang blanko saat ini hanya untuk pemula saja dan tidak diketahui kapan akan ada blanko nya lagi untuk pergantian ktp yang lama. bagaimana kejelasannya? apakah saya harus menunggu lebih lama lagi? karena sebelumnya saya juga telah pergi ke disdukcapil palembang pada tahun 2020/2021 untuk melakukan pergantian foto dan elemen di ktp dan diminta menunggu untuk dipanggil tetapi sama saja saya tidak kunjung dipanggil. sekian terimakasih. salam hormat.</p>		<p>sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disdukcapil Kota Palembang akan memfasilitasi penerbitan fisik KTP-el Saudara atau jika Saudara memiliki HP berbasis Android atau IOS Disdukcapil akan memfasilitasi penerbitan KTP-el Digital Saudara.</p> <p>Perlu kami informasikan juga kepada Saudara, bahwa sesuai amanat Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 menyatakan KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital. Jadi jika Disdukcapil Kota Palembang menerbitkan KTP-el digital, KTP-el digital tersebut bisa digunakan untuk urusan pelayanan publik. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapo!</p>
66	13 Juli 2023	Anonim	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Aturan Yang Tidak Relevan	<p>Selamat malam yth, bapak kepala bpsdm kemendagri dan bpsdm sumut. saya salah satu cpns yang mengikuti latsar di 2023 ini, saya dan rekan-rekan saya berusaha mengikuti setiap aturan yang ada dengan baik. tapi ada satu hal yang mengganjal buat saya lakukan, yaitu perihal perlakuan diskriminatif antara pria dan wanita, yang dimana perlakuan diskriminatif tersebut ada pada potongan rambut, ya, potongan rambut, kenapa yang pria diwajibkan untuk "memotong rambut menjadi 0,5" sedangkan perempuan</p>	Selesai	<p>Terimakasih atas laporan yang telah disampaikan. Kami dari PPSDM Kemendagri sangat mengapresiasi atas masukan yang telah diberikan untuk dapat dijadikan perbaikan kebijakan dalam pelaksanaan latsar dikemudian hari. Terimakasih</p>

					<p>hanya disuruh mengikat rambut dengan rapi? kalau ingin menerapkan peraturan semi-militer seharusnya yang perempuan di "bondol" juga dong. ini terkesan bpsdm pilih kasih/ kurang riset. lagipula 2 bulan lalu rambut kami disuruh cukur habis, dan kami sudah laksanakan dan rambut kami masih pendek-pendek. kenapa harus di gundulin lagi? lagipula beberapa orang ada juga yang mempunyai masalah kulit kepala bila berada di suhu yang panas, apalagi yang berada di pesisir.</p> <p>kami jamin kami bisa mengikuti kegiatan peraturan yang lain, tapi peraturan mewajibkan potong rambut 0.5 buat pria itu juga sudah ga relevan menurut saya. kan bisa dengan peraturan "rambut pria wajib pendek/ potongan militer" tolonglah di kaji lagi yth bapak/ibu pimpinan sekalian, tolong kasih contoh buat kami para cpns apa itu integritas supaya kami bisa terapkan di tempat kerja kami. h</p>		
67	24 Juli 2023	Jefri Sadrach	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ujian Phisikotes Ipdn 2023	<p>Ijin memberitahukan dan bertanya apakah tidak ada dispensasi... anaksaya ikut ujian ipdn tahun 2023 ujian cat lulus , testkesehatan lulus dan test phisikotest dilaksanakan tanggal 18 juli 2023 lokasi test di polda gorontalo dari mulai di kumpulkan peserta test sebelum pukul 6.30 pagi dan mulai test jam 08.00 wita saat sementara test aplikasi testnya eror sampe beberapa kali sampai dengan sore dan terkhir akan</p>	Selesai	<p>Terima kasih atas laporannya, izin menyampaikan bahwa pada saat Test Psikotest pada SPCP tahun 2023, terjadi permasalahan Server down, perlu diketahui bahwa di Seluruh Indonesia mengalami permasalahan yang sama.</p> <p>Kami mohon maaf atas permasalahan yang terjadi. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi pelaksana tes Psikotes (Biro SDM Polda Provinsi setempat. Terima Kasih.</p>

					<p>di mulai lagi pada pukul 19.30 anak anak sudah kelelahan nerveus dengan ujian karena aplikasi ujian phisikotestnya eror.. akhirnya pada ujian pukul 19.30 mereka sudah tidak konsen lagi anak saya bernama afivah virgiani putri sadrach mendapatkan nilai 56 di luar standar yang harus 61 selesai yang test anak anak di polda gorontalo sambil menunggu dari seluruh indonesia pada pukul 22.00.. di tambah menunggu samapa dengan pukul 00.00 .. pertanyaansaya apakah mereka tidak bisa dapat dispensasi.. sayaberharapa kalau memng aplikasinya eror ujian bisa di tunda.. atauada nilai rambahan bagi peserta test yang mengalami eror dokumen yang saya lampirkan adalah nama anak saya tidak adaapakah ada kebijakan dan pak menteri dalam negeri. mohon kebijakan.. dankesempatan untuk bisa merubah nasih kami masyarakat tidak mampu... makasihbanyak .. ijinbukannya melaporkan hanya ingin meminta kebijakan dari pak menteri dan para pejabat di kementerian dalam negeri.. anaksaya sudah 4 kali ikut test ipdn sebagai pertimbangan.. makasihbanyak semoga allah memberi kesehatan kepada pak menteri dan seluruh jajarannya aaamiiiiin</p>		
68	09 Juli 2023	Sp4n Lapor	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Laman Ppid Kemendagri Di Hack	<p>Laman tersebut: https://ppid.kemendagri.go.id/storage/avatars/wmium58hvrgezidxtvwg7j2loki8vfnie2mx59ljj.html mohon konten yang tidak relevan</p>	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami

					tersebut dihapus dari laman tersebut. mohon agar kemdagri meperkuat keamanan dan keketatan sistem agar tidak dapat dijebol oleh oknum yg tidak bertanggungjawab. sertakan bukti jika telah ditindaklanjuti		tindaklanjuti sesuai batas waktu tindakan di SP4N LAPOR!
69	24 Juli 2023	Inti Arni	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mutasi Asn	Assalamualaikum wr.wb, selamat siang bpk/ibu kementerian dalam negeri mohon informasinya status mutasi atas nama sri inti arni nip 198506272017082001 dari kabupaten sumba barat daya provinsi nusa tenggara timur ke kabupaten aceh tamiang provinsi aceh sedang ditahap apa ya dan tanggal berapa terbit perteknya dari bkn karena saya tidak mendapatkan notif di wa terimakasih banyak atas bantuannya	Selesai	Yth. Pelapor, Terkait Mutasi Antardaerah Pegawai Negeri Sipil dapat dicek ke Badan Kepegawaian Daerah Penerima/ Tujuan dikarenakan diproses melalui Badan Kepegawaian Daerah Penerima/Tujuan. Terimakasih,Ditjen Otonomi Daerah
70	24 Juli 2023	Julia Hotmilan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ingin Mengetahui Nik Dan Data	Kemarin saya bikin kk, tapi krna ayah saya sudah lama tidak ada kabarnya, data nya di hilangkan, tapi skrg saya sudah dapat kabar ayah saya, dan ingin membuat ktp serta bpjs ny, bagaimana cara saya mendapatkan data ayah saya	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP El) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
71	03 Agustus 2023	Dimas Pandu Koesumawar dhana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Persyaratan Surat Keabsahan Akta Kelahiran	Saya kelahiran bontang, kaltim. namun saat ini ktp dan kk beralamat di kabupaten bandung. saya mau membuat surat keabsahan akta kelahiran di kelurahan jatiendah kecamatan cilengkrang kabupaten bandung, surat permohonan sudah saya buat sendiri. namun di dukcapil kabupaten bandung katanya harus ada surat rekomendasi dari tempat	Selesai	Yth. Pelapor, Pengesahan/legalisasi fotokopi akta kelahiran atau surat pengesahan akta kelahiran dilakukan di Dinas Dukcapil Kab/Kota domisili atau di desa/kelurahan yang sudah ada pelayanan Dukcapil berdasarkan permohonan dengan persyaratan kutipan akta kelahiran yang asli dan fotokopi KK. Apabila petugas Dinas Dukcapil meragukan keaslian kutipan akta

					lahir. apakah persyaratan tersebut benar atau mengikuti syarat 1. surat permohonan dari pemohon 2. asli akta kelahiran 3. foto copy ktp -el 4. foto copy kartu keluarga sudah cukup?		kelahiran tersebut, maka Dinas Dukcapil akan menghubungi Dinas Dukcapil yang menerbitkan akta kelahiran dimaksud untuk memastikan keabsahannya.
72	03 Agustus 2023	Moh Taufik Panigoro	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Seleksi Penerimaan Ipdn Tahun 2023	Mohon penjelasan tentang seleksi penerimaan ipdn dari provinsi gorontalo di seleksi tersebut anak saya an rayhan ahmad alghifari panigoro mendapat nilai yg baik di test terakhir .. yaitu di test samapta dan penampilan ... akumulasi nilai ranking 3 ... peserta seleksi untuk ipdn dari provinsi gorontalo sisa 8 peserta dan kuota untuk provinsi gorontalo 6 orang ... yang menjadi aduan kami mengapa anak saya yg mempunyai nilai yg baik di gugurkan ... mohon penjelasannya	Selesai	Dengan hormat disampaikan, bahwa atas nama Rayhan Ahmad Alghifari berada di ranking 7. Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 800.2.2-1030 Tahun 2023 tentang Pedoman SPCP IPDN Tahun 2023 Lampiran II tata cara perhitungan kelulusan akhir yaitu dengan pembobotan nilai, dengan rumus: nilai kelulusan akhir: $(\text{nilai SKD ybs}/550 \times 45) +$ $(\text{nilai psikologi ybs}/85 \times 35) +$ $(\text{nilai kesamaptaan ybs}/100 \times 20)$ Catatan: *ybs= yg bersangkutan *550= batas nilai tertinggi SKD *85= batas nilai tertinggi tes psikologi, integritas dan kejujuran *100= batas nilai tertinggi tes kesamaptaan
73	05 Agustus 2023	Moh Taufik Panigoro	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Syarat Administrasi Penerimaan Ipdn Tahun 2023 .. Mengenai Syarat 1 Tahun Berdomisili Di Tempat Pendaftaran	Sehubungan dengan adanya seleksi penerimaan calon praja ipdn tahun 2023 .. kami mengadukan salah satu peserta yg di nyatakan lulus terindikasi belum cukup 1 tahun berdomisili di provinsi gorontalo tempat ybs mendaftar sebagai calon praja ipdn .. untuk itu kami mengadukan untuk di lakukan peninjauan dan verifikasi terhadap hal tersebut adapun nama siswa yg terindikasi tersebut adalah muhammad ismail ar-rizqi tempat pendaftaran dari provinsi gorontalo.. demikian aduan ini kami	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

					sampaikan sebelumnya kami ucapkan banyak terimakasih		
74	05 Agustus 2023	Andi Feyza Alsyazani	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mutasi Asn	Nama : andi irwan nip : 19750110 200903 1 001 dengan ini menyatakan sangat kecewa dengan pelayanan mutasi asn pada direktorat otda kemendagri. sy mengusulkan pindah instansi sejak tgl 16 juni 2023, tetapi sampai saat ini tidak diproses, dimana status berkas approval surat usulan. lebih mengecewakan lagi krn tdk satupun aplikasi baik emutasi, simudah, my sapk maupun siasn yg menyediakan fitur tracking, walaupun ada itu hanya pajangan krn tdk bisa digunakan. ahir kata, sy mohon agar usulan pindah instansi yg sy ajukan segera diproses sesuai ketentuan. trima kasih	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait Mutasi PNS a.n Tri Yoga Wasana masih dalam proses Penerbitan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri, untuk selanjutnya agar tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Tujuan/Penerima dikarenakan setiap proses hanya dapat dicek melalui Badan Kepegawaian Daerah Tujuan/Penerima. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah.
75	15 Agustus 2023	Haris Affandi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Validasi Data Siswa	Nama ibu kandung tak sesuai dengan data dukcapil atas siswa dengan nik , npsn sekolah	Selesai	Mohon divalidasi data nama ibu kandung dari siswa dengan NIK karena terdeteksi tidak valid dukcapil. NPSN Sekolah
76	15 Agustus 2023	Herlan Fahmi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mengurus Surat Keterangan Pindah Yang Sudah Kadaluarsa	Ingin melaporkan bahwa saya pernah membuat surat keterangan pindah pada tahun 2020, namun karena lain suatu hal pada tahun tersebut saya tidak jadi pindah domisili. permasalahannya apabila saya ingin pindah domisili lagi di tahun ini, bagaimana cara mengurus surat keterangan pindah yang sudah kadaluarsa tersebut. terima kasih.	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Berkaitan dengan pertanyaan saudara, Silakan datang kembali ke Disdukcapil dengan membawa Kartu Keluarga untuk diterbitkan kembali Surat Keterangan Pindah yang baru. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan

							administrasi kependudukan dan Salam Laporan!
77	15 Agustus 2023	Abdul Malik	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Blangko Ktp Masih Kosong Di Kelurahan Jatinegara	Tolong blangko ktpnya pak/bu saya butuh ktp fisik	Selesai	Gimana tanggapannya ini pak/bu?
78	27 Agustus 2023	Ahmad Surya Irawan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Karang Taruna Tidak Memiliki Sedikitpun Anggaran	Assalamualaikum warahmatullah hi wabarakatuh, kepada yth kementerian dalam negeri di tempat. saya adalah salah satu pengurus baru karang taruna di desa suka damai kecamatan tebing tinggi, kabupaten tanjung jabung barat-jambi. pak/ibu menteri, karang taruna adalah organisasi sosial resmi yang di akui dan ada undang-undangnya secara negara. kami bekerja secara sosial dan secara sukarela, dalam bidang sosial maupun dalam bidang olahraga. pak/bu, karangtaruna adalah salah satu organisasi yang bernaung di bawah mendagri, kemensos, gubernur, bupati, camat, dan kepala desa, bolehkah kami sedikit mengeluh, kami organisasi sosial yang tidak punya sedikit pun dana untuk pembinaan ataupun untuk kegiatan apapun. kami semua-serua serba iyuran untuk uang kas bulanan dari anggota yang nilainya tidak seberapa, dari pembuatan seragam yang tadinya terdata 150 orang anggota, kami hanya sanggup 30 seragam karena uang kas kami tidak sebanyak dengan harga seragam per 1pcsnya 150ribu rupiah, setiap kegiatan sosial maupun olahraga kami harus mengemis2 ke warga untuk dapat sedikit bantuan. saya ingin	Selesai	Terima Kasih atas laporan yang disampaikan terkait Karang Taruna. Terkait dengan legalitas Karang Taruna, maka merujuk pada Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Dimana pembentukan LKD (dalam hal ini Karang Taruna) diatur dalam peraturan Desa dan kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Kedua hal tersebut merupakan legalitas yang perlu dimiliki oleh LKD. Selanjutnya penganggaran LKD (dalam hal ini Karang Taruna) dapat mengajukan program atau kegiatan melalui tahap-tahap perencanaan pembangunan Desa, yang selanjutnya dapat dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dapat memfasilitasi LKD (dalam hal ini Karang Taruna) sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

					<p>bertanya, apakah dari negara ada dana yang di peruntukan kepada organisasi karangtaruna yang remi di akui secara negara? jika ada kami harus melapor atau mengajukan kemana? karena saya sudah mencoba dm di sosial media kemensos pusat ataupun dinsos kabupaten tidak ada tanggapan. apakah ada aplikasi atau website pengajuan proposal seragam atau dana secara online atau tidak bisa online kami harus offline?</p> <p>kami sebagai organisasi sosial yang tidak memiliki sedikitpun dana kecuali dana kas, apakah bisa mengajukan seragam lengkap seperti topi, dasi, baju/jas?</p> <p>mungkin itu saja keluhan saya, terimakasih wassalam mualaikum warahmatullahi wabarakatuh</p>		
79	25 Agustus 2023	Adhitya Tri Wicaksono	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Konfirmasi Data Diri	<p>Saya sampaikan saudara ema chrisdiyanita</p> <p>memiliki 2 ktp yang masih aktif padahal yg bersangkutan sudah sah menjadi istri saya</p>	Selesai	<p>Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu.</p> <p>Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya</p>
80	25 Agustus 2023	Ahmad Yani	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	<p>ljin bertanya untuk pelaksanaan penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi (rad pg), masuk ke sub kegiatan yang mana?</p>	Selesai	<p>Yth. Pelapor,</p> <p>Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut pelaksanaan penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi (rad pg), masuk ke Sub Direktorat Pertanian dan Pangan pada Direktorat SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai penanggung</p>

							jawab atau bisa menghubungi u.p Sdr. Pusparini 081283284749 dan Eva Novianty 0818132811 Terimakasih
81	01 Septem ber 2023	Muhammad Mufti Haris	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Kartu Keluarga	Hari ini saya mendapati bahwa saya kembali ke kk lama, padahal rahun 2019 saya sudah pecah kk. dan hari ini pula saya sudah konfirmasi ke dukcapil kk lama dan secada online sudah terselesaikan. oleh karenanya saya mau cek apakah hal tersebut benar	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR!.Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,karena yang bisa melakukan verifikasi Barqode hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
82	17 Septem ber 2023	Ikhsanudin Saputro	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Sengkarut Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus	Sengkarut sayembara perangkat desamengikuti sengkarut pengisian perangkat desa di kodus gak bisa ambil sikap dan keputusan yang ksatria. jadwal yang seharusnya sudah definitif ditunda melalui keputusan bupati, salah satunya karena memperhatikan adanya surat dari seorang advokat. peserta sayembara diminta bersabar. ndoro bupati yang tidak lama lagi akan lengser ini kemudian menerbitkan lagi keputusan bupati yang memperpanjang penundaan, kali ini dengan memperhatikan adanya gugatan 45 panitia sayembara yang sedang "berkelahi" dengan eo yang ditunjuknya sendiri. peserta sayembara kembali diminta sabar. kata surat cinta yang absurd ini, pengangkatan dilakukan 7 hari setelah putusan perkara tayang di e-court.tibalah harinya putusan, juru adil	Selesai	1. Terima kasih atas laporan yang Saudara sampaikan. 2. Dasar hukum mengenai diaturan tentang Perangkat Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 s.d 50. 3. Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa diatur pada Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 66 bahwa Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa; c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan

					<p>memutus no (bukan nu yang temennya md ya), sebab kompetensi relatif yang dinilai salah.namun menurut informasi terpercaya surat tersebut dibuat ibu plt tanpa koordinasi dengan ndoro bupati, itulah mungkin sebabnya rencana pelantikan semakin jauh api dari panggang. jika terjadi demikian, apakah plt dinas permades akan tetap berpedoman pada kehendak yang aneh mengenai keharusan menunggu putusan mengenai pokok materi? lalu mmm, seandainya, pengadilan menolak atau tidak mengabulkan gugatan para penggugat, baik perseorangan maupun gabungan panitia sayembara. lalu kemudian ada orang iseng memasukkan lagi gugatan, apakah plt juga masih mau menunggu gugatan yang “serupa” dan bisa mencapai ratusan.</p>		<p>lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. 4. Selanjutnya Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Permendagri nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 5. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 154 bahwa camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa melalui fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 6. Kebijakan terkait dengan pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan kepala Desa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>
83	17 Septem ber 2023	Retna Nur Syamsiah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nik Anak Asuh Sama Dengan Nik Org Lain	<p>Sore pa/bu waktu masa2 vaksinasi covid 19 dosis 1 sedang booming tahun 2020-2021, saya bersama anak asuh saya akan vaksinasi di klinik afiati jl. k.h wahid hasyim kota bandung. saat hari h, bagian pendaftaran mengatakan bahwa nik anak asuh saya sudah terdaftar atas nama orang lain. sy pernah melapor juga pakai lapor.go.id, tapi susah nyari laporannya harus per nomer aduan, dan sy keburu lupa. tolong cek seseorang bernama syeila</p>	Selesai	<p>Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu.Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya</p>

					<p>meilani putri, krn nik nya sama dengan anak asuh saya, data tsb di bawah. anak asuh saya bernama sriyani nik: no. kk: kk diterbitkan proses pengajuan kk oleh saya langsung ibu asuh sriyani ke disdukcapil jl. ambon kota bandung ke bagian perbaikan data. bukankah nik itu hanya dimiliki oleh 1 orang warga negara? sy khawatir terjadi hal2 yg tdk diinginkan ke depannya. kenapa sy melakukan lapor? untuk menghemat ongkos, krn bolak balik ke disdukcapil bisa menghabiskan biaya rp 60.000 pakai ojol mohon dibantu yaaa</p>		
84	23 Septem ber 2023	Edo Gultom	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cetak Ktp Belum Selesai Hampir 3 Bulan	<p>Cetak ktp karena menikah, sudah hampir 3 bulan belum jadi di kelurahan cibubur ciracas jakarta timur. nik 1 : nik 2 : no kk : padahal ktp no 2 (istri) sudah dibolongi petugas, jadi istri saya tidak ada ktp lagi. nama lengkap : sesuai nik alamat : sesuai nik telp :</p>	Selesai	
85	21 Septem ber 2023	Muhammad Ibnu Fikri	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Konfirmasi Surat	<p>Konfirmasi surat yang di keluarkan oleh ipdn terkait acara yang di laksanakan di kpu ri tanggal 24 september 2023 bahwasanya setelah terkonfirmasi dari pihak kpu ri tidak terdapat acara drum band di kpu di di duga ada oknum pejabat yang</p>	Selesai	<p>Yth, Pelapor. Terkait laporan tersebut, pada dasarnya Drum Band IPDN (Gita Abadi Praja) siap untuk tampil mendukung di acara manapun selama tidak mengganggu jam perkuliahan dan agenda di lingkup Kementerian/lembaga (yang menjadi prioritas utama), tanggal 24</p>

					melakukan pembohongan publik melalui surat tersebut (terlampir)		September 2023, pada saat yang bersamaan terdapat permintaan tampil untuk mendukung acara KPU di Jakarta. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih.
86	21 Septem ber 2023	Muhammad Ibnu Fikri	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengaduan Terkait Oknum Pejabat	Pengaduan terkait pejabat ipdn (institut pemerintahan dalam negeri) dalam hal surat pombohonan publik	Selesai	Yth, Pelapor. Terkait laporan tersebut, pada dasarnya Drum Band IPDN (Gita Abadi Praja) siap untuk tampil mendukung di acara manapun selama tidak mengganggu jam perkuliahan dan agenda di lingkup Kementerian/lembaga (yang menjadi prioritas utama), tanggal 24 September 2023, pada saat yang bersamaan terdapat permintaan tampil untuk mendukung acara KPU di Jakarta. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih.
87	23 Septem ber 2023	Ian Nurfhani	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Saya Daftar Prakerja. Nama Saya Tidak Sesuai Dengan Data Ktp Yang Tersimpan Di Dukcapil.	Mohon verifikasikan/aktifkan ktp saya .	Selesai	Terima kasih atas laporannya, terkait dengan hal tersebut sudah kami tindak lanjuti dan nik ybs sudah terupdate di data dukcapil.
88	27 Septem ber 2023	Firman Agung Sulistyio	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Data Nik Ktp Tidak Sesuai	Selamat pagi pak/ibu , saya ingin melaporkan kejadian ketika saya ingin mendaftar bpjs ketenagakerjaan nik saya tidak bisa digunakan karena tidak sesuai , mohon di segera di tindak lanjuti , terimakasih	Selesai	Selamat malam pak/ibu yth . saya ingin menyampaikan perihal data nik ktp tidak sesuai saat saya ingin mendaftarkan bpjs ketenagakerjaan di aplikasi grab driver saya mohon di tindaklanjuti . Terimakasih
89	25 Septem ber 2023	Ulfi Agustina	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pembuatan Kk Baru Dan Ktp Baru Yang Tidak Diproses Sudah 1 Bulan Oleh Kelurahan Pabuaran	Pengajuan berkas kk dri awal september sudh sampai di kelurahan, dan sampai akhir bulan september ini msh blm ada progres (data mash mentah) (dalih pelayanan tidak berjalan krna sedang ada pergantian jabatan). mohon kiranya pelayanan masyarakat bisa saling bekerja sma dgn kami yg pekerja lepas juga.	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

					karena urus berkas sana sini perlu izin dri tempat kerja. mohon tindak lanjutnya pak/bu .		kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagiajangan lupa bintangnya
90	25 Septem ber 2023	Aries Handoko	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permohonan Informasi Mengenai Sla (Service Level Agreement)	Kami ingin menanyakan informasi mengenai permohonan kerjasama (pks) kami dibidang pelayanan e-kyc pemanfaatan data kependudukan. dimana kami perusahaan ingin menanyakan mengenai pemeriksaan berkas dokumen yang sudah kami lengkapi dan berikan namun sampai saat ini belum mendapatkan respon apapun dari pihak adminduk. setelah kami menanyakan kepada petugas ybs selalu saja mendapatkan jawaban masih dalam pemeriksaan. mengingat bahwa pemeriksaan dokumen tersebut telah berjalan 3 minggu. padahal dokumen kami tersebut juga berasal kebanyakan dari sistem oss.go.id. yang ingin kami tanyakan adalah berapa lama pemeriksaan berkas dokumen tersebut dapat terselesaikan? apakah tidak ada sla (service level agreement) yang harus dipenuhi? mohon informasinya. terima kasih	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut masih menunggu kajian terkait dengan permohonan kerja sama yang diajukan. terima kasih
91	20 Oktober 2023	Pipit Martin	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Penerbitan Ulang Akte Hilang Beda Kabupaten	Akte hilang asal capil kota semarang, untuk diterbitkan ulang di purwokerto mohon informasi syarat untuk proses penerbitan akte hilang dalam provinsi beda kabupaten/kota, apakah harus mendapatkan surat keterangan keabsahan dari capil penerbit asal? kalau harus ada surat keabsahan dari capil tersebut berarti saya tetap harus ke capil asal hanya untuk kemudian mengurus akte hilang ke capil domisili	Selesai	Penerbitan akta pencatatan sipil yang hilang dilaksanakan di tempat penduduk berdomisili sesuai KK, dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian dan fotokopi akta untuk memundahkan pencarian register/arsip akta tsb. Konfirmasi keabsah akta tersebut dilakukan oleh Dinas Dukcapil tempat domisili kepada Dinas Dukcapil yang menerbitkan akta dimaksud.

					saat ini??? kalau memang harus kembali ke capil asal kan sekalian urus di capil asal,berarti sama saja tidak dapat urus akte hilang di domisili sekarang...		
92	18 Oktober 2023	Zainul Arifin	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mohon Penjelasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. bolehkah melaksanakan pilkades paw melalui musdes di tahun 2023 2. apa rujukan hukumnya jika pj kepala desa lebih dari 6 bulan atau bahkan hingga 20 bulan 3. bagaimana jika bpd habis masa jabatan di 2023 / dalam masa pemilu 	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan terkait pilkades paw melalui musdes di tahun 2023, berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 Hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan kepala desa maupun pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) sebelum tanggal 1 November 2023. (surat terlampir) 2. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa atau melaksanakan tugas sampai ditetapkan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak artinya Undang-Undang, PP, Permendagri tidak mengatur masa jabatan penjabat kepala desa hal ini menjadi kewenangan Bupati/Walikota berdasarkan hasil evaluasi kinerja Penjabat kepala desa. 3. Terkait BPD yang habis masa jabatannya pada masa pemilu tahun 2023, berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.3.2.7/1491/BPD tanggal 31 Maret 2023 hal Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Anggota BPD Pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pada angka 4 bahwa Bupati/Walikota yang akan menyelenggarakan pengisian dan peresmian anggota BPD pada masa pemilu dan pilkada tahun 2024 untuk tetap dilaksanakan dengan

							berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (surat terlampir)
93	16 Oktober 2023	Hendrawan Widodo	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Koreksi Data Kependudukan Dengan Bpjs Ketenagakerjaan	Selamat siang pak bu, mohon maaf izin bertanya. saya mau mencairkan bpjs ketenagakerjaan tapi data saya tidak ditemukan keterangannya; nama dan tanggal lahir tidak sesuai dengan data kependudukan. itu kenapa ya pak bu? mohon bantuannya terimakasih	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut mohon melampirkan NO KK dan NIK
94	26 Oktober 2023	Putri Kurniasih	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Status Dokumen Kk Tidak Aktif	Saya memperbaharui kk lama menjadi kk berbarcode, tapi ketika saya chek barcode nya kk saya tidak aktif. apakah saya bisa mengaktifkan status dokumen di kk saya melalui online?, mohon solusi nya	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melakukan pengajuan ulang melalui aplikasi online Identitas Kependudukan Digital dengan menu pelayanan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
95	24 Oktober 2023	Puji DwiNurhidayat	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Tidak Bisa Memuat Dokumen Di Aplikasi Ikd	Sudah melakukan uninstal aplikasi dan instal aplikasi kembali, sudah hapus cache aplikasi, sudah pake koneksi internet wifi dan data namun hasilnya tetap sama tidak bisa memuat data dokumen	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melakukan pengajuan dokumen ulang bisa melalui menu pelayanan Identitas Kependudukan Digital atau datang ke Dinas Dukcapil sesuai domisili. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
96	24 Oktober 2023	Surli 89	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Aktivasi Ktp Digital	Selamat siang admin lapor, saya sudah mengajukan aktivasi identitas kependudukan digital di kecamatan, sudah 2 minggu tapi belum di kasih barcode, mohon kiranya dapat di bantu dan berikut saya lampirkan dokumen nya..trimsh	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi petugas dukcapil yang ada di Kecamatan atau dinas dukcapil untuk memvalidasi atau scan qr codenya Identitas Kependudukan Digitalnya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. jangan lupa bintangnya

97	22 Oktober 2023	Agus Muntari	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permintaan Pdf Kartu Keluarga	Kartu keluarga saya hilang tolong kirimkan dalam bentuk pdf no kartu keluarga 3329152402075036 tolong kirim kepada email agusmuntari080@gmail.com	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat, karena yang bisa melakukan verifikasi Barqode hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih
98	30 Oktober 2023	Ida Bagus Putu Beamantara	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Daftar Di Aplikasi Identitas Kependudukan Digital	Aplikasinya ribet, kenapa ya kode qr dari petugas tidak bisa diberikan oleh by email atau foto dari ortu yg ada di daerah, karena saya merantau. jadi saya tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi di aplikasi	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi dinas dukcapil di tempat tinggal sekarang untuk mendapatkan qr Identitas Kependudukan Digital karena bisa di mana saja untuk registrasi Identitas Kependudukan Digital. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. jangan lupa bintangnya
99	30 Oktober 2023	Hikmanindia Rahma	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permohonan Pembuatan Ktp Baru	Saya telah kehilangan dompet saya kemarin, dan ingin membuat ktp baru	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Dipersilakan bagi Ibu Hikmanindia Rahma untuk penerbitan dokumen kependudukan untuk memantau infografis pada media sosial milik Disdukcapil setempat untuk pelayanan online, atau dipersilakan dengan mengunjungi Disdukcapil secara langsung, petugas akan melayani dalam hal penerbitan dokumen kependudukan dimaksud. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
100	27 Oktober 2023	Sri Risky I Pombala	Permintaan Informasi	Cek Nama Dan No Kk	Kepada yth bapak/ibu saya ingin mengetahui nama dan no kk nik	Selesai	Berdasarkan informasi NIK yang telah disampaikan dan setelah dilakukan pengecekan ke sistem kami bahwa, NIK - SRI RISKY J. POMBALA

							KK sudah terdaftar pada sistem Dukcapil dan Layanan Online yang terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Demikian dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
101	01 November 2023	Friskilia Gabriela Pandean	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Gaji Asn Belum Terbayar	Selamat pagi, saya asn dinas kesehatan kabupaten kepulauan talaud, ingin bertanya kepada kemendagri, apakah wajar gaji asn bulan oktober kami belum terbayarkan?	Selesai	Yth. Bpk/Ibu pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut dapat dikordinasikan lebih lanjut dengan SKPD nya. Sehubungan belum direalisasikannya gaji dan tunjangan, karena yang merealisasikan gaji dan tunjangan menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Telepon: 0213501161
102	11 November 2023	Siswanto	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Minta Kode Qr Untuk Pembuatan Ktp Digital	Saya mau mendaftar aplikasi ikd, tapi harus scan kode qr. untuk itu saya mohon untuk dikirimkan kode qrnya, terima kasih.	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, bisa datang ke petugas Dukcapil setempat baik yang ada di kecamatan atau Dinas untuk mendapatkan QR codenya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
103	10 November 2023	Pradiptha Himawan Putra, S.H.,M.H	Aspirasi	Kesejahteraan Status Sosial (Pakian Dinas Harian) Pns & Pppk Pasca Di Sahkan Uu Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Asn	izin jenderal, menyampaikan aspirasi kami dari kawan-kawan asn pppk di daerah terkait seragam pakaian dinas harian (pdh) berdasarkan aturan permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang pakian dinas asn di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. di dalam klausul draft aturan tersebut adanya perbedaan pakian dinas harian (pdh) antara pns dan pppk sehingga dalam	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait hal ini agar Pemerintah Daerah dapat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah

					<p>praktik di lapangan khusus pppk guru maupun teknis terdapat kesenjangan sosial di mata masyarakat.</p> <p>jadi izin jenderal, sekiranya agar tidak terjadinya diskriminasi status sosial antara pns dan p3k , dan pelayanan public ke masyarakat tetap berjalan dengan baik agar sekiranya dengan kebijaksanaannya dapat mempertimbangan atau merevisi (perubahan) permendagri nomor 11 tahun 2020 supaya pakian pdh antara pns dan p3k disamakan melihat implementasi pelaksanaan disahkan uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn yang tidak ada perbedaan signifikan antara pns dan pppk karena keduanya merupakan satu wadah aparatur sipil negara (asn)demikian aspirasi yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksananya kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum wr wb</p>		
104	10 November 2023	Bagus Dwi Utama	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Alamat Ktp Dan Kk Tidak Sesuai (Tiba Tiba Berubah)	<p>Saya bagus dwi utama.saya coba mendaftar oss dan coba juga mencairkan bpjs tk tidak bisa. berhenti di pengkinian data. setelah saya coba konfirmasi ke call center 1500537 dukcapil saya mendapati bahwa alamat saya berbeda antara di kk dan ktp. saya juga sudah coba konfirmasi ke dukcapil domisili ktp. dan belum mendapat jawaban hingga sekarang.</p> <p>no nik: no kk: kelurahan: kecamatan:</p>	Selesai	<p>Berdasarkan informasi NIK yang telah disampaikan dan setelah dilakukan pengecekan ke sistem kami bahwa, NIK - SRI RISKY J. POMBALA KK sudah terdaftar pada sistem Dukcapil dan Layanan Online yang terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Demikian dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.</p>

105	10 Novemb er 2023	Ikraman Aman	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengurusan Pindah Dalam Satu Kecamatan	Kenapa pengurusan pindah masih dalam satu kecamatan saja susah prosesnya, harus minta pengantar dari desa awal dan desa pindah, sudah ke kecamatan harus balik lagi ke desa asal, udah seminggu bolak balik belum selesai, harusnya dalam satu kecamatan itu persyaratanya dipermudah, kalau dipersulit ini kita sebagai warga juga malas untuk mengurusnya, saya sudah menempati alamat baru lebih dari 5 tahun karena proses di kabupaten tangerang berbelit" saya akuin malas untuk mengurusnya, tapi karna suatu hal mau tidak mau harus mengurusnya tetapi ya begini dipersulit harus mondar mandir bolak balik ke kecamatan, suruh urus ke desa asal, dan kedesa tujuan, mohon pelayanan di permudah jangan di persulit	Selesai	Buat Ngurus Pindah dalam satu kecamatan saja susah disuruh bolak balik ke RT, RW , rt Asal, RT yang di tuju dari tgl 30 Oktober hingga sekarang belum beres, giliran jadi SKPWNInya alamat tujuan kurang lengkap, minta di rubah dipersulit juga gimana pelayanan di Kabupaten Tangerang,, beda jauh dibanding kota Tangerang, dan Tangerang selatan, dri dulu sampai sekarang sama saja, pantesan banyak yang sudah menetap puluhan tahun di Kabupaten Tangerang KTP masih kota tangerang, ternyata memang di Kabupaten Tangerang di persulit dan ribet proses dan pelayananya.
106	15 Desemb er 2023	Suryo Trunosudjono	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Penerimaan Pppk 2023	Saya mau tanya apakah afirmasi untuk jabatan fungsional analis kebakaran yang tidak terdaftar di kemendagri tetap mendapatkan afirmasi? karena setau saya afirmasi serrifikat yang diakui hanya terdaftar di si damkar demikian saya sampaikan terima kasih	Selesai	Berikut terlampir nama yang mendapatkan afirmasi dan saya peringkat kedua secara nilai teknis saya lebih unggulTerima Kasih
107	27 Novemb er 2023	Yashinta Wijaya	Permintaan Informasi	Bagaimana Cara Tau Nomor Kk Yang Hilang	Selamat malam bagaimana cara agar tahu nomor kk yang sudah hilang dikarenakan ingin mendaftar npwp	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,, Karena yang bisa melakukan perbaikan elemen data itu hanya dinas dukcapil sesuai

							alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
108	27 Novemb er 2023	Andi Basri 07	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cara Mendapatkan Kode Qr Verifikasi Aplikasi Ktp Digital	Saya ingin meng akses aplikasi ktp digital , saya sudah melalukan perekaman dan mendapat ktp tapi belum dapat kode qr buat verifikasi di aplikasi	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,karena yang bisa melakukan verifikasi Barqode hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih
109	29 Novemb er 2023	Frans Dalimunte	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kenapa Pns Dinas Pendapatan Daerah Provsu Dan Pemko Medan Masih Dapat Insentif Dan Tpp Sekaligus?	saya ingin melaporkan bentuk diskriminasi dan kesewenang-wenangan kepala daerah dalam mengelola apbd terutama dalam hal belanja pegawai dimana dinas pendapatan daerah pemprov sumut dan dinas pendapatan daerah pemko medan mendapatkan penghasilan diluar gaji berupa tpp dan insentif, padahal insentif dan tpp itu diberikan krn dasarnya sama2 kinerja sehingga seharusnya memilih salah satu dan hal ini memunculkan diskriminasi, sebagai contoh insentif pns dispenda provsu utk jbtn staf kelas 7 bisa mencapai 15 s.d 21 juta per 3 bln nya tergantung pencapaian target pajak dan retribusi, begitu juga dgn pns dispenda pemko medan dgn jbtn staf kls 7 bisa mendapatkan insentif 20 s.d 24 juta per tiga bln nya sehingga hal tsb menimbulkan diskriminasi dan kecemburuan dari opd lainnya, sehubungan dengan itu saya meminta bapak untuk menerbitkan aturan	Selesai	th. Bpk/Ibu Anonim Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi pengaduan yang disampaikan.Terkait hal diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Perlu diketahui dan digaris bawahi bahwa kebijakan pemberian TPP ASN adalah bersifat tidak wajib/boleh diberikan atau tidak diberikan sebagaimana maksud Pasal 58 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 2. Terkait insentif pajak, peraturannya masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Insentif Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Insentif pajak diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi apabila mencapai kinerja

					<p>melarang pns mendapatkan tpp bila sudah mendapatkan insentif serta mengatur besaran insentif yg hrs didapatkan agar apbd tidak seenak perutnya digunakan kepala daerah hanya utk keperluan belanja pegawai berupa insentif maupun tpp, sementara belanja modal yg berupa belanja infrastruktur justru terabaikan shg pembangunan fisik di daerah byk tdk terlaksana krn ada kab/kota 70 persen apbd ny hrs hny utk belanja pegawai. demikianlah pengaduan ini saya sampaikan agar ditindaklanjuti oleh bapak, trm ksh</p>		<p>tertentu, diberikan setiap triwulan dan apabila tidak mencapai kinerja tertentu maka tidak diberikan.</p> <p>3. Jadi kedua hal tersebut adalah berbeda satu dengan lainnya dan masing-masing berdiri sendiri. Dimana TPP diberikan kepada ASN sesuai hak nya dan sifatnya tidak wajib sedangkan insentif pajak retribusi diberikan kepada ASN yang bekerja pada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang apabila kinerjanya mencapai target maka diberikan insentif. Selanjutnya insentif tersebut menjadi bagian dalam pemberian TPP kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalm Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p>4. Namun demikian, kami berterima kasih atas masukan dan saran yang saudara berikan.</p> <p>Demikian kami sampaikan, terima kasih. Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Telepon: 0213501161</p>
110	29 November 2023	Agus Tri Haryanto	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pelayanan Kependudukan	Mohon untuk ditindaklanjuti pelayanan kependudukan via online melalui aplikasi kemendagri tidak dilayani	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,, Karena yang bisa melakukan perbaikan elemen data itu hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK...</p>

							Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
111	07 Desember 2023	Report Aduan Konten	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permintaan Penghapusan Konten Negatif	Kepada yth.pengelola kemendagri.go.id,berdasarkan hasil temuan patroli siber tim aduan konten kementerian komunikasi dan informatika ri, dapat kami informasikan kepada pengelola situs kemendagri.go.id bahwa ditemukan laman yang mengandung konten perjudian pada domain kemendagri.go.id sebagaimana yang terdapat pada tautan berikut: https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/captcha/ oleh karena itu, mohon kiranya agar pengelola situs kemendagri.go.id dapat melakukan penghapusan sisipan laman yang mengandung konten perjudian pada tautan tersebut diatas.demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.salam,direktorat jenderal aplikasi informatikakementerian komunikasi dan informatika ri	Selesai	Terima kasih atas informasi yang sudah saudara diberikan terkait konten negatif yang terdapat tautan https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/captcha/ seperti yg saudara sampaikan. per tanggal 24 November 2023 tim ditjen bina adwil telah melakukan koordinasi dan penghapusan konten yang dimaksud, dan per hari ini tautan tersebut sudah tidak dapat dibuka/akses Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
112	05 Desember 2023	Marlina	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Perubahan Kk Status Kawin Menjadi Belum Kawin	Kpd yth bapak kementrian.. saya kan mau rubah status di kk kawin menjadi belum kawin.. saya udh ngerjain lewat online tp blm direspon2 pak.. kan ini kesalahan dri dukcapil maslaah data.. sedangkan di ktp saya belum kawin pak.. mohon bantuannya pak saya butuh kk nya segera	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,, Karena yang bisa melakukan perbaikan elemen data itu hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

	05 Desember 2023	Oktavia Lestari	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Informasi Seputar Nomor Nik	Nomor nik di kk dan ktp milik saya, tidak sesuai dengan tanggal dan tahun lahir saya. apakah bisa dilakukan perubahan nomor nik ?	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP El) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
113	05 Desember 2023	Andri Abdillah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Biodata Ktp	Salam hormat, saya andri abdillah dengan nik mengalami kendala saat mendafta di website ahu online saat mendaftakan perseroan perorangan. di web tersebut saat submit data tertulis keterangan "alamat tidak sesuai dengan data pada dukcapil. silakan periksa kembali data anda padahal yang saya ketikkan sudah benar. dengan beberapa percobaan seperti penulisan dengan huruf kapital, huruf kecil, dan penempatan tanda baca. namun tetap tidak bisa. dengan itu saya meminta data ktp yang benar sesuai dengan data dukcapil. terima kasih	Selesai	Terima kasih atas laporan anda, setelah kami Nik dan datanya nya sudah sesuai dengan data di dukcapil
114	21 Desember 2023	Menik Dwi Suprpti	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Informasi Akta Kelahiran	Saya ingin meminta informasi akta kelahiran saya atas nama menik dwi suprpti	Selesai	Untuk mendapat informasi terkait akta kelahiran maka diminta kepada Saudara untuk menghubungi langsung Dinas Dukcapil yang menerbitkan akta kelahiran tersebut atau ke Dinas Dukcapil sesuai alamat domisilinya. Terima kasih atas perhatiannya.
115	07 Desember 2023	Siti Fatimah	Permintaan Informasi	Surat Pindah	Apakah mengurus surat oindah bisa lewat online	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!

							<p>Berkaitan dengan pertanyaan saudara, kebijakan layanan secara online diberikan kepada masing-masing Dinas DUkcapil daerah. Maka dari itu terkait kepastian layanan adminduk termasuk layanan surat pindah di domisili saudara dapat dikonfirmasi ke Dinas DUkcapil setempat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapo!</p>
116	19 Desember 2023	Whistleblower20	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Kinerja Pj. Gub Yang Tidak Membantu	<p>Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhmohon bantuannya untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pj. gubernur sulawesi selatan yang sangat meresahkan bagi para asn di lingkup pemerintah provinsi sulawesi selatan. tunjangan kinerja kami belum juga dibayarkan, padahal seharusnya telah dibayar sejak tanggal 15 tiap bulannya. bahkan ada kabar bahwa tunjangan kami akan menyeberang tahun ke tahun 2024 (itu pun jika dianggarkanselain itu, sejumlah kebijakan pj. gubernur sangat meresahkan, bukan hanya asn tapi juga masyarakat sulsel. dimulai dari pernyataan bahwa pemprov sulsel mengalami kebangkrutan, namun kemudia pj. gub mengadakan mobil dinas baru, bahkan santer kabar bahwa untuk perjalanan dinas pj. gub di tahun 2024 saja sudah dianggarkan hingga 2 milyar rupiah. hal tersebut sungguh sangat miris mengingat pj.</p>	Proses	<p>Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami ttindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!</p>

					<p>gub diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada namun hanya menambah makin banyak masalah. hal lain yang juga santer di kalangan para asn adalah terkait penghilangan tambahan tukin bagi beberapa opd pelayanan publik yang mendapat rekomendasi dari kpk untuk memperoleh tambahan tukin sebesar 2 juta rupiah. pj. gub mengatakan akan menaikkan tukin, namun sayangnya jika tambahan tersebut dihilangkan, maka otomatis beberapa opd pelayanan publik yang memperoleh rekomendasi kpk tersebut justru akan mengalami penurunan drastis. hal seperti ini entah mengapa tidak dipikirkan oleh pj. gub yang terus sibuk mengurus program pisang dan cabenya. mohon bantuannya untuk dapat mengevaluasi kinerja pj. gub sulawesi selatan yang kian hari kian meresahkan. saya tahu tidak ada jabatannya yang gratis, namun mohon kiranya tidak mengganggu apa yang menjadi hak pegawai yang telah bekerjakeras agar roda pemerintahan dapat terus berjalan. provinsi sulawesi selatan bukan lumbung pisang dan cabe, jika ingin mendapatkan fee dari pengusaha eksportir pisang, tolong pindahkan saja pak pj. gub ke provinsi yang dapat memenuhi target pribadinya tersebut.</p>		
117	29 Desember 2023	Albi Rahman	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pembuatan lkd	# 6371021109910007 # albi rahman	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami

					# 6371021007180008 # 082252111931 # banjarmasin # ingin membuat ikd		tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR! Mohon untuk memberikan dokumen tambahan terkait pengaduan tersebut. terima kasih
118	29 Desember 2023	Martua Halomoan Pulungan	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Dugaan Pemberhentian Aparatur Desa Sepihak Oleh Kepala Desa	Kepada yth. menteri dalam negeri republik indonesia. di duga akan terjadi pemberhentian aparatur desa sepihak oleh kepala desa. hal tersebut terjadi karna yang bersangkutan telah melaksanakan penjaringan aparatur desa sebrlum ada kekosongan jabatan. dan jelas sekali proses tersebut mengkangkangi peraturan menteri dalam negeri tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. demikian laporan saya semoga bapak menteri dalam negeri republik indonesia dapat menanggapi.	Selesai	Kami berharap kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sangsi kepada Kepala Desa yang salah dalam menjalankan wewenangnya.
119	27 Desember 2023	Fajar A Nawir	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Aktivasi Akun Penduduk Non Permanen Di Website	Selamat siang maaf sebelumnya ini saya buat akun di link penduduk non permanen sejak tanggal 8 desember dengan kota asal kota jayapura dan domisili sekarang di kota makassar. hingga tanggal 27 ini masih belum di aktivasi akunnya jadi mohon untuk di tinjau. saya sudah hubungi dukcapil asal belum ada respon, saya hubungi dukcapil domisili katanya yang aktivasi dukcapil asal jadi mohon bantuannya di teruskan ke dukcapil kota jayapura untuk melakukan aktivasi akun, karena saya ingin membuat surat domisili yg mana peruntukannya untuk pembuatan skck sebagai syarat mendaftar pekerjaan.	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

120	27 Desember 2023	Aguslin	Aspirasi	Pelayanan Kurang Baik	Assalaamu alaikum wr.wb, kami meminta dukcapil kab. sigi, sulawesi tengah, untuk mengeluarkan surat keterangan kepemilikan nik untuk dilampirkan pada pelaporan ojk online namun dukcapil kab. sigi tidak mau mengeluarkan surat keterangan tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut.	Selesai	Yth. Pelapor, Terimakasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!
2024							
121	02 Januari 2024	Frida Tiara R	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Dugaan Penyalahgunaan Anggaran	Saya selaku pegawai pppk nakes provinsi maluku dg spmt 1 agustus 2023 melaporkan bahwa gaji pokok 2 selama bulan belum dibayarkan. gaji pokok bulan oktober, november, dan desember telah dibayarkan di bulan desember (1/12/23 cash, 8/12/23 transfer, 14/12/23 transfer) sebagaimana dilampirkan. sedangkan gaji bulan agustus dan september 2023 belum dibayarkan hingga sekarang (2/1/24). mohon untuk ditanggapi	Selesai	Yth.Bapak/Ibu Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi/pengaduan yang disampaikan. Terkait hal diatas dapat kami sampaikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan Perubahan APBD tidak tepat waktu, yaitu setelah 3 bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan. Sehingga sesuai regulasi Perubahan APBD dimaksud tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut. Namun Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan surat kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara utk dapat melaksanakan pergeseran anggaran bagi alokasi anggaran yg dianggap merupakan kriteria wajib mendesak, salah satunya adalah pembayaran gaji bagi nakes yang harus dibayar karena bagian dari hak pegawai dan merupakan wajib mengikat. Kesimpulan, walaupun Perubahan APBD tidak dilakukan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib menganggarkan dan membayarkan kewajiban yg dianggap prioritas dan wajib mengikat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah

							Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Telepon: 0213501161
122	02 Januari 2024	Awee Zainuri	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Gaji Pppk Tidak Cair	Selamat pagi saya pegawai pppk provinsi maluku, saya mendapatkan sk dan mulai kerja sejak agustus 2023 namun gaji saya bulan agustus dan september 2023 tidak kunjung cair sampai hari ini (02 januari 2024). yang saya khawatirkan tahun anggaran sudah baru namun gaji tahun lalu belum cair, menjadikan gaji saya hilang. terdapat pelanggaran hak pejerja akibat hal ini.	Selesai	Yth. Bpk/Ibu Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi/pengaduan yang disampaikan. Terkait hal diatas dapat kami sampaikan, Provinsi Maluku tidak menyampaikan Perubahan APBD TA 2023, namun dapat dilakukan penganggaran utk gaji dan tunjangan sesuai Pasal 68 dan Pasal 69 PP 12 Tahun 2019. Gaji untuk Tahun Anggaran 2023, selama data Provinsi Maluku valid dan telah dialokasikan dalam APBD silahkan untuk dibayarkan. Untuk Tahun Anggaran 2024, evaluasi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang APBD Provinsi Maluku sudah selesai. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Telepon: 0213501161
123	02 Januari 2024	Martua Halomoan Pulungan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Dugaan Terjadinya Pemberhentian Perangkat Desa Sepihak Oleh Kepala Desa	Setelah selesainya tahapan pilkades serentak di kabupaten mandailing natal provinsi sumatera utara. di duga kepala desa tombang bustak kecamatan kotanopan kabupaten mandailing natal provinsi sumatera utara akan memnerhentikan perangkat desa secara sepihak. hal tersebut terjadi karna yang bersangkutan telah menyebarkan pengumuman perekrutan perangkat desa yang jelas akan menyalahi mekanisme dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. kami	Selesai	1. Terima kasih atas laporan yang Saudara sampaikan. 2. sebagaimana Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.3.3.1/0220/BPD tanggal 16 Januari 2023 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ Wali Kota Seluruh Indonesia (sebagaimana terlampir). 3. Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala Desa wajib menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini

					<p>sangat berharap kepada bapak menteri dalam negeri untuk dapat segera menindak lanjuti hal ini.</p>		<p>ketentuan pemberhentian perangkat Desa</p> <p>4. Berdasarkan Pasal 115 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten meliputi melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa serta melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.</p> <p>5. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 154 bahwa camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa melalui fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa.</p> <p>6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal Pembinaan dan Pengawasan secara berjenjang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sampai kepada camat. Selanjutnya Saudara dapat bersurat/melaporkan kepada Bupati melalui Camat terkait dugaan terjadinya pemberhentian perangkat Desa sepihak oleh Kepala Desa</p> <p>6. Demikian disampaikan dan terima kasih.</p>
124	16 Januari 2024	HZR 05	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Polemik Pergantian Pj Bupati Mamasa	<p>Salam sehat dan bahagia, izin melaporkan, sebagai masyarakat tentunya dibutuhkan lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktivitas. namun berbanding terbalik yang terjadi di daerah saya kab. mamasa, Sulawesi Barat, selama seminggu ini ramai masyarakat melakukan</p>	Selesai	<p>Yth. Bapak/Ibu terkait permasalahan yang telah disampaikan melalui website Lapor.go.id, dimohon agar dapat bersurat secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk dapat kami teruskan dan tindak lanjut sesuai perundang-undangan.</p>

					penolakan terhadap dr.muh zein, s.ag, sebagai penjabat bupati kab. mamasa. hal ini di tandai dengan turunnya masyarakat, tokoh adat dalam melakukan penolakan tersebut. demikian laporan saya, mohon di tindaklanjuti. hormat saya,		Demikian kami sampaikan atas perhatiannya terima kasih.
125	29 Januari 2024	Masharul Sa'adhi S	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ktp Saya Belum Aktif	Pak ini bagai mana pak/bu saya butuhkan sekali ktp saya cuman ktp saya belum aktif saya sudah melapor ke capil cuman tidak di gubris cuman bilang iya aja tapi belum aktif sampe sekarang bagai mana itu pak tolong bantuannya pak	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
126	28 Januari 2024	Ari Afandi Hia	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Data Nik Ktp	Mhon dibantu cek kan data nik anak saya nik no kk	Selesai	Berdasarkan informasi NIK yang telah disampaikan dan setelah dilakukan pengecekan ke sistem kami bahwa, NIK : Nama : ARTIKYA QAUDIRA HIA KK : Sudah terdaftar pada sistem Dukcapil dan Layanan Online yang terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Demikian dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
127	28 Januari 2024	Ramadiansyah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nomor Induk Kartu Keluarga	Saya ingin tahu nomor induk kartu keluarga saya untuk keperluan pembuatan npwp	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu.

							Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
128	29 Januari 2024	Yopi H	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pasar Baru Cikarang	Selamat siang bapak/ibudengan ini saya menyampaikan laporanterdapat pembangunan pasar baru di cikarang, berdasarkan instruksi presiden pembangunan pasar tersebut agar cepat diselesaikan, akan tetapi saya mengindikasi pt sanjaya selaku tender pembangunan pasar baru menyuap ke pemda cikarang sebesar 1 miliar rupiah. selain itu, terindikasi pasar lama dibakar demi tercapainya proyek pasar tersebut. oleh karena itu, saya ingin pemda cikarang agar menyelesaikan kasus pasar yang terbakar dan agar pemdanya diperiksa sehingga pembangunan pasar bisa berjalan dengan lancar serta tolong diadakan monitoring dan evaluasi proyek pasar baru di cikarang.	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!
129	29 Januari 2024	R Soeko Yanuarto	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Tidak Bisa Login Siola	Kepada ythpimpinan kementerian dalam negeri di tempatbersama ini saya laporkan bahwa saya tidak bisa masuk login siola dengan password saya an r. soeko yanuarto tw. mohon petunjuk nya dan mohon bantuannya.atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.	Selesai	Selamat pagi. Untuk akun atas nama R. SOEKO YANUARTO TW password sudah kami reset ke Silahkan login dengan NIK dan password tersebut. Terima kasih. Salam,Biro Organisasi dan Tatalaksana
130	29 Januari 2024	Indrayasaro	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Verivikasi Akun Pendaftaran Penduduk Non Permanen	Selamat sore min, maaf sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai verifikasi akun pendaftaran penduduk non permanen saya. ini lagi ada kendala atau bagaimana ya min karena sudah 2 minggu belum terverifikasi hingga saat ini. mohon bantuannya min.oh iya sebelumnya saya merupakan penduduk kab. polewali mandar, provinsi sulawesi	Selesai	Selamat siang bapak/ibu, ini bagaimana ya tindak lanjutnya sampai sekarang belum selesai sudah setengah bulan? Mohon dibantu bapak/ibu

					barat mau mendaftarkan diri saya menjadi penduduk non permanen di kota makassar, provinsi sulawesi selatan.terima kasih		
131	01 Februari 2024	muhammad ilham	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Proses Pecah Kk Melalui Aplikasi lkd Lama	Mohon bantuan nya untuk di teruskan laporkan kami ke pihak https://dukcapil.kemendagri.go.id/ nik nama : muhammad ilham no kk : hp : kota makassar	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,karena yang bisa melakukan verifikasi Barqode hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih
132	01 Februari 2024	St Fatimah Hamid	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Verifikasi Penduduk Non Permanen	Selamat pagiyth. admin pengaduanehubungan keperluan pada aplikasi penduduk non permanen, akun saya masih belum di verifikasi sudah lebih 1x24 jam, mohon bantuannyaakun st.fatimahhamidhealth@gmail.comatas perhatian nya saya ucapkan terima kasih	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas Dukcapil setempat,, Karena yang bisa melakukan perbaikan elemen data itu hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
133	01 Februari 2024	St Fatimah Hamid	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Verifikasi Penduduk Non Permanen	Selamat pagiyth. admin pengaduanehubungan keperluan pada aplikasi penduduk non permanen, akun saya masih belum di verifikasi sudah lebih 1x24 jam, mohon bantuannyaakun st.fatimahhamidhealth@gmail.comatas	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang anda alami. Hal terkait dimaksud, silakan untuk menghubungi Dinas

					s perhatian nya saya ucapkan terima kasih		Dukcapil setempat,, Karena yang bisa melakukan perbaikan elemen data itu hanya dinas dukcapil sesuai alamat KK... Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.
134	12 Februari 2024	Shinigami	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ketidak Jelasan Kontrak Honorer Dan Pembayaran Gaji Honorer Ditjen Bina Pemdes Kemendagri	Selamat siang, saya ingin melaporkan bahwa ada ketidak jelasan mengenai penggajian dan status kontrak honorer di ditjen bina pemdes, dimana gaji untuk bulan januari belum dibayarkan serta perpanjangan kontrak yang tidak jelas dan hanya dikontrak satu bulan saja yakni kontrak hanya berlaku bulan januari 2024 ini saja, kenapa kami yang honorer selalu dianaktirikan, sedangkan asn penggajian selalu tepat waktu, kami ini manusia, kami butuh memberikan makan kepada keluarga kami, tolong jangan seperti ini!!!!	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima kasih atas laporan yang disampaikan; 2. Rekrutmen tenaga Non ASN khususnya Petugas Kebersihan dan/atau Office Boy/Girl yang sebelumnya dalam kontrak kerja perorangan (Swakelola) yang kemudian dialihkan menjadi Outsourcing melalui penyedia Jasa Pihak Ketiga; 3. Peralihan tersebut dialihkan pada bulan Februari 2024, sehingga terdapat 1 (satu) bulan yang masih menggunakan kontrak kerja perorangan (Swakelola); 4. Untuk Tenaga Non ASN yang berasal dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) lainnya seperti pramubakti, pengemudi, dan petugas keamanan dilakukan assesment untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun; 5. Dalam menunggu hasil tersebut, seluruh Tenaga Non ASN yang berasal dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berkontrak kerja perorangan (swakelola) sebagai dasar pembayaran Honorarium gaji Bulan Januari 2024; 6. Adapun keterlambatan pembayaran gaji tenaga Non ASN di awal tahun dikarenakan proses validasi melalui rekonsiliasi terhadap daftar nama Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada aplikasi https://gajikita-ppnnpn.kemenkeu.go.id/ yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehingga menunggu proses persetujuan dan kelengkapan

							dokumen administrasi yang harus dipenuhi serta pemutakhiran dan kelengkapan dokumen Penandatanganan sesuai dengan Surat Keputusan dalam Petunjuk Operasional Kerja (POK) Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024; 7. Dapat kami pastikan bahwa saat ini seluruh Tenaga Non ASN baik petugas Kebersihan dan/atau Office Boy/Girl dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) telah menerima Honorarium Bulan Januari 2024 yang menjadi haknya; dan 8. Demikian disampaikan tanggapan kami, dan terima kasih atas masukan dan laporan yang akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan dimasa mendatang.
135	13 Februari 2024	Yayan Sahriyana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Informasi Nomer Kartu Keluarga	Nama : yayan sahriyana nik : tanggal lahir : alamat : kp. katulisan rt 001 / rw 001, desa panyabrangan, kec. cikeusal	Selesai	Berdasarkan informasi NIK yang telah disampaikan dan setelah dilakukan pengecekan ke sistem kami bahwa, NIK : Nama : YAYAN SAHRIYANA KK : Sudah terdaftar pada sistem Dukcapil dan Layanan Online yang terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Demikian dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
136	12 Februari 2024	Diana Puspitaningdyah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Penerbitan SK Mutasi Pns	Mohon ijin ,,mau menanyakan sk mutasi an.diana puspitaningdyah,mutasi dari kotawaringin timur ke nganjuk apakah sudah terbit?	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait Mutasi PNS a.n Diana Puspitaningdyah masih dalam proses antrian penerbitan SK Kemendagri. Mohon menunggu dan tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Penerima/ Tujuan. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah
137	12 Februari 2024	Meilina Susantist	Pengaduan Tidak	Nomor Kartu Keluarga	Dear bapak/ibu yth. dengan ini saya meilina susanti ingin menanyakan perihal nomor kartu	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i,

			Berkadar Pengawasan		keluarga, dikarenakan ketika mau mendaftarkan ke pajak, nomor lama tidak teridentifikasi		dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP El) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
138	29 Februari 2024	Didik Jardih	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Perubahan Kk Kartu Keluarga	Pak saya mau tambah keluarga yg baru lahir gimana cara nya lewat online pak	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan belum semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sudah membuka pengajuan pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan secara online, untuk itu kami sarankan agar Saudara mencari informasi terlebih dahulu apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili Saudara sudah membuka pelayanan secara online. Jika Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili Saudara belum membuka pelayanan secara online, kami menyarankan agar Saudara mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili Saudara untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga Baru karena penambahan anggota keluarga, dengan membawa kelengkapan persyaratan berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit/Klinik/Bidan, Kartu keluarag dan KTP-el Suami dan Istri. penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami

							membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!
139	26 Februari 2024	Ida Bagus Diaz Agasatya	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Salinan Kartu Keluarga	Halo,nama saya ida bagus ratu diaz agasatya, bisa minta kartu keluarga?nik: terima kasih	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, untuk melihat No KK bisa datang ke petugas Dukcapil atau melalui Identitas Kependudukan Digital dan bisa mengajukan permohonan Kartu Keluarga melalui meni Pelayan Identitas Kependudukan Digital. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
140	26 Februari 2024	ANONIM	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Konsultasi	Assalamualaikumizin bertanya, kalau pengajuan rekom kemendagri dari kabupaten atau kota yang kepala daerah nya pj walikota atau pj bupati, untuk mendapatkan rekom mutasi asn, berapa lama waktu prosesnya.wasalamterima kasih	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait hal ini agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah.
141	03 Maret 2024	Edi Sumiaji	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Aktivasi Ikd	Salam, nama saya edi sumiaji nik sya sudah download aplikasi ikd (identitas kependudukan digital) dan sya sudah isi semua data tpi ga ada respon dari aplikasinya, mohon tuk informasinya terimakasih	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi Petugas Dukcapil yang ada di kecamatan atau Dinas Dukcapil di mana saja untuk registrasi Identitas Kependudukan Digital. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
142	06 Maret 2024	Elsy Resita Anggraeni	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Bagaimana Cara Mengonline Kan Kk?	Dengan hormat,.tolong infomasinya untuk mensinkronasikan kk yg harus online. padahal sebelumnya sudah memiliki aplikasi kependudukan online. untuk mengubah bpjs suami ke tanggungan saya. terima kasih	Selesai	
143	06 Maret 2024	Barliyanto Nugroho	Pengaduan Tidak	Informasi Kenaikan Pangkat Untuk	Mohon ijin sy barliyanto nip 197702091999031004 pns dari puskesmas kab kediri kita salah satu	Selesai	Yth. Pelapor. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 800/8579/OTDA Tanggal 27 Desember 2021

			Berkadar Pengawasan	Pejabat Yang Terdampak Penyederhanaan Birokrasi Th 2021	pns yg terkena dampak penyederhanaan 31 desember 2021 dimana saya dulu plt kasubag tu puskesmas yang dijadikan jft adminkes ahli muda dgn ak 225 untuk gol 3c....di karenakan pd bulan april 2024 ak saya sudah terpenuhi jadi kita ajukan usulan kp ke 3d...persyaratan sudah di verifikasi oleh dinas kesehatan dan bkd kab kediri melalui siasn dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat tetapi di bkn melaluhi siasn melaporkan berkas tidak memenuhi syarat dgn alasan pejabat plt tidak termasuk yang disetarakan jabatan...akhirnya sy dan dinas kesehatan konsultasi ke bkd kediri bahwa penyetaraan jabatan sudah sesuai dengan rekomendasi permendagri...pertanyaan saya apakah sy harus mengajukan pemberhentian dari jft adminkes ke pelaksana untuk bisa diproses kp saya apakah sy bisa langsung ke kp mengingat beberapa teman kita dari adminkes bisa langsung di proses..mohon pencerahannya...tks		Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur, Saudar Barliyanto merupakan salah satu dari 305 (tiga ratus lima) Jabatan Administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional. sesuai dengan surat permohonan Provinsi Jawa Timur, saudara Barliyanto Nugroho, S.Kep., M.Kes menjabat sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Puhjarak dan disetujui disetarakan menjadi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan. Terhadap Proses Permohonan Kenaikan Pangkat/Gol. Ruan, disarankan untuk berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara selaku LPNK yang bertugas diantaranya menyelenggarakan pemberian Pertimbangan Teknis kenaikan pangkat PNS sebagaimana Perka BKN Nomor 29 Tahun 202 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah
144	04 Maret 2024	Riski Maulana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Alamat Sesuai Ktp Anda Tidak Sesuai Dengan Data Di Dukcapil	Selamat siang terima kasih, telah membaca pesan ini. saya berharap dapat diberikan solusi dan persoalan pencatatan data saya dapat terselesaikan. sebelumnya saya riski maulana merupakan masyarakat yang tercatat sesuai ktp bertempat di dusun mansur, desa tanoh anou, kecamatan idi rayeuk aceh timur. saya hendak melakukan pendaftaran prakerja namun data saya tidak sesuai sebagaimana yang	Selesai	Pelapor Yth Mohon dialmpirkan KK Saudara dan screenshot pada aplikasi Kartu Pra Kerja yang menyatakan datanya tidak sesuai

					saya tuliskan pada judul pengaduan ini. sehingga saya ingin mendapatkan solusi dari persoalan ini. terima kasih.		
145	27 Maret 2024	Heribertus Ryan Agusta Wiratama	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Usulan Pemekaran Kabupaten Banyuasin Ilir	<p>Kepada, yth. bupati banyuasin, gubernur sumatera selatan, menteri dalam negeri republik indonesia dan presiden republik indonesia. dengan hormat, sehubungan dengan potensi dan kebutuhan yang terus berkembang di wilayah kabupaten banyuasin, kami bermaksud untuk mengusulkan rencana pemekaran calon daerah otonomi baru (dob) yang berada di kabupaten banyuasin ilir. melalui surat ini, kami ingin menyampaikan secara rinci tentang rencana pemekaran tersebut.</p> <p>daerah otonomi baru ini akan terdiri dari kecamatan-kecamatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. air kumbang 2. karang agung ilir 3. muara padang 4. muara sugihan 5. pulau rimau 6. selat penuguan 7. sembawa 8. suak tapeh 9. sumber marga telang 10. tungkal ilir <p>pulau rimau telah dipilih sebagai ibu kota calon dob ini karena pertimbangan strategis, demografi, dan aksesibilitas yang memadai. alasan kami mengajukan rencana pemekaran ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan pelayanan publik: 	Selesai	<p>Selamat Sore</p> <p>Terkait Usulan Pemekaran Provinsi Rawas Raya (Menggantikan Calon Provinsi Sumatera Selatan), Usulan Pemekaran Kabupaten Majeneng (Menggantikan Calon Kabupaten Cilacap Barat), dan Usulan Pemekaran Daerah Isitimewa Surabaya (atau disebut Surabaya Raya) yang disampaikan oleh Sdr Heribertus Ryan Agusta Wiratama yang terdisposisi ke Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, berdasarkan Permendagri 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri sebaiknya usulan tersebut disampaikan kepada Ditjen Otonomi Daerah dimaksud. Terima kasih</p>

				<p>dengan pemekaran, diharapkan pelayanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat, memungkinkan percepatan dalam proses administrasi, serta peningkatan kualitas layanan.</p> <p>2. pengembangan infrastruktur: melalui pemekaran, diharapkan pengembangan infrastruktur dapat lebih terfokus dan terarah, memperbaiki konektivitas antar-kecamatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di setiap wilayah.</p> <p>3. pengelolaan sumber daya: pemekaran akan memungkinkan pengelolaan sumber daya alam dan potensi lokal menjadi lebih efisien dan terarah, serta memperkuat otonomi daerah dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.</p> <p>4. pemberdayaan masyarakat: dengan adanya calon dob, diharapkan masyarakat setempat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya.</p> <p>5. meningkatkan kesejahteraan: pemekaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta peluang usaha dan investasi. kami menyadari bahwa proses pemekaran ini memerlukan kajian yang mendalam serta koordinasi yang</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>baik antara berbagai pihak terkait. oleh karena itu, kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut dan bekerjasama secara aktif dalam proses ini.</p> <p>demikianlah usulan rencana pemekaran calon dob kabupaten banyuasin ilir ini kami sampaikan. kami berharap agar usulan ini dapat dipertimbangkan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten banyuasin. atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>hormat kami,</p> <p>heribertus ryan agusta wiratama pembuat usulan pemekaran dan penggabungan daerah di indonesia</p>		
146	27 Maret 2024	Enny Wiastruti	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Apa Boleh Perangkat Desa Tidak Melalui Penjaringan	<p>Sudah 2 tahun lebih desa lihung mengangkat aparat tanpa penjaringan dan aparat yang bersangkutan sudah bilang memang diangkat langsung tidak melalui penjaringan sedangkan kata dpmd melalui penjaringan, mana yang benar ?</p>	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima kasih atas laporan yang Saudari sampaikan. 2. Dasar hukum mengenai perangkat Desa diatur pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 48 s.d Pasal 53. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait perangkat desa diatur pada Pasal 61 s.d Pasal 71. 4. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan Permendagri nomor 67 Tahun 2017 Perubanan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 5. Dalam hal penjaringan dan penyaringan dan atau pengangkatan perangkat desa

							diatur perturan perundang-undangan sebagaimana pada angka 2,3, dan 4. 6. Demikian disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
147	25 Maret 2024	Irwandi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nik Ktp Terdapat Dua Atau Duplikat	Saya telah melakukan perekaman dan no nik ktp muncul dua no. harus dimatikan/non aktifkan salah satunya. bagaimana saya harus menon aktifkan salah satu nik ktp yg aktif ini.	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi Dinas Dukcapil untuk permohonan proses menonaktifkan NIK. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangny
148	31 Maret 2024	Mumay	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Daftar Nik Baru	Maaf mau bertanya, bagaimana cara mendapatkan nik baru, kk dll. karna ada teman yang tidak atau belum mempunyai e-ktp hingga usia dewasa, perihal sebabnya tidak mengurus karena tidak mengerti dan juga tidak bisa menulis	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait hal tersebut, hal tersebut coba dipastikan kemabli apakah teman Saudara sudah masuk dalam Kartu Keluarga (Kartu keluarga orang Tuanya), jika sudah masuk dalam Kartu Keluarga maka teman Saudara sudah dipastikan memiliki NIK. Tahap selanjutnya jika teman Saudara sudah berumur 17 tahun maka teman Saudara bisa melakukan perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat dengan membawa FC Kartu Keluarga. Namun jika teman Saudara sudah dipastikan belum masuk di Kartu Keluarga manapun, maka dipastikan teman Saudara belum memiliki NIK. untuk mendapatkan NIK maka teman Saudara bisa mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat dengan membawa kelengkapan berupa: 1. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain 2. Dokumen atau bukti Peristiwa

							<p>Kependudukan dan Peristiwa Penting (Surat keterangan lahir dari fasilitas kesehatan)</p> <p>3. Bukti pendidikan terakhir (Ijazah)</p> <p>Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara, Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!</p>
149	30 Maret 2024	Muhammad Rifqi Fadhli	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Persyaratan Dan Prosedur Ngurus Hilang Ktp	Selamat malam bapak/ibu. izin bertanya untuk mengurus ktp hilang seperti apa ya prosedurnya dan persyaratannya	Selesai	<p>Kemeterian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Pengurusan pencetakan kembali KTP-el yang hilang dilakukuan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota setempat, dengan membawa kelengkapan persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian 2. FC Kartu Keluarga <p>Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara, Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!</p>
150	30 Maret 2024	Mecca Nur Ramadhani	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nik Tidak Terdaftar Dalam Dtk	Selamat malam saya mau melaporkan nik saya tidak terdaftar dalam dtks/ppke saat terdaftar dalam kip kuliah	Selesai	<p>Yth Pelapor</p> <p>Berdasarkan sistem kami saat ini, data Saudara adalah sebagai berikut:</p> <p>NIK: Nama: MECCA NUR RAMADHANI TTL: Kel: Kel:</p>

							<p>Kab: Prov: Papua Data Saudara ada disistem Dukcapil, dan tidak ada masalah. Untuk data DTKS menjadi kewenangannya Kemensos. Silakan menghubungi Kementerian Sosial/Dinas Sosial setempat. Terima kasih</p>
151	01 April 2024	Guru Terdzolimi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Penggajian Guru Di Bandar Lampung	<p>Kami guru angkatan 1 dan 2 p3k yang diterima th 2021 bulan maret dan april 2021. intinya ketika itu dau yang sudah dari pusat berikan kepada daerah bandar lampung berupa gaji kami 1166 guru tidak kami terima dari bulan januari 2021 s.d september 2021. sedangkan anggaran tersebut dari dau sudah masuk dan di peruntukan bagi 1.166 guru. dan diberikan gaji hanya 3 bulan di bulan oktober november desember 2021.dan sekarang kembali teradi tamsil atau nonsertifikasi kami seluruh guru asn yang ribuan guru sudah 9 bulan tidak kami terima juga.mohon dengan sangat pemegang kebijakan dapat turun langsung ke kota kami bandar lampung</p>	Selesai	<p>Yth. Pelapor. Terkait hal ini merupakan urusan/kewenangan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. agar segera disampaikan melalui Provinsi/ Gubernur ditunjukan ke Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Terimakasih Dijen Otonomi Daerah</p>
152	01 April 2024	Ricky Kijong	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Halaman Registrasi Sipd Error!!!	<p>Kepada yth.admin/bagian teknis aplikasi sipdkemendari ridengan hormat,sehubungan dengan fasilitas pendaftaran sipd untuk lembaga/organisasi yang dapat dilakukan secara mandiri dan online oleh lembaga. perlu kami informasikan terdapat masalah teknis ketika kami telah mengisi semua data yang dibutuhkan didalam halaman registrasi sipd dengan benar namun terkendala pada tombol &quot;simpan&quot;</p>	Selesai	<p>boleh diberikan informasi pesan erornya apa pak/bu?</p>

					yang tidak berfungsi.mohon kepada bagian terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut karena mengingat kendala ini banyak sekali di alami oleh lembaga lain yang hendak melakukan registrasi.atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.hormat kami,ricky(yayasan al muhlisin miramareu sancang)		
153	01 April 2024	Ibnu Rahim	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Simt Mlm Bpk/Ibu Yth. Saya Ingin Tau Data Nama Asli Ibu Kandung Saya,Yg Ada Di Dukcapil.	Simt mlm bpk/ibu yth. saya ingin tau data nama asli ibu kandung saya,yg ada di dukcapil. ini saya lampirkan ktp saya.mungkin bpk dan ibu bisa mencari datanya. mohon ..infonya bpk/ibu,yth terimakasih	Selesai	Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi petugas Dukcapil yang ada di Kecamatan atau Dinas serta bisa dengan Identitas Kependudukan Digital untuk melihat secara detail data keluarganya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
154	01 April 2024	Muakil Saepul Majid	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengajuan Tidak Di Proses	Saya mengajukan kartu keluarga baru di aplikasi pasti oke disdukcapil garut, tetapi sampai sekarang tidak di proses.	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas laporan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait laporan Saudara, dapat kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Jika di aplikasi PASTI OKE Disdukcapil Garut terdapat fasilitas Chat, mungkin Saudara bisa melakukan konformasi melalui fitur chat. Namun jika fitur chat tidak tersedia di aplikasi PASTI OKE, kami menyarankan agar Saudara mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Garut untuk menanyakan progres dari pengajuan Kartu Keluarga yang Saudara sampaikan melalui aplikasi PASTI OKE dengan membawa kelengkapan persyaratan yang Saudara Upload di Aplikasi Pasti OKE tersebut. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan

							dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!
155	13 April 2024	Tedi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah Yang Mana Yang Dapat Di Tegakan Oleh Satpolpp	Izin bertanya, sesuai undang-undang nomor 23 thn 2014 pasal 255 berbunyi bahwa penegakan perda/perkada, penyelenggaraan trantibum dan linmas oleh satpolpp"; merujuk pada pasal tersebut, apakah semua perda/perkada di wilayah masing-masing kab/kota/provinsi tersebut bisa ditegakan oleh satpolpp, atau hanya produk perda tertentu yang dapat di tegakan oleh satpolpp	Selesai	Yth. Pelapor, Semua bentuk perda dan perkada sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP 16 Tahun 2018, menagamanatkan bahwa salah satu tugas pol pp adalah peneggakan perda dan perkada, yang memberikan arti bahwa Satpol PP dapat melakukan penegakan terhadap seluruh perda dan perkada
156	09 April 2024	Rosa	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mengganggu Ketertiban	Saya sudah melakukan pengaduan diakun yg berbeda pada bulan kemarin, dg disposisi pemkab mojokerto. tapi tidak ada perubahan sampai skrg. apakah ada penugasan satpol pp/polisi patroli di area smpn 2 jetis? sejak pukul 02.00 sampai dg 06.00, selalu ada suara bising mobil membawa sound speaker dan setelah subuh menyalakan petasan yg berbahaya. jangan beralasan ini budaya setahun sekali. salah! sudah sejak tahun 2021, mulai dari tahun baru, pemilu, 30 hari ramadhan, idul fitri, idul adha, pergantian tahun baru islam, dll. tolong untuk lebih tegas bertindak. implementasi kebijakan yg efektif! saya harap, kemendagri sbg instansi vertikal dr pemkab & satpol pp bisa lebih tegas! (sy ada bukti video) apalagi idul fitri besok, jendela rumah	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

					saya sampai gemetarr. kalau sj rumah sy rapuh, sudah ambruk & genteng pada jatuh. lokasi area jalan cor smpn 2 jetis		
157	29 April 2024	Tharuna Qalis Mula	Aspirasi	Pakaian Dan Atribut Asn Pppk	<p>Kepada yth. bapak menteri dalam negeri republik indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua, izinkan saya memberikan pesan ini kepada bapak/ibu, saya tharuna qalis mula adalah seorang guru pppk di salah satu instansi daerah, saya baru saja diangkat pppk tahun ini dikarenakan cpns guru sudah ditiadakan, pada saat kami ingin menandatangani sk pppk ada adu argumentasi di kalangan guru pppk, yaitu pakaian dinas yang kami pakai, kami ada dilema antara menggunakan baju waskat atau menggunakan baju hitam putih seperti honorer yang tentu kami sudah pakai sebelumnya, apakah kami yang statusnya pppk membuat kami tidak setara dengan pns meskipun kami tetap sama-sama asn sesuai dengan uu no. 20 tahun 2023 tentang asn? meski ini hanyalah pakaian dan atribut, akan tetapi ini menjadi pembelahan yang kuat diantara sesama asn, belum lagi kita membahas mengenai penghasilan dan lainnya. argumen ini yang memperkuat keinginan saya dan teman teman kami pppk guru yang resah untuk menuntut permendagri no. 11 tahun 2020 untuk di revisi, mohon untuk</p>	Selesai	<p>Yth. Pelapor. Terkait hal ini akan menjadi perhatian. setiap pegawai memiliki hak yang sama mengenai pakaian dinas. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah</p>

					dipertimbangkan kembali, terima kasih.		
158	29 April 2024	Firdaus Aliansi Mahasiswa Peduli Indonesia	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pelanggaran Netralitas Asn	<p>Presiden Jokowi dodo melalui menteri dalam negeri (mendagri) Tito Karnavian Selasa, 9 September 2023. secara resmi melantik Drs. H. Lalu Gita Ariadi sebagai penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menggantikan Dr. H. Zulkiflimansyah. Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap setelah dilantik menjadi PJ Gubernur, tonggak estafet kepemimpinan selama satu tahun kedepan nantinya yang akan dinahkodahi oleh H. Lalu Gita Ariadi sebagai PJ Gubernur NTB, dengan harapan mampu membangun NTB dan melanjutkan visi misi Gubernur sebelumnya dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTB pada umumnya. Maka oleh sebab itulah kenapa penjabat Gubernur diambil dari pejabat struktural yang memiliki jabatan dipemerintahan bukan dari luar pemerintahan, tidak memiliki visi misi politik. Artinya tugasnya ialah murni memimpin birokrasi dan melaksanakan tugas pemerintahannya dengan sebaik mungkin. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan penekanan kepada pejabat Gubernur yang sudah dilantik untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan membangun komunikasi secara intensif dengan DPRD, pimpinan OPD, dan seluruh Forkopimda dalam rangka mengefektifkan pemerintah</p>	Selesai	Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

					<p>daerah. serta menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di nusa tenggara barat.tetapi justru sebaliknya kami menemukan ada perilaku yang menyimpang pj gubernur ntb, di duga telah melanggar pasal 2 asn no 5 tahun 2014 tentang netralitas asn, sebagaimana kita temukan di rilis di beberapa media nasional maupun lokal sesperti detikbali, kompas.com dil.dari rilisan tersebut kami temukan pj gubernur ntb h. lalu gita ariadi sibuk menghadiri undangan dari partai politik. h. lalu gita ariadi justru menyatakan mundur dari pj gubernur dan aparat sipil negara (asn) untuk maju di pilgub ntb padahal tugasnya sebagi pj gubernu ntb belum berakhir. kesiapan tersebut disampaikan pj gubernur usai menghadiri undangan dari dewan pimpinan pusat (dpp) partai golkar. harapan masyarakat ntb seolah tak berarti!!!. padahal saat dilantik menjadi pj gubernur ntb h. lalu gita ariadi telah bersumpah akan memenuhi kewajibanya sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnva, memegang teguh undang-undang dasar negara republik indonesia 1945, dan menjalankan segala perintah undang-undang, dan peraturanya serta berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. tetapi justru sebaliknya yang terjadi pj gubernur ntb telah menghianati janji yang diucapkannya.kementrian dalam negi (kemendagri), telah menegaskan pj gubernur diperbolehkan maju sebagai</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>calon gubernur definitif tapi dengan catatan harus melepaskan jabatannya sebagai pj gubernur. berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor satu tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, menjadi pasal 7 ayat (2) huruf q calon gubernur dan wakil gubernur, dst paslon atau orang tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota &quot; jika menginginkan maju di pilgub atau pilpub, pilwalkot. maka harus mundur sebelum tahapan pilkada dimulai, untuk menjaga netralitas ASN dan birokrasi yang berjalan. maka dari itu kami dari &quot;aliansi mahasiswa peduli Indonesia&quot; meminta kepadakementrian dalam negrituntutan1. mencopot h. lalu gita ariadi sebagai pj. gubernur ntb.2. mencabut status h. lalu gita ariadi sebagai apartur sipil negara (ASN)3. mengaudit seluruh penggunaan anggaran sejak h. lalu gita ariadi menjadi pjgubernur ntb</p>		
159	26 April 2024	Aris Handoko	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Apakah Nik Saya Disalahgunakan	<p>Pagi ini, jumat tanggal 26 april 2024, saya mendapatkan telepon dari pihak yang mengaku dari bpjs kesehatan, karena saya sedang dalam perjalanan, saya tidak memerhatikan no. telepon dari pihak penelepon, karena memang saat ini status bpjs kesehatan saya sedang tidak aktif maka saya percaya dan saya sempat memberikan nik saya dan no. bpjs kesehatan saya. mohon diperiksa apakah nik saya</p>	Selesai	<p>Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya</p>

					disalahgunakan. nik saya demikian & terima kasih. regards, aris handoko		
160	26 April 2024	Stephen Salim	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Surat Pindah Dari Batam Ke Jakarta Yang Tidak Selesai Dan Tidak Kunjung Jadi	<p>Kepada kemendagri dan tim layanan dukcapil batam, Saya ingin menyampaikan keluhan dan permohonan bantuan terkait proses surat pindah saya yang tertunda. Pada bulan januari 2024, saya telah mengajukan surat pindah dari batam ke jakarta dan telah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan. Saya sekarang berdomisili di jakarta dan telah melakukan perjalanan ke batam sebanyak 4 kali untuk memperoleh surat pindah dari dukcapil batam, namun hingga saat ini belum menerima kabar terkait status surat pindah saya.</p> <p>Pada saat pengajuan, saya dijanjikan bahwa surat pindah akan dikirim melalui email. Namun, hingga sekarang saya belum menerima email tersebut. Selain itu, saya juga telah berusaha menghubungi layanan email dan nomor telepon dukcapil batam, namun tidak mendapatkan tanggapan ataupun bantuan yang memadai. Situasi ini sangat mempersulit saya, terutama karena saat ini saya harus mengubah domisili ktp saya dari batam menjadi jakarta. Saya juga membutuhkan kk fisik untuk keperluan tertentu, namun tidak dapat mengambilnya karena tertahan di dukcapil batam. Dengan demikian, saya memohon</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait dengan keluhan Saudara, dapat kami sampaikan bahwa Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL mengamanatkan "</p> <p>Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Kabupaten/Kota daerah tujuan, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal guna mendapatkan SKP. Karena saat ini Saudara sudah berdomisili di Jakarta, silahkan Saudara mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan membawa Kartu Keluarga dan KTP-el, dan menginformasikan kepada petugas bahwa saat ini Saudara sudah beromisili di wilayah Jakarta dan berkeinginan untuk pindah dan menetap di Jakarta. Proses kepindahan Suadara dari Kota Batam ke Jakarta akan dibantu prosesnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika</p>

					<p>agar pihak dukcapil batam dapat memberikan perhatian dan bantuan yang tepat terkait situasi ini. Saya sangat menghargai jika dapat diberikan informasi mengenai status surat pindah saya dan langkah-langkah yang dapat saya ambil untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera.</p> <p>Mohon dipertimbangkan dengan baik atas keluhan dan permohonan bantuan saya ini. Saya sangat berharap agar masalah ini dapat segera terselesaikan agar saya dapat memperoleh kk fisik dan menyelesaikan keperluan saya dengan lancar.</p> <p>Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.</p>		<p>Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, ohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!</p>
161	02 Mei 2024	RACHMAT HIDAYAT RIUPASSA	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Aplikasi Ikd Tidak Dapat Di Akses	<p>Saya sdh downloand aplikasi ikd dan terdaftar tapi aplikasi ikd tidak dapat di akses dari hp yg di daftarkan</p>	Selesai	<p>Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melihat dan cek jaringan pada handphone tersebut dan cara kedua untuk update aplikasinya.</p> <p>Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya</p>
162	02 Mei 2024	Kuuga	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Di Tanggal Merah Kualitas Air Sangat Buruk	<p>Selamat siang bapak menteri dalam negeri, kami warga rt. 24 dan rt. 22 kelurahan lempake kecamatan samarinda utara izin melaporkan bahwa di tempat kami kualitas air yang dihasilkan perumdham tirta kencana mahakam kota samarinda sering jelek terkhusus di tanggal merah pasti air pdam keruh sebagai contohnya kemarin di tanggal 1 mei 2024 pukul 16.58 wita air pdam berwarna hitam, kami juga pernah</p>	Selesai	<p>Yth. Pelapor,</p> <p>Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjuti di SP4N LAPOR!</p>

					mengirimkan surat secara langsung kepada bapak walikota samarinda bapak andi harun dan kualitas airnya membaik tetapi hanya bertahan sebentar terkhusus dihari atau tanggal merah kualitas airnya sangat buruk, tolong bapak menteri dalam negeri mengaudit kinerja pegawai perumdam tirta kencana mahakam kota samarinda, terimakasih.		
163	02 Mei 2024	Gilang Purnama	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kartu Keluarga Dan Nik Tidak Sesuai	Saya atas nama gilang purnama yang beralamat di jln. musholla mit thoriq rt.004/rw.017 kel. pewira, kec. bekasi utara, kota bekasi.ketika saya ingin daftar mobile jkn untuk membuat kartu indonesia sehat, akan tetapi tidak bisa dikarenakan menurut aplikasinya kk dan nik saya tidak terdaftar di dukcapil. jadi keluarga saya tidak bisa membuat kartu indonesia sehat. padahal saya sangat membutuhkannya sekarang dikarnakan ada keluarga saya yang sedang sakit.	Selesai	Yth Pelapor Berdasarkan sistem kami saat ini, data Saudara adalah sebagai berikut: NIK: NOKK: Nama: Gilang Purnama TTL: Data Saudara ada disistem Dukcapil dan tidak ada masalah. Dipastikan kembali pada saat mengurus BPJSnya. Terima kasih
164	02 Mei 2024	Mesti Hartini	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pelanggaran Mutasi Dan Politisasi Asn	Kepada yth. mendagri ri di jakarta. dengan hormat, menyikapi surat edaran mendagri ri nomor. 100.2.1.3/1575/5/sj tanggal 29 maret 2024 tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada, yang di tujukan kepala daerah se indonesia, pada surat tersebut, menyebutkan bahwa pada tanggal 22 maret 2024 sudah masuk batas waktu tahapan pilkada sehingga kepala daerah yang daerahnya melaksanakan pilkada	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait hal ini agar terlebih dahulu di laporkan ke Provinsi/ Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk di koordinasikan ke Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Otonomi Daerah. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah

					<p>dilarang melakukan mutasi atau pergantian pejabat. dengan memperhatikan surat edaran mendagri tersebut maka dengan ini kami laporkan bahwa, pada tanggal 22 maret 2024 saudara erwin octavian, se (bupati seluma) telah melakukan mutasi atau pergantian pejabat, mulai dari eselon ii, iii, dan iv di lingkungan pemerintah daerah kabupaten seluma, dengan demikian kami menilai bahwa mutasi atau pergantian pejabat yang telah dilakukan oleh saudara erwin octavian. se (bupati seluma) pada tanggal 22 maret 2024 tersebut tidak sah dan cacat hukum, karena sudah melanggar aturan perundangan yang telah ditetapkan.</p> <p>akibat dari mutasi atau pergantian pejabat tersebut telah menimbulkan banyak polemik di kalangan asn dan masyarakat karena saudara erwin octavian, se (bupati seluma) telah mem politisasi asn, karena kabupaten seluma merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 27 november 2024 nanti dan saudara erwin octavian, se maju kembali sebagai bacalon bupati seluma 2024 - 2029. untuk itu kami memohon dan mengharapkan agar mendagri dapat membatalkan pelaksanaan mutasi atau pergantian pejabat yang telah dilakukan oleh saudara erwin octavian, se di kabupaten seluma pada tanggal 22 maret 2024 tersebut, karena cacat hukum dan</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>menimbulkan keresahan pada asn dan masyarakat.</p> <p>demikian kami sangat mengharapkan agar kemendagri bukan hanya sebagai simbol tingkatan birokrasi namun benar benar dapat menjadi institusi yang memiliki legitimasi, marwah dan harga diri serta benar benar sebagai pelindung yang dapat memberikan perlindungan birokrasi bagi asn yang ada di daerah dari tindakan kesewenang wenangan.</p> <p>wassalam dan terima kasih.</p>		
165	09 Mei 2024	Indriani Sholeha	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengajuan Pembuatan Akta Kelahiran Untuk Anak Yang Baru Lahir	<p>Selamat pagi,</p> <p>mohon dibantu pengajuan pembuatan akta kelahiran untuk anak yang baru lahir atas nama sabian putra hedriansyah yang lahir pada 01 maret 2024. sudah mengajukan pembuatan online namun nomor wa yang dituju tidak terdaftar. mohon kiranya agar segera diproses.</p> <p>terimakasih</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!</p> <p>Terkait pertanyaan saudara, dapat kami sampaikan silahkan Saudara mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili Saudara untuk mengajukan pembuatan Akta Kelahiran, dengan melampirkan dokumen di atas dan ditambahkan dengan FC KTP-el suami dan istri.</p> <p>Demikian disampaikan penjelasannya, terimakasih.</p>
166	07 Mei 2024	Kuuga	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Air Pdam Yang Dihasilkan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Ketika Digunakan Mandi Terasa Lengket Dan Berbau	<p>Selamat malam bapak menteri dalam negeri kami warga rt. 22, 23, dan 24 kelurahan lempake kecamatan samarinda utara lagi-lagi izin melaporkan bahwa sudah 1 minggu kualitas air pdam yang dihasilkan perumdam tirta kencana kota samarinda sangat jauh dari kata layak, apabila air digunakan untuk mandi terasa lengket dibadan serta ketika dikonsumsi air terasa tidak enak dan berbau, sangat kuat air terdapat</p>	Selesai	<p>Izin melaporkan keluhan Bapak/Ibu @inspektoratjenderalkemeteriandalamnege ri sekarang pada tanggal 18 Mei 2024 dan 19 Mei 2024 air yang dihasilkan oleh perumdam tirta kencana kota samarinda yang lagi-lagi keruh (berwarna orange gambar terlampir), mohon tindakannya terimakasih.</p>

					<p>kandungan zat kimia berbahaya. tolong bapak menteri dalam negeri untuk mengaudit kinerja pengelola perumdam tirta kencana kota samarinda dikarenakan kejadian ini sudah berlangsung 1 minggu (1 mei 2024 - 7 mei 2024), kami dulu juga pernah melapor secara tertulis kepada walikota samarinda terkait kualitas air dan airnya langsung baik tetapi hanya sementara, kami takut &quot;dikerjai&quot; oleh oknum pejabat perumdam tirta kencana samarinda, tolong kami bapak menteri dalam negeri dikarenakan air adalah sumber kehidupan tetapi jika air pdam mengandung zat berbahaya maka air sumber kematian, mohon bantuannya terimakasih.</p>		
167	07 Mei 2024	Lalu Joni Iskandar	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kehilangan Kartu Keluarga	<p>Saya kehilangan kartu keluarga, bagaimana cara mencetak online kartu keluarga saya yang hilang?</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan belum semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sudah membuka pengajuan pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan secara online, untuk itu kami sarankan agar Saudara mencari informasi terlebih dahulu apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili Saudara sudah membuka pelayanan secara online. Jika Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili Saudara belum membuka pelayanan secara online, kami menyarankan agar Saudara mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai</p>

							<p>domisili Saudara untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga karena hilang, dengan membawa kelengkapan persyaratan berupa Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memfasilitasi penerbitan kembali KK Saudara dan untuk Soft KK akan dikirimkan ke alamat email atau no wa Saudara pada saat Saudara mengajukan permohonan layanan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Laport!</p>
168	29 Mei 2024	Andika	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permasalahan Nik Ganda Merugikan Pendaftaran Ppdb Anak Sekolah	<p>Mohon solusinya untuk kasus ppdb cut off berikut sebelum nya terakhir saya mengurus kartu keluarga baru untuk memasukkan data baru anak saya yang ke tiga , setelah itu saya di info kelurahan bahwa nik anak pertama dan kedua saya double, dan diminta untuk mengajukan penghapusan nik ke sudin jakarta timur. dan diterbitkan kartu keluarga baru. tapi ternyata sekarang malah tidak bisa mengikuti pendaftaran ppdb. dikarenakan anak saya dianggap pendatang baru. mohon solusinya.</p>	Selesai	<p>Berdasarkan informasi NIK yang telah disampaikan dan setelah dilakukan pengecekan ke sistem kami bahwa, Sudah terdaftar pada sistem Dukcapil dan Layanan Online yang terintegrasi dengan sistem Dukcapil. NIK : NAMA : KAISAR ATHAYA Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya</p>
169	29 Mei 2024	Moh Indra Nirwana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permintaan Informasi	<p>Assalamualaikum wr.wb apakah ktp bisa dilacak ya? kalo bisa mohon dibantu dong pak saya kehilangan dompet saya yang berisi ktp sim atm atas nama moh. indra nirwana</p>	Selesai	<p>Walaikumsalam wr.wb Halo sobat dukcapil, terkait laporan saudara, sebelumnya kami memohon maaf untuk dapat dilakukan klarifikasi dikarenakan teknologi KTP-el merupakan penyimpanan</p>

							<p>data penduduk secara enkripsi dan bukan "Tracker GPS" seperti yang diisu-isukan sehingga pencarian KTP-el fisik maupun dompet sobat belum dapat dilakukan. apabila terdapat kehilangan barang berharga kami sarankan untuk dapat melaporkan ke pihak berwajib agar dapat dilakukan pencetakan ulang KTP-el pada Disdukcapil terdekat ya sobat.</p> <p>salam dukcapil PRIMA !</p> <p>-Admin LAPOR PIAK-</p>
170	27 Mei 2024	La Ode Muhamad Purnando Manca D	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nama Tidak Sesuai Nik	<p>Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh , yang terhormat kementerian dalam negeri perkenalkan nama saya purnando saya ingin melakukan pengaduan mengenai ketidaksesuaian antara nama dan nik saya ketika saya melakukan pendaftaran di situs satu sehat sekian pengaduan saya , saya ucapkan terimakasih</p>	Selesai	<p>Yth Pelapor</p> <p>Mohon dikirimkan foto KK atau KTP saudara untuk kami cek disistem. Berdasarkan data yang dikirimkan tersebut kami akan memastikan apakah data Saudara sesuai atau tidak dengan data di sistem Dukcapil.</p> <p>Terima kasih</p>
171	04 Juni 2024	BOTI SUHUN	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permohonan Perubahan Data Provinsi Domisili	<p>Selamat pagi. saya mau daftar di oss, tapi tertolak karena ktp saya belum diperbaharui provinsi domisili saya, karna ktp masih provinsi papua, sementara ada pemekaran dob (papua pegunungan) dan kabupaten yahukimo masuk di provinsi baru. saya berharap agar bisa dibantu untuk perubahan data provinsi sesuai data saya. terma kasih. berikut saya lampirkan kartu identitas saya</p>	Selesai	<p>Yth Pelapor</p> <p>Berdasarkan sistem kami saat ini, data Saudara adalah sebagai berikut:</p> <p>NIK:</p> <p>Nama: Boti Suhun</p> <p>Alamat: Homidipmu</p> <p>Kel: Homidipmu</p> <p>Kec: Hilipuk</p> <p>Kab: Yahukimo</p> <p>Prov: Papua Pegunungan</p> <p>Mohon alamat nya dipastikan benar saat penginputan pada aplikasi OSS, khususnya pada kolom alamat disesuaikan dengan data alamat yang saya kirimkan (Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi).</p> <p>Terima kasih</p>

172	02 Juni 2024	Sevabudiaty	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Situs Aplikasi Untuk Melihat Data Ktp	Kemana saya harus perbaiki data ktp seperti jenis kelamin atau rt rw secara online	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, bisa dengan Identitas Kependudukan Digital dimohon untuk mendatangi petugas Dukcapil yang ada di Kecamatan atau Dinas untuk mendapat QR Identitas Kependudukan Digital, dengan Identitas Kependudukan Digital bisa melihat data kependudukan dan untuk memperbaiki data bisa datang ke petugas Dukcapil yang ada di Kecamatan, UPT dan Dinas. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. jangan lupa bintangnya
173	01 Juni 2024	Lisriani	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pengangkatan Fungsional Dari Jabatan Pelaksana Tanpa Melalui Uji Kompetensi Dan Tanpa Rekomendasi Dari Mendagri	Telah terjadi pengangkatan pejabat pelaksana menjadi pejabat fungsional analis sumber daya manusia aparatur dengan dasar surat kepala pusat pembinaan jabatan fungsional kepegawaian, nomor. 13424/b-bj.02.03/sd/c.v/2023 atas nama: 1. asrul jaya, s.sos nip. 2. abed nego limbong,se.m.m nip. 1 3. iwan agustiawan arif, se nip. mohon di tinjau kembali karena tujuan dari surat tersebut adalah perubahan nomenklatur dari jabatan analis kepegawaian menjadi jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur mohon ditelusuri sk pengangkatannya sebagai analis kepegawaian jika mereka melampirkan karena yang	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

					bersangkutan bukan merupakan pejabat hasil penyetaraan. dan bukan pula hasil uji kompetensi oleh bkn.. berikut dilampirkan se mendagri tentang persetujuan penyetaraan jabatan. hanya ada 5 orang yang betul sebagai analis kepegawaian hasil penyetaraan. yang lainnya mohon ditelusuri dasar kenaikan pangkatnya. karena mereka hnya sebagai pelaksana sbelumnya.. dan tidak pernah uji kompetensi		
174	19 Juni 2024	Salman Farisi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kartu Keluarga	Mohon informasi data kartu keluarga nik	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
175	19 Juni 2024	Rumika Kobepa	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nik	Nomor nik saya tidak terdaftar	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
176	15 Juni 2024	Rymond Batawi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mutasi Pejabat Tanpa Seijin Mendagri,	Saya diganti dan dimutasikan dari kepala dinas kominfo kab. halmahera utara ke staf di bag administrasi setda kab halmahera utara. sk 20 mei 2023. hal ini melanggar uu no 10 thn 2016	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait hal ini agar terlebih dahulu dikoordinasikan ke Provinsi/Gubernur dalam hal ini sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk disampaikan ke Menteri Dalam Negeri.

					dan surat edaran (se) nomor 100.2.1.3/1575/sj tertanggal 29 maret 2024.		Terimakasih Ditjen Otonomi Daerah
177	26 Juni 2024	Agnes Rufina	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ktp Saya Chipsnya Tidak Sesuai Dengan Data Diri Saya Yang Seharusnya	Ktp saya chipsnya tidak sesuai, terbacanya chips orang lain, padahal saya dapat ktpnya dari kecamatan kelapa dua tahun 2019. pengurusan ktp saya waktu itu memakan waktu sekitar 5thn, koordinasi dengan dukcapilkabtangerang sangat tidak membantu sama sekali. mengapa pembuatan ktp dan kk sangat susah untuk daerah kabupaten tangerang? lokasi dukcapil di tigaraksa (balaraja). mohon bantuan dari dukcapil pusat, agar pelayanan daerah kab tangerang dapat ditingkatkan.	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
178	24 Juni 2024	Fppi Kemendagri	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengaduan Terkait Pendangkalan Di Sungai Liat (Bangka)	Pengaduan terkait pendangkalan di sungai liat (bangka)- (pengaduan disampaikan secara langsung di ula kantor pusat kemendagri) oleh:suhenda-kejadian di bangka induk yang mana kinerja pj. bupatibangka dan pj gubernur bangka sangat mengecewakan-pengerukan sungai di sungai liat dilakukan oleh 2 pt yaitu pt. pulomas pada tahap awal kemudian dipilih kembali pt. naga sumatera disaat bersamaan-pemilihan lagi pt naga sumatera yg di tunjuk oleh pj. gubernur padahal sebelumnya sudah ada pt. pulomas membuat kericuhan di daerah sekitaran sungai liat-kemendagri dapat memberikan teguran bagi pj. gub dan pj. bup di bangka belitung-----ari nur-karena tidak adanya kekonsistenan kebijakan dari pemda provinsi dan kabupaten	Selesai	Terima kasih atas pengaduan yang saudara sampaikan kepada kementerian dalam negeri, Terkait dengan kerja sama yg dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten dengan pihak ketiga (PT) perlu dikaji lebih mendalam dengan memperhatikan dokumen kerja sama yang ada. Baik Provinsi dengan PT maupun Kabupaten dengan PT. Selain itu kita juga perlu menilik kembali kewenangan Provinsi dan Kabupaten terkait pengerukan sungai tersebut, Siapa yang memiliki kewenangan untuk pengelolaannya. Kami membutuhkan kronologi & data dukung antara lain berupa perikatan antar pihaknya, perencanaan para pihak, hasil kajian, hasil lelang dll

					<p>bangka terhadap pemilihan 2 pt. yang melakukan pengerukan sungai di sungai liat-----aktivis nelayan(orang setempat) -pengerukan yang tidak berdasar oleh pemda mengakibatkan hadirnya pt. pulomas dan sudah menghasilkan pad bagi daerah-2023 pemda menunjuk kembali pt. pulomas melakukan pengerukan namun ditahun selanjutnya menunjuk kembali pt. naga sumatera yang membuat kegaduhan yang tidak jelas antara dua perusahaan yang sama-sama diberikan wewenang oleh pemda tersebut----ahadi (persatuan lingkungan nelayan) -pj gub pj bup dan forkompimda datang dan menunjuk pulomas untuk memperbaiki pendangkalan di sungai liat namun 1 bulan kemudian ditunjuk kembali pt naga mas sumatera membereskan pendangkalan di sungai liat-----amsar (lkpi bangka belitung) -kesusahan dan keluh kesah masyarakat di sekitaran sungai liat terhadap pendangkalan yang terjadi di sungai liat-----ayub (eksekutif kelautan indonesia) - evaluasi pj gubernur dan pj bupati bangka atas dasar membuat kegaduhan dengan mencampur adukan pengelolaan pendangkalan di sungai liat antara pt. pulomas dan pt. nagamas sumatera-----kementerian dalam negeri dapat segera mengevaluasi pj. gubernur babel dan pj. bupati bangka</p>		
179	30 Juni 2024	Saepul Bahri	Pengaduan Tidak	Pembuatan Kartu Keluarga Baru	Pembuatan kartu keluarga saya blum jadi-jadi di aplikasi ikd juga status	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i,

			Berkadar Pengawasan		masih permohonan padahal udh hampir 3 minggu		dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
180	29 Juni 2024	Anggang Jatikumoro	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Bis Kemendagri Ciledug 08 B 7263 Ppa Parkir Sembarangan Di Komplek Villa Mutiara Serpong Tangsel	Bis kemendagri ciledug 08 dgn nomer b 7263 ppa sudah beberapa bulan parkir sembarangan di komplek vila mutiara serpong, pondok jagung timur, tangerang selatan. parkir di pinggir jalan, bukan di tempat khusus/tempat parkir, serta mengganggu lalu lintas karena jalan jadi sempit. apakah tidak di anggarkan untuk parkir yang benar di lahan parkir atau di lahan sewaan?	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti. Terima Kasih.
181	01 Juli 2024	Roman Frediansyah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Penyampaian Proposal Permohonan Renovasi Gedung Kantor Kepala Desa	Dengan hormat,sehubungan dengan rencana pengembangan infrastruktur diwilayah kami, kami bermaksud untukmemohon dukungan dana renovasi kantor kepala desa. adapun rincian dan tujuan dari permohonan iniadalah sebagai berikut :1. nama desa : labuhan sangoro2. alamat kantor desa : rt.004 rw.002 dusun sangor b, desa labuhan sangoro kecamatan maronge kabupate sumbawa nusa tenggara barat3. latar belakang permohonan : a. kantor kepala desa saat ini mengalami kekurangan ruang untuk pelayanan kepada masyarakat. b. kondisi fisik bangunan yang sudah tua dan tidak memadai untuk kegiatan administratif desa.4. tujuan pembangunan : a. meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepada masyarakat. b.	Selesai	1. Terima kasih atas proposal yang Saudara sampaikan. 2. Berdasarkan Pasal 4 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa tujuan pengaturan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. 3. sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan kepada Saudara: a. Bahwa dalam rangka permohonan renovasi gedung kepala desa merupakan perhatian dari pemerintah provinsi, dan kabupaten maupun stakeholder lain sesuai dengan kemampuan masing-masing APBD Provinsi/ Kabupaten sehingga pemerintah Desa dapat mengirimkan proposal renovasi

					<p>memperbaiki kondisi insfrastruktur dasar untuk mendukung efisiensi kerja pemerintahan desa.5. rencana penggunaan dana : a. pembangunan kantor kepala desa yang lebih representatif dan fungsional.untuk itu, kami sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari kementerian dalam negeri dalam menyediakan dana untuk renovasi kantor kepala desa ini. dengan perhatian dan bantuan dari kementriankami yakin pelayanan kepada masyarakat di wilayah kami akan semakin baik dan efektif.demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan bapak/ibu, kamimengucapkan terima kasih.</p>		<p>kantor desa ke Pemerintah Provinsi/Pemerintah kabupaten sebagaimana angka 2. b. Dalam hal bantuan renovasi gedung kepala desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memberikan bantuan rehabilitasi bangunan kantor desa sebesar Rp. 50.000.000 bagi kantor desa dalam keadaan rusak berat, ringan, dan atau sedang dengan mekanisme Pemerintah Desa mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya Pemerintah kabupaten bersurat kepada Direktur Bina Pemerintahan Desa dalam hal permohonan rehabilitasi bantuan bangunan kantor desa labuhan sangoro disertai dengan lampiran proposal. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.</p>
182	05 Juli 2024	Andri Juniansyah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek No Nik		Selesai	<p>Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya</p>
183	05 Juli 2024	Armensius Purba	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Aplikasi Sipd Ri Tidak Lancar Di Wilayah Pemkab. Labuhanbatu Utara	<p>Selamat pagi bapak/ibunama saya armensius purba, bekerja pada dinas lingkungan hidup kabupaten labuhanbatu utara ingin menyampaikan pengaduan terkait akses sipd ri yang sangat sulit ataupun tidak lancar di wilayah kabupaten labuhanbatu utara - provinsi sumatera utarakami berharap</p>	Selesai	<p>silahkan bapak/ ibu, mengikuti panduan sbb : klik kanan, kemudian klik inspect , lalu disebalah kiri browser (di tombol refresh) klik kanan, lalu klik clear cache atau empty cache. terima kasih</p>

					aga masalah ini secepatnya diselesaikan, mengingat jadwal p rkpd 2024 dan kua ppas 2025 akan berakhirterima kasih		
184	05 Juli 2024	Hegar Birowo Lubis	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nomor Nik Salah	Saya ingin mengubah nik saya menjadi yg baru dan mau bikin kk baru pindah dari bekasi ke jakarta	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan bahwa sesuai amanat Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, menyatakan NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili. Artinya setelah NIK diterbitkan maka NIK tersebut tidak bisa dirubah. Jadi jika Saudara pindah domisili ke Kabupaten/Kota yang baru maka NIK Saudara tetap NIK yang sudah diterbitkan sebelumnya.</p> <p>Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!</p>
185	23 Juli 2024	Deden Subagja Mohamad Ikmal	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Meminta E-Ktp	Maaf pak/bu saya meminta informasi terkait e-ktp saya, untuk keperluan kerja : deden subagja mohamad ikmal	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi petugas Dukcapil

					fadil/3273042608990004/kopo/bojongl oa kaler/kota bandung		yang ada di Kecamatan atau Dinas untuk KTP el nya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
					terimakasih		
186	23 Juli 2024	Bhimo Purnawinata Mulyono	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Lupa Nik Ktp Sedangkan Kartu Keluarga Terbakar	Nik ktp saya lupa sedangkan kartu keluarga sdh terbakar	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi petugas Dukcapil yang ada di Kecamatan atau Dinas untuk mendapat Identitas berupa Kartu Keluarga dan NIK. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
187	23 Juli 2024	Mariana	Permintaan Informasi	Pisah Kartu Keluarga	Halo jika status saya masih single apakah bisa pisah kartu keluarga dengan orang tua saya?	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait pertanyaan Suadara , dapat kami sampaikan bahwa syarat penduduk untuk bisa pisah KK yaitu penduduk yang telah berusia 17 tahun atau penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun telah kawin atau pernah kawin. Jika Saudara sudah memenuhi kriteria tersebut maka Saudara bisa Pisah KK dengan orang tua. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!
188	31 Juli 2024	Dorotea Prastiwi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Status Kepindahan	Saya sudah pernah melakukan pengajuan kepindahan dari kalimantan tengah (kotawaringin timur) ke kota magelang, tetapi pada	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi petugas Dukcapil yang ada di Kecamatan atau Dinas sesuai

					saat dicek status saya masih ktp kalimantan.		domisli untuk segera mengupdate datanya tersebut. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
189	31 Juli 2024	Aby Aula	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Nik Ktp		Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi petugas Dukcapil yang ada di Kecamatan atau Dinas dan bisa melalui Identitas Kependudukan Digital untuk melihat valid tidaknya data tersebut. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
190	31 Juli 2024	Keuangan Diskominfo	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permasalahan Pada Saat Mengakses Akun Pa	Akun sipd dengan nip tidak dapat diakses dengan keterangan invalid username or password	Selesai	bisa infokan ke kami , bapak/ibu berasal dari SKPD apa? terima kasih
191	06 Agustus 2024	Slamet Haryono Mt Ciap Cgrcp	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permendagri No 7 Tahun 2024 Belum Tepat	Ralat untuk permendagri 7/2024 ini mengapa masih menyisipkan klausul menyisipkan diantara pasal 512 dan 513 dengan pasal 512a dan 512b (114. di antara pasal 512 dan pasal 513 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni pasal 512a dan pasal 512b sehingga berbunyi sebagai berikut:).sedangkan dalam permendagri 108/2016 pasal 512 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. sedangkan pasal 512 b tidak ada dalam permendagri 7 tahun 2024 mohon pencerahannya	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!
192	06 Agustus 2024	Slamet Haryono Mt Ciap Cgrcp	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mohon Penjelasan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 512A	Ralat untuk permendagri 7/2024 ini mengapa masih menyisipkan klausul menyisipkan diantara pasal 512 dan 513 dengan pasal 512a dan 512b (114. di antara pasal 512 dan pasal	Selesai	Yth. Pelapor, dengan hormat kami sampaikan bahwa: 1. Substansi yang dimohonkan penjelasan adalah Pasal 512A dan 512B pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang

				<p>Dan 512B Yang Di Permendagri No.108/2016 Sudah Mencabut Pasal 512 Di Permendagri 19/2016</p>	<p>513 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni pasal 512a dan pasal 512b sehingga berbunyi</p> <p>sebagai berikut:)...dst...</p> <p>sedangkan dalam permendagri 108/2016 pasal 512 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku bagaimana perlakuan dari pasal 512a dan 512b jika pasal 512 yang ada di permedagri 19/2016 sudah dicabut oleh permedagri 108/2016....sedangkan untuk pasal 512b tidak tertuang dalam permendagri no 7 tahun 2024....mohon pencerahannya...</p>	<p>Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, sementara Pasal 512 (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya dinyatakan perlakuan Pasal 512A dan 512B pada Permendagri Nomor7 Tahun 2024.</p> <p>2. Hasil koordinasi dengan Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, didapat penjelasan bahwa substansi Pasal 512A dan 512B sudah termaktub dalam Pasal 512A Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, sehingga Pasal 512B tidak termuat lagi.</p> <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa substansi Pasal 512A dan 512B yang dimohonkan penjelasan pada Permendagri 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah tetap berlaku dan dipedomani dalam pengelolaan barang milik daerah, dan terhadap Pasal 512B yang tidak terdapat dalam Permendagri 7 Tahun 2024 sudah termaktub dalam Pasal 512A.</p> <p>Terimakasih. Salam Tim SP4N-LAPOR!</p>
--	--	--	--	---	--	--

193	06 Agustus 2024	Yunias Blegur	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Nomor Kk Menggunakan Nomor Nik	Nomor nik:	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi petugas Dukcapil yang ada di Kecamatan atau Dinas dan bisa melalui Identitas Kependudukan Digital. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
194	29 Agustus 2024	ADI	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Oknum Admin Lapor! Pemprov. Kalbar Tidak Kompeten!	Oknum admin lapor! pemprov. kalbar tidak kompeten! tanggal 15 agstus 2024 saya menyampaikan pengaduan berjudul "pengaduan oknum dan kinerja inspektorat provinsi kalbar" dengan tracking id : #8093530 yang sudah lengkap berisi kronologis disertai bukti pendukung awal yang sudah mencakup "kecukupan informasi yang harus dipenuhi adalah permasalahan (what), tempat kejadian/lokus (where), waktu kejadian/tempus (when), pihak yang bertanggung jawab (who), penyebab terjadinya permasalahan (why), bagaimana permasalahan terjadi (how) yang keseluruhan mempunyai keterkaitan dan masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi kalimantan barat" sebagaimana yang ditentukan, namun sayangnya oknum admin lapor! pemprov. kalbar yang tidak kompeten langsung mengarsipkan tanpa mencermati kronologis dan bukti yang sudah dilampirkan, dan parahnya lagi langsung ditutup/diarsipkan tanpa menunggu kelengkapan bukti/dokumen kalaupun memang itu masalahnya, sebagaimana biasanya	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

					laporan lainnya, saya harap oknum admin lapor! pemprov. kalbar ini diberikan edkasi dan/atau pembinaan agar lebih kompeten lagi. terima kasih. salam lapor!		
195	29 Agustus 2024	Zainal Aripin	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ektp Tidak Online	Sepertinya ektp saya tidak terdaftar.	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
196	26 Agustus 2024	Ni Luh Putu Oka Andriani	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Tolong Segera Investigasi! Penyalahgunaan Wewenang Perangkat Desa Kuwum, Menyerobot Lahan Milik Warga Nya Dan Membohongi Warga Dg Surat Pernyataan Yg Merugikan Korban Penyerobotan Lahan	Tmpat kejadian banjar kuwum desa kuwum kecamatan mengwi badung bali waktu kejadian 12juli 2024 tlong investigasi ksini para perangkat daerah dan bendesa adat banjar kuwum, serta anggota dprd badung i wayan regep, krn off the record ini adalah proyek dr i wayan regep dulunya, baru digarap sekarang. mereka memberikan izin kepada pihak lain utk mengambil lahan pribadi warga(sawah warga) utk dijadikan jalan aspal, padahal mereka tidak ada pemberitahuan sebelumnya, main serobot serobot saja, banyak lahan kami diambil. saya sudah lapor bpn terkait msalah tanahnya, sekarang sy mempermalsahkan penyalahgunaan jabatan dan wewenang para perangkat desa dan juga bendesa adat kuwum, karena mereka mungkin	Selesai	1. Landasan aturan antara lain: a. Berdasarkan Pasal 51 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, dan perangkat desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya. b. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud

				<p>sudah dapet uang dulu sebagai pelicin, mereka seenaknya saja mengizinkan pihak lain mengambil lahan sawah warga utk diaspal, pdhal sblm di serobot belum ada perjanjian atau omongan lahan kami akan diambil. mereka main ambil lahan kami karena tau kami warga tdk melek hukum dan tdk berani melawan, barulah stelah kami lapor bpn , ada datang tim dr kecamatan , namun tim itu hanya datang ke kantor desa cuma nanya ke perangkat desa saja, ya jelas jawaban dari si pelaku akan berbeda dgn jawaban kami warga sbagai korban. tim itu datang hanya bertanya dan konfirmasi ke perangkat desa tanpa melihat kondisi korban yg diambil tanahnya dgn paksa dan tanpa izin. pas tim dr kecamatan datang(tim datang stelah kami lapor ke bpn) para perangkat desa ngakunya sudah membuat kesepakatan dgn kami kalau kami akan diberi ganti rugi, pdhal , barulah stelah tim itu datang, beberapa hari kemudian baru kami dibuatkan surat pernyataan, yg mana suratnya itu sangat merugikan kami, kami disuruh tnda tangan surat yg isinya kami rela melepas tanah kami, tidak ada kalimat ganti rugi dan tdk ada kalimat &quot;ke depannya perangkat desa tdk akan menyerobot lahan warga tanpa izin lagi&quot;. beberapa warga yg tdk melek hukum akhirnya tnda tangan krn mereka didatangi, ditekan dan disuruh tanda tangan saat itu jg dan kata ganti rugi hanya berupa</p>	<p>dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.</p> <p>c. Berdasarkan Pasal 115 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten meliputi melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa serta melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti tugas, hak, wewenang dan kewajiban aparatur pemerintah Desa.</p> <p>d. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 154 bahwa camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa melalui fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa.</p> <p>2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal Pembinaan dan Pengawasan secara berjenjang yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Kabupaten sampai kepada camat. Selanjutnya Saudara dapat bersurat/melaporkan kepada Bupati melalui Camat terkait aparatur Pemerintah Desa yang menyalahgunakan wewenang. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>lisan. kami dimanipulasi, dan ditekan utk tanda tangan saat itu jg. satu minggu lalu ada warga lain jg yg lahannya kembali di serobot tanpa izin jg, dsni perangkat desa dan bendesa adat semena mena sekali. sudah smua orang tau dsni, bendesa adat kuwum dan perangkat desa saling terkait memberikan izin kepada pihak lain utk mengambil lahan warga tanpa izin, dan mohon ditindak lanjuti, tlong investigasi dan lakukan perombakan perangkat desa itu agar kejadian sperti ini yg sngat merugikan warga tdk trjadi lagi. kami sangat stresss dan depresi, krn sangat banyak lahan kami diambil tanpa izin. kalau kalian hanya nanya dr perangkat desa, mereka akan ngaku sudah membuat kesepakatan, namun tanyakan ke korban smua korban, apa benar sudah dibayar, atau ganti rugi itu hanya kata kata saja? ini kami lampirkan suratnya, dan tlong saya dsni mempermalsahkan penyalahgunaan wewenang dan jabatan perangkat desa dan bendesa adat kuwum yg terus terusan gak kapok trus mengambil lahan warga tanpa izin, kami ditekan dan dianggap remeh. tlong tindaklanjuti apakah ada jg keterkaitan iwayan regep selaku dprd badung dengan penyerobotan ini. karena ini sudah jd rahasia umum di wilayah kami i wayan regep ini mengetuai hal hal ilegal namun dilakukan diam diam dan menekan warga agar tdk bicara.kami mempermalsahkan penyalahgunaan</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>wewenang perangkat daerah dan memanipulasi warga yg tdk berani dg mereka utk tanda tangan surat pernyataan yg merugikan kami, kami uda lapor bpn terkait lahan namun utk penyalahgunaan gunakan wewenang kami lapor kesini, tlong nama saya jagan disebutkan ya, nanti bahaya utk keamanan sy</p> <p>rugi kami lapor kmarin, tim dr kecamatan yg investigasi hanya nanya ke perangkat desa tanpa melihat lebih dalam lg masalahnya. setelah tim datang (tim hanya nanya ke perangkat desa kemudian pergi dari sini) setelah tim itu pergi,perangkat desa buru buru buat surat pernyataan utk kami tandatangani. kami para korban ditekan utk segera tanda tangan surat pernyataan persetujuan melepas lahan dibawah tekanan dan iming iming ganti rugi secara lisan. tlong, ditindak lanjuti perangkat desa smuanya yg ada di kuwum, rombak saja krn masa jabatannya ada yg seumur hidup, kami tdk tahan terus mengalami kerugian secara mental dan materiil. kerja yg benar. tegakkan keadilan utk warga kami dsni. kjadian pwnyalah gunakan wewenang sperti ini tdk hanya terjadi skali ini saja, sudah berkali kali. tp dulu kami tdk tau harus melapor kmana.</p> <p>selain itu, 26 agustus ini jg telah terjadi kecelakaan kerja disini saat dilakukannya proses pembuatan jalan aspal, benar benar problematik pembuatan jalan ini. mohon diusut tuntas.</p>	
--	--	--	--	---	--

197	29 Agustus 2024	ADI	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Oknum Admin Lapor! Pemprov. Kalbar Tidak Kompeten!	Oknum admin lapor! pemprov. kalbar tidak kompeten! tanggal 15 agstus 2024 saya menyampaikan pengaduan berjudul "pengaduan oknum dan kinerja inspektorat provinsi kalbar" dengan tracking id : #8093530 yang sudah lengkap berisi kronologis disertai bukti pendukung awal yang sudah mencakup "kecukupan informasi yang harus dipenuhi adalah permasalahan (what), tempat kejadian/lokus (where), waktu kejadian/tempus (when), pihak yang bertanggung jawab (who), penyebab terjadinya permasalahan (why), bagaimana permasalahan terjadi (how) yang keseluruhan mempunyai keterkaitan dan masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi kalimantan barat" sebagaimana yang ditentukan, namun sayangnya oknum admin lapor! pemprov. kalbar yang tidak kompeten langsung mengarsipkan tanpa mencermati kronologis dan bukti yang sudah dilampirkan, dan parahnya lagi langsung ditutup/diarsipkan tanpa menunggu kelengkapan bukti/dokumen walaupun memang itu masalahnya, sebagaimana biasanya laporan lainnya, saya harap oknum admin lapor! pemprov. kalbar ini diberikan edkasi dan/atau pembinaan agar lebih kompeten lagi. terima kasih. salam lapor!	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!
-----	-----------------------	-----	--	---	---	---------	---

198	30 Agustus 2024	Lokomotif Institute	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Laporan Adanya Rotasi Asn Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi Menjelang Pilkada 2024	Assalamu'alaikum wr.wbtering salam juga hormat kepada bapak/ibu sekalian semoga kita semua selalu dalam lindungan allah swt.kami dari lokomotif insitute ingin menyampaikan keresahan dan kegelisahan kami tentang adanya rotasi pegawai di lingkungan pemerintah kota sukabumi yang dilakukan oleh pejabat walikota sukabumi menjelang pilkada 2024. tentu hal ini menjadi sorotan masyarakat dikarenakan ada kekhawatiran masyarakat terkait rotasi yang terjadi melanggar aturan dan ditunggangi kepentingan politik oleh oknum bakal calon walikota/wakil walikota.terimakasih atas perhatiannya, lebih lanjut izinkan kami mengirimkan file lampiran berisi surat lengkap dari kamsalam hormat,lokomotif institute	Selesai	Yth. Pelapor, Silahkan melampirkan daftar nama pergantian/pengisian jabatan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang dilakukan oleh Penjabat Walikota Sukabumi pada bulan Mei 2024. Terima kasih.
199	30 Agustus 2024	Maureen Angelica	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pertanyaan Berkaitan Dengan Formasi Cpns Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024	Kepada yth.bapak/ibu tim penerimaan cpns kementerian dalam negeri republik indonesiadengan hormat, selamat siang, saya maureen angelica, calon peserta cpns yang berencana untuk mendaftar pada kementerian dalam negeri terkhususnya pada formasi jabatan fasilitator pemerintahan, penata kelola pemerintahan dan pamong pemerintahan. saya melihat adanya kualifikasi pendidikan yang tertera dalam surat edaran tersebut salah satunya adalah div- administrasi pemerintahan daerah. izin bertanya kepada bapak/ibu bahwasannya saya merupakan lulusan dari div - administrasi pemerintahan universitas	Selesai	Terima kasih telah menghubungi kami. Terkait pertanyaan yg saudara sampaikan, program studi D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah dapat dilamar oleh D-IV Administrasi Pemerintahah. Terima kasih.

					<p>padjadjaran dengan nomenklatur jurusan administrasi pemerintahan, apakah dengan adanya perbedaan nomenklatur jurusan tersebut saya diperbolehkan untuk mendaftar pada posisi fasilitator pemerintahan, penata kelola pemerintahan dan pamong pemerintahan kemendagri. saya izin menginformasikan bahwa dari jurusan saya telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa pada keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tertera bahwa kualifikasi pendidikan untuk formasi fasilitator pemerintahan, penata kelola pemerintahan dan pamong pemerintahan kemendagri. salah satunya adalah dari lulusan d-4 (diploma-empat) administrasi pemerintahan. mohon arahnya bapak/ibu dari kementerian dalam negeri, apakah saya diperkenankan untuk mendaftar pada formasi antara fasilitator pemerintahan, penata kelola pemerintahan dan pamong pemerintahan kemendagri, dan apakah saya perlu melampirkan surat edaran dari jurusan. mohon maaf apabila terdapat salah kata bapak/ibu.terimakasih.hormat saya,maureen angelica l.</p>		
200	30 Agustus 2024	Muhammad Sabiq Balya	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Tanya Seputar Cpns Kemendagri 2024	Assalamualaikum, selamat siang.. mohon maaf kak mengganggu waktunya, mau bertanya soal recruitment cpns 2024 kemendagri,	Selesai	Terima kasih telah menghubungi kami. Terkait pertanyaan yg saudara sampaikan, program studi S1 Hukum dapat dilamar oleh

					saya mau melamar untuk formasi analis hukum dengan kualifikasi s-1 hukum, namun ijazah saya tertulis s1 hukum tata negara.mohon pencerahannya kak, kira bisa apa tidak untuk melamar pada posisi tsb? takutnya saat nanti verifikasi tidak lolos hanya karena tidak sesuai program studi yang disebutkan.terimakasih sebelumnya kaka.--muhammad sabiq balya, sh.		S1 Hukum Tata Negara. Terima kasih.
201	02 Septem ber 2024	Pebriany Mangunselle	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	No Nik Yang Tertukar	Selamat pagi admin, disini saya mau melaporkan tentang no nik yang saya pakai sekarang tertukar dengan no nik yang di pakai oleh adik kandung saya, kesalahanya ada di tanggal lahir dan tahun lahir, dan saya memohon kepada admin untuk membantu karena saya adalah pns, nantinya akan bermasalh didata saya. terima kasih	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi petugas Dukcapil yang ada di Kecamatan atau Dinas untuk proses data tersebut. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
202	03 Septem ber 2024	Hendra Eko Setiawan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Informasi Persyaratan Untuk Mencetak Ulang Akta Kelahiran Yang Hilang	Selamat malam, saya butuh informasi persyaratan yang dibawa untuk mencetak ulang akta kelahiran yang hilang. dan untuk proses mencetak ulang akta kelahirannya memakan waktu berapa lama? dikarenakan rumah saya jauh dari kantor disdukcapil kampar. terimakasih sebelumnya.	Selesai	Kami sampaikan bahwa apabila akta kelahirannya hilang maka dapat diterbitkan kembali di Dinas Dukcapil Kab/Kota tempat domisili sesuai alamat KK, dengan persyaratan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi akta kelahiran yang hilang tersebut untuk memudahkan pencarian arsip/register akta kelahirannya. Apabila terdapat kendala, Saudara dapat menghubungi Call Center Dinas Dukcapil Kab. Kampar 085280807098 selengkapnya dapat dicek di website Dinas Dukcapil Kab. Kampar. Demikian, terima kasih.
203	02 Septem ber 2024	Nazwa Rahma Utami Somantri	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nik Dan No Kk Tidak Sesuai	Saya mengisi form sscasn tetapi nik dan no kk tidak sesuai	Selesai	Yth Pelapor Mohon dikirimkan foto KK lengkap atau KTP saudara untuk kami cek disistem. Berdasarkan data yang dikirimkan tersebut kami akan memastikan apakah data

							Saudara sesuai atau tidak dengan data di sistem Dukcapil. Terima kasih
204	02 Septem ber 2024	Wahyu Putri Fajar Rahmalinda	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Penulisan Alamat Ktp	Selamat malam bapak/ibu admin, mohon maaf mengganggu waktunya. saya wahyu putri fajar rahmalinda dengan nik saya izin konfirmasi mengenai alamat yang tertera di ktp saya. disini tertulis blok d n0. 4 dimana pada bagian "n0. 4" terlihat seperti ditulis dengan menggunakan angka 0 (nol) bukan huruf o. berikut saya lampirkan foto ktp saya. apakah benar demikian? apakah data alamat saya di sistem dukcapil ditulis menggunakan angka bapak/ibu? karena saya perlu alamat sesuai ktp yang terekam dalam sistem. mohon arahan dan informasinya bapak/ibu. terima kasih.	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi petugas Pelayanan Dukcapil Setempat dengan membawa dokumen kk serta ktp (tidak dapat diwakilkan) untuk register Identitas Kependudukan Digital/IKD. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Dukcapil Prima Indonesia Maju Jangan lupa bintangnya...
205	21 Septem ber 2024	Pirman Ervana Se	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Ktp	Cek#ktp#	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk mendatangi petugas Pelayanan Dukcapil Setempat dengan membawa dokumen kk serta ktp, disarankan untuk register Identitas Kependudukan Digital (IKD). (tidak dapat diwakilkan) Terima kasih, salam sehat dan bahagia Dukcapil Prima Indonesia Maju Jangan lupa bintangnya...
206	20 Septem ber 2024	Aqil Razan Ashshidiq	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Informasi Nik	Saya ingin mengecek informasi dari nik berikut	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP EI) untuk

							memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
207	20 Septem ber 2024	Puji Astuti	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Akta Kelahiran Anak	Mohon tindak lanjut dari permohonan pembuatan akta kelahiran anak belum memiliki nik via aplikasi ikd, atas nama arsyila almahira anak dari arli dan puji astuti. saya mendaftar dari tanggal 12/09/2024 sampai saat ini 20/09/2024 belum ada progres nya	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (KK dan KTP E kedua orang tuanya) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
208	30 Septem ber 2024	Tony Mr	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pemberlakuan Permendagri	Di indramayu kapan mulai pemberlakuan permendagri no. 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas asn?	Selesai	Yth. Pelapor. Terimakasih atas laporan yang disampaikan. Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 agar Pemerintah Daerah mempedomani peraturan dimaksud. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah
209	30 Septem ber 2024	Nurhalima	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Anggota Keluarga	Cek anggota keluarga nomor kartu keluarga 6472020701140001	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
210	30 Septem	Fauzi Arif Rahman Hakim	Pengaduan Tidak	Keterangan Sk Kemendagri	Apakah pengurusan mutasi kalo sudah menerima sk kemendagri di bpkad tempat mutasi sudah bisa	Selesai	Yth. Pelapor. Terkait SK Mutasi Menteri Dalam Negeri yang sudah terbit agar Pemerintah Daerah

	ber 2024		Berkadar Pengawasan		pengajuan gaji pindah ke daerah tempat pindah, di bpkad kabupaten tempat mutasi nya di persulit dan banyak alasan padahal sudah bekerja sesuai sk mutasi kemendagri.		Penerima dan Asal agar melaksanakan Surat Keputusan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terimakasih, Ditjen Otonomi Daerah
211	01 Oktober 2024	Nellysia Bunga Cahyani	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mengganti Foto Ktp Yang Rusak	Bagaimana cara mengganti foto ktp yang rusak? dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mengganti foto ktp	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas laporan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait laporan Saudara, kami menyarankan agar Saudara mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili Saudara untuk mengajukan permohonan penerbitan kembali KTP-el yang rusak (foto Buram/rusak), dengan membawa kelengkapan persyaratan berupa KTP-e Saudara yang sudah rusak/buram tersebut. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memproses penerbitan kembali KTP-el Saudara dan akan menarik KTP-el Saudara yang sudah rusak. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab laporan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapo!
212	23 Oktober 2024	002_Yusron Fadhli	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Oknum Pemalsuan Dokumen	Di aplikasi sosial media instagram, akun saya tiba-tiba diikuti oleh akun yang terindikasi melayani pemalsuan dokumen hanya berdasarkan pemesanan melalui komunikasi online. padahal secara resmi, memperbarui ktp saja harus ke kantor kecamatan daerah asal. mohon tindak lanjut pihak berwenang untuk	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait pengaduan Saudara, kami mengucapkan terima kasih atas kepada Saudara yang sduah berkenan peduli dengan pelayanan adminsitasi kependudukan, khususnya dalam mencegah terjadinya pemalusan dokumen

					menggali dan memberantas pemalsuan ini. terima kasih.		kependudukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi dari Saudara akan kami tidaklanjuti. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Laport!
213	21 Oktober 2024	Sri Rahayu Faradilla	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Data Adminduk	Mohon untuk cek data nik 7313086404980001	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
214	19 Oktober 2024	Muhammad Slamet Budiharsana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nik Tidak Valid Dukcapil	Assalamualaikum.. selamat malam, saya seorang guru, saya mau bertanya tentang valid dukcapil. data nik saya di kementerian pendidikan dikatakan tidak valid dukcapil, padahal data nik sudah sesuai dengan e-ktp dan kk. saya pernah hubungi pihak kementerian pendidikan, jawabannya disuruh hubungi dukcapil untuk penyesuaian / pastikan dukcapil setempat datanya sudah terhubung dengan dukcapil pusat karena verval ptk menarik data dari dukcapil pusat. bagaimana cara mengatasi masalah tersebut ? sehingga datanya bisa	Selesai	Yth Pelapor Berdasarkan sistem kami saat ini, data Saudara adalah sebagai berikut: NIK: NOKK: Nama: MUHAMMAD SLAMET BUDIHARSANA TTL: Data Saudara ada disistem Dukcapil dan tidak ada masalah. Dipastikan kembali pada saat mengurus vervalnya. Terima kasih

					<p>sinkron. berikut saya kirim data-data saya dan jawaban dari kementerian pendidikan. nama : muhammad slamet budiharsana nik : 3 6 no. kk : 3 saya ucapkan terima kasih atas bantuannya.</p>		
215	25 Oktober 2024	Muhammadd Nazar	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Surat Permohonan Penundaan Kegiatan Debat Paslon Gub-Wagub Aceh Kepada Kip Aceh	<p>Yth. menteri dalam negeri republik indonesia di jakartaassalamualaikum wr. wb sehubungan dengan surat kami kepada komisi independen pemilihan (kip) aceh tertanggal 23 oktober 2024 dan telah kami sampaikan kepada yang bersangkutan maupun pihak-pihak terkait lainnya di aceh tentang permohonan kami kepada yang bersangkutan untuk dapat menunda sementara kegiatan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur aceh dikarenakan adanya permohonan kami ke mkri terjadi sengketa pemilihan melawan kip aceh maka ikut kami kirimkan pula tembusannya kepada bapak. demikian tembusan ini kami sampaikan. terima kasih muhammad nazar dan zulhadi</p>	Selesai	Yth Pelapor, kami sampaikan terimakasih atas tembusan laporan anda. Salam Tim SP4N LAPOR
216	25 Oktober 2024	Yadhe Hafidz	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mohon Dibantu Untuk Tidak Diblokir Adminstrasi Tanah/Pemukiman Yang Berdampak Aturan Mendagri 52 Tahun 2020.Menyataka	<p>Pontianak, 23 oktober 2024dengan hormatselamat siang bapak/ibu pejabat yang berwenang dikantor kementerian dalam negri.mohon kami dari kalimantan barat kota pontianak.nama saya riayadi ketua rt.06 rw 08 kelurahan parit mayorkecamatan pontianak timurkota pontianak.mohon ditindak lanjuti,karena ini sudah buat resah</p>	Selesai	laporan saudara terhadap permendagri nomor 52/2020 masih dalam pengkajian oleh tim PBD Pusat, mengingat sebentar lagi akan dilangsungkan pilkada maka pembahasan terhadap permendagri tersebut akan dilaksanakan setelah pilkada dengan mengundang pemprov kalbar, pemkot pontianak dan pemkab kubu raya

				<p>n Wilayah Tersebut Sudah Ada Kesepakatan Antara Kota Dan Kabupaten</p>	<p>dan merugikan warga yang ada dilingkungan kami,untuk pengurusan surat menyurat di kantor atr bpn kota pontianak,status tanah kami masih diblokir oleh pihak mendgri.mohon wilyah kami sudah tidak ada gejolak lagi,yang disebabkan aturan 52 tahun 2020.mohon sekiranya kesepakatan ini sudah di tanda tangani oleh ke dua pihak dan disaksikan oleh gubenu kalimantan barat. sekiranya kami dikembalikan kepada hak-hak kami sebagai warga negara yang sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.sekian dan terima kasih.mohon segera bapak/ibu pejabat untuk revisi permendgri 52 tahun 2020. yang sudah disepakati pengembalian wilayah supaya tidak terjadi hal yang tidak di inginkan .ketua rt 006/008kel parit mayorkec pontianak timurr i a y a d i</p>		
217	24 Oktober 2024	Muhammad Reyhan	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ktp	Apakah ktp saya sudah jadi? nik :	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan bahwa, hasil pengecekan pada Database kependudukan KTP-el Saudara telah selesai dicetak (card Printed) pada tanggal pada tanggal 11 September 2024. Silahkan Saudara mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili Saudara untuk mengambil KTP-el tersebut di petugas pelayanan</p> <p>Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat</p>

							memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!
218	31 Oktober 2024	Yogie Onasis	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Gangguan Website Sipd Kemendagri Penatausahaan	Izin lapor, kami dari dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten muara enim ingin melaporkan kendala website sipd kemendagri penatausahaan yang sulit di akses berikut kami sertakan foto kendala nya. :	Selesai	selamat siang Bapak/Ibu, terkait permasalahan diatas mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dikarenakan jaringan. terima kasih
219	28 Oktober 2024	Zemi Hardiyanto	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kartu Keluarga Hilang	Jika kartu keluarga hilang kemana harus mengurusnya dan apa persyaratan yang harus di penuhi. terima kasih	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Sesuai dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 disebutkan bahwa persyaratan penerbitan Kartu Keluarga (KK) akibat hilang adalah dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, menunjukkan KTP-el, dan mengisi Formulir Layanan Peristiwa Kependudukan pada Dinas Dukcapil sesuai domisili saudara. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapor!
220	28 Oktober 2024	Abu Tholib	Aspirasi	Ide Dan Gagasan Untuk Membawa Arah Perubahan Indonesia	Assalamu'alaikum wr.wb mohon maaf sebelumnya bapak/ibu, saya ingin menyampaikan aspirasi. kalau ada salah kata mohon dimaafkan, saya ini hanya orang kecil anak dari seorang petani. berikut ini aspirasi saya: pertama; sebaiknya setiap desa memiliki koperasi pertanian yang mana jual beli hasil tani dan	Selesai	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjuti di SP4N LAPOR!

					<p>kebutuhan pertanian. mengingat saat musim panen tiba harga hasil pertanian murah dan sebaliknya. memang itu semua hukum permintaan setidaknya dengan adanya koperasi pertanian bisa menstabilkan harga hasil pertanian. para petani itu pekerja kasar, banting tulang hasilnya pun tidak seberapa masih kalah dengan karyawan pabrik sehingga para pemuda memilih bekerja di pabrik daripada menjadi petani.</p> <p>koperasi pertanian tersebut nantinya para karyawannya dari pemuda-pemudi karangtaruna desa yang bersangkutan sehingga dapat mengurangi pengangguran.</p> <p>mengingat karangtaruna kurang aktif, biasanya karangtaruna aktif itu di saat meramaikan hari kemerdekaan saja seperti mengajukan proposal bantuan untuk acara memperingati kemerdekaan, melakukan lomba-lomba dan lain sebagainya selebihnya setelah itu tidak ada lagi kegiatan.</p> <p>harapan saya karangtaruna itu aktif di masyarakat begitu juga peran koperasi seperti jamannya pak soeharto.</p> <p>secara operasional untuk daerah pedesaan yang mana mayoritas petani di dirikan koperasi pertanian yang mana memiliki tempat penggilingan padi sehingga para petani menjual hasil panen padi ke koperasi pertanian desa tersebut dan juga hasil panen lainnya seperti kedelai, kacang hijau, jagung, kangkung, buah-buahan dan lain-lain.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>untuk daerah perkotaan di dirikan koperasi pertanian yang mana untuk menjual hasil panen para petani yang didistribusikan dari koperasi pertanian desa. kurang lebih manajemennya seperti minimarket.</p> <p>sebelumnya mohon maaf ya bapak/ibu, kebanyakan para petani merasakan seperti harga dipermainkan oleh para tengkulak disaat musim panen tiba. saya sebagai anak dari seorang petani sangat merasakan hal tersebut.</p> <p>kata orang tua saya petani makmur terjadi pada masa kepemimpinan presiden soeharto. harga barang kebutuhan pokok di jaman orde baru relatif stabil. mungkin salah satu faktornya karena adanya pengumuman harga sembako di seluruh indonesia melalui rri yang disampaikan oleh menteri penerangan ternama jaman itu, harmoko.</p> <p>kedua; adanya program bantuan ternak untuk petani berupa kambing karena menjadi petani itu lebih baik punya rojokoyo (hewan ternak) hal itu karena jika kita tidak mempunyai rojokoyo hanya mengandalkan menjadi petani saja tanpa bekerja lainnya uang kita akan muter saja untuk kebutuhan keseharian kita dan juga untuk modal bertani lagi sehingga kita tidak memiliki tabungan. petani yang mempunyai rojokoyo (hewan ternak) itu sebagai usaha sampingannya petani. nah.. petani yang mempunyai rojokoyo (hewan ternak) inilah kita anggap sebagai</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>tabungannya petani. maksud saya disini bantuan langsung dari pemerintah pusat yang langsung disalurkan kepada pemerintah desa sehingga petani miskin tidak perlu repot-repot mengajukan proposal kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan tingkat kabupaten. menurut saya jika hal itu direalisasikan akan sangat membantu perekonomian para petani miskin. terlebih saat para petani gagal panen mengingat sekarang ini cuacanya ekstrem. ketiga; biaya untuk modal bertani itu mahal seperti biaya untuk membeli pestisida, pupuk dan juga bibitnya. memang pupuk sudah ada subsidi pemerintah distribusinya juga sudah bagus melalui kelompok tani begitu juga sudah ada bibit gratis dan juga pestisida gratis oleh pemerintah hal itu juga sangat bagus. besar harapan saya pestisida disubsidi oleh pemerintah karena rata-rata harga pestisida yang dibutuhkan para petani itu tergolong mahal. atas perhatian bapak/ibu, saya mengucapkan terima kasih.</p>		
221	05 November 2024	Selamatkan Demokrasi Halteng	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pelanggaran Netralitas Asn Pejabat Bupati Halmahera Tengah	<p>Kepada yth. bapak menteri dalam negeri republik indonesia di - jakarta dengan hormat, melalui surat ini, kami sampaikan laporan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn) yang dilakukan oleh pejabat bupati halmahera tengah, bapak bahri sudirman. berdasarkan hasil</p>	Proses	<p>Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!</p>

					<p>pengamatan dan informasi yang kami terima, terdapat sejumlah indikasi kuat bahwa yang bersangkutan telah melanggar ketentuan netralitas asn sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, serta peraturan menteri panrb nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan netralitas asn.</p> <p>adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat bupati halmahera tengah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1.dugaan keterlibatan aktif dalam kegiatan politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada 2024 di halmahera tengah.2.penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan politik salah satu pihak.3.pemberian arahan langsung kepada asn di lingkungan pemerintahan halmahera tengah untuk ikut serta dalam mendukung salah satu pasangan calon. <p>tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip netralitas asn yang wajib menjunjung tinggi profesionalitas tanpa terlibat dalam kepentingan politik praktis.</p> <p>bersama dengan surat ini, kami juga melampirkan bukti-bukti terkait yang mendukung laporan ini, termasuk dokumentasi foto, video, dan testimoni dari saksi-saksi yang dapat menguatkan temuan tersebut.</p> <p>kami memohon kepada bapak menteri</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>dalam negeri untuk menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjaga netralitas ASN dan menciptakan penyelenggaraan pilkada yang adil dan berintegritas. demikian surat ini kami sampaikan. atas perhatian dan tindak lanjut dari bapak menteri, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>hormat kami, [selamatkan demokrasi halmahera tengah]</p> <p>kronologis dugaan pj. bupati bahri sudirman dalam dukungan politik terhadap paslon ikram-ahlan di pilkada halmahera tengah 2024 dan pelanggaran undang-undang dalam proses pilkada halmahera tengah 2024, terdapat dugaan bahwa penjabat (pj.) bupati halmahera tengah, bahri sudirman, secara aktif memberikan dukungan politik kepada pasangan calon (paslon) ikram malan sangaji-ahlan. beberapa tindakan yang dilakukan oleh pj. bupati tersebut dinilai melanggar asas netralitas, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat pemerintahan. berikut adalah kronologi dugaan pelanggaran serta undang-undang yang dilanggar:</p> <p>kronologi dugaan dukungan politik pj. bupati bahri sudirman pembiaran kadis pmd menggunakan foto ikram malan sangaji (mantan pj bupati halteng) dalam kegiatan resmi pemda mustami jamal, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>(pmd) menggunakan foto ikram malan sangaji, mantan penjabat bupati yang kini mencalonkan diri sebagai bupati, dalam berbagai kegiatan resmi pemda halmahera tengah. ini menimbulkan dugaan bahwa pj. bupati membiarkan penggunaan aset pemerintah untuk mendukung calon tertentu.</p> <p>pembiaran camat gebe mengikuti kampanye paslon ikram-ahlan usba kamaraja, camat gebe secara terbuka mengikuti kampanye paslon ikram-ahlan tanpa ada tindakan dari pj. bupati. keterlibatan seorang asn dalam kegiatan politik jelas melanggar aturan netralitas asn.</p> <p>pemberian fasilitas pemda untuk deklarasi paslon ikram-ahlan pemerintah daerah diduga menyediakan panggung, tenda, dan tempat untuk acara deklarasi paslon ikram-ahlan. penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan politik, termasuk penggunaan mobil dinas (bukti terlampir). ini memperkuat dugaan bahwa pj. bupati mendukung pasangan tersebut.</p> <p>penggunaan pendopo pemda untuk kegiatan paslon ikram-ahlan pendopo milik pemerintah daerah digunakan untuk acara paslon ikram-ahlan, yang seharusnya hanya digunakan untuk kegiatan resmi pemerintahan. ini menjadi indikasi bahwa aset pemerintah digunakan untuk kepentingan politik.</p> <p>dugaan pemberian bantuan perumahan dengan imbalan dukungan politik</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>ada laporan bahwa bantuan perumahan dari pemerintah diberikan kepada warga dengan syarat mereka harus mendukung paslon ikram-ahlan. jika benar, ini merupakan upaya manipulasi melalui program bantuan sosial untuk keuntungan politik. pengalihan wewenang pengguna anggaran dari kadis pendidikan kepada pj. sekda</p> <p>pj. bupati mencabut wewenang kepala dinas pendidikan (ridwan seliden) sebagai pengguna anggaran dan mengalihkan kepada pj. sekda. tindakan ini diduga dilakukan untuk mengontrol anggaran guna kepentingan politik paslon ikramahlan. friksi internal pimpinan perangkat daerah</p> <p>pj. bupati bahri sudirman diduga menciptakan friksi di kalangan pimpinan perangkat daerah (pd). jika ada pimpinan pd yang tidak sejalan dengan arah dan dukungannya terhadap paslon ikram malan sangaji-ahlan, mereka tidak akan dilibatkan dalam kunjungan kerja, baik di dalam maupun di luar daerah. tindakan ini menimbulkan keresahan dan perpecahan di dalam birokrasi halmahera tengah, mengganggu jalannya pemerintahan yang seharusnya netral dan profesional.</p> <p>mutasi jabatan kepala sekolah berdasarkan nomor surat 821.2/kep/193/2024, di kecamatan pulau gebe, kepala sekolah sd inpres sanafi, nurhijah abdul rahman,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					dipindahkan ke sd negeri palo dan posisinya digantikan oleh faujiya ilyas. ancaman di posko paslon suaib sudirman, yang merupakan saudara kandung dari pj. bupati halmahera tengah bahri sudirman, melakukan pengancaman di posko pasangan calon bupati dan wakil bupati, drs. edi langkara dan abdurrahim odeyani, pada tanggal 4 november 2024. bahkan dari video yang tersebar suaib sudirman, mengancam edi langkara dan abd rahim odeyani sebagai calon bupati dan calon wakil bupati halmahera tengah. serta mengancam memboikot kampanye edi langkara dan abd rahim odeyani di kota weda.		
222	01 November 2024	Adhiyasa Maliki S	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Keikutsertaan Kepala Desa Dalam Mengatur Tim Sukses Calon Bupati Sidoarjo	Kepala desa bangah dengan nama bambang handoko, disinyalir terlibat penunjukan tim sukses daripada bupati sidoarjo dalam hal ini cabup cawabup pasangan subandi-mimik. tim sukses yg terkait dengan turut campurnya kepala desa bangah sebagai tim sukses adalah sdr. sutrisno enggal warga rw.01 desa bangah sebagai koordinator desa tim pemenangan pasangan subandi-mimik. tolong untuk segera ditindak bagi tim koordinator pemenangan di desa bangah atas nama sdr sutrisno enggal. tag. #kpu. #panwaslu. #intelkampolessidoarjo	Selesai	Yth Pelapor, agar pengaduan dapat ditindak lanjuti, silahkan melengkapi sedikitnya informasi sebagai berikut yaitu: a. substansi Pengaduan; b. pihak yang terlibat; c. waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan d. bukti pendukung. Terimakasih. Salam SP4N-LAPOR!
223	13 November 2024	Alexander	Pengaduan Berkadar Pengawasan	5 Tahun Mencari Keadilan Dengan Hasil Sia-Sia	Yang saya hormati bapak presiden dan wakil presiden republik indonesia, lapor admin saya sedang mengalami masalah kepastian hukum.pertama: pada tanggal 29 september 2020	Selesai	Yth. Pelapor, agar pengaduan dapat ditindaklanjuti, silahkan merincikan informasi berikut : a. identitas Pengadu; b. substansi Pengaduan;

					<p>berdasarkan sk bupati belitung timur nomor 188.45-576 tahun 2020 tentang penurunan pangkat selama 3 tahun saya mendapatkan sk tersebut karena saya dituduhkan mangkir kerja hukuman itu telah saya jalani beserta anak2 turunan dari sanksi hukuman disiplin tsb.kedua:berdasarkan surat nomor 800/4001/dkppkb-1/ix/2020 tanggal 14 september 2020 tentang mediasi yg dilakukan pada hari senin 15 september 2020 dimana saya dimintai hadir dan dalam pertemuan tsb saya dipaksa untuk mau berdamai dan diancam akan dipecat jika saya menolak berdamai oleh mantan atasan saya yg dimana penolakan saya tsb karena ucapan kasar mantan atasan saya di puskesmas manggar kabupaten belitung timur yang mengatakan saya adalah &quot;anjing&quot; (bukti rekaman vidio ada)ketiga: pada saat mantan atasan saya mengatakan hal kasar tsb beliau menyampaikan hal yg tidak pernah saya sadari sebelumnya terkait maksud dari sanksi disiplin hukuman turun pangkat yang saya dan isteri jalani, dimana beliau menyampaikan saya akan dipecat bupati karena dulu pernah melaporkan bupati melalui kanal lapor.go.id (mutasi sepihak oleh atasan isteri dipuskesmas simpang pesak/status masih cpns kejadian pada tahun 2019)ke empat: pada tanggal 21 april 2022 berdasarkan surat keputusan nomor 188-45-312 tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan</p>	<p>c. pihak yang terlibat; d. waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan e.seluruh bukti. Terima kasih. Salam Tim SP4N-LAPOR!</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>hormat tidak atas permintaan sendiri (dimana saya dituduhkan mangkir kerja) yang mau saya tanyakan apakah benar dari hukuman disiplin yg saya dan isteri alami saat ini adalah sakit hati bupati belitung timur karna pernah dilaporkan melalui kanal lapor.go.id? bila dibutuhkan saya bersedia mengirim bukti: pertama : rekaman suara pernyataan kepada bkd pada tanggal 14 september 2020 yg dimana saya dipaksa harus berdamai dalam istilah &quot; mereka jangan langsung mati, pingsan dulu baru kita makan-makan&quot; kedua: vidio pada tanggal 10 september 2020 dimana mantan pimpinan saya menjelaskan secara tegas bahwa saya akan dipecat bupati karna telah melaporkan bupati ke kanal lapor.go.id (perihal mutasi sepihak yg dilakukan atasan isteri, sedangkan status isteri masih cpns) dengan kerendahan hati saya mohon kepada bapak presiden dan wakil presiden untuk dapat membantu kami agar kami mendapat kepastian hukum, sudah hampir 5 tahun kami mencari keadilan tak satupun yg berkenan membantu kami untuk mendapatkan keadilan, terimakasih admin</p>		
224	12 November 2024	Dian Wynda Utami Pello	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nik Ganda	<p>Halo min,</p> <p>mohon pengecekan nik a.n dian wynda utami pello, di dapati nik ganda berdasarkan pemberitahuan pt. nusantara surya sakti. mohon dikonfirmasi min terimakasih</p>	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat memberikan informasi data/dokumen kependudukan kecuali kepada pemilik data tersebut, berkaitan dengan permasalahan saudara

							diatas, kiranya dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib (APH). Terima kasih, salam sehat dan bahagia Dukcapil Prima Indonesia Maju Jangan lupa bintangnya...
225	24 Novemb er 2024	Ferry Prismansyah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Melihat Nomr Kk	Nama; ferry prismansyah nik:	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat memeberikan informasi data/dokumen kependudukan kecuali kepada pemilik data tersebut, berkaitan dengan permasalahan saudara diatas, kiranya dapat melampirkan dokumen kk dan ktp saudara, atau bisa mendatangi loket dukcapil setempat. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Dukcapil Prima Indonesia Maju Jangan lupa bintangnya...
226	18 Novemb er 2024	Rakhmat El Amin Siregar	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Tapanuli Selatan	Pada hari senin tanggal 04 november 2024 sekira pukul 11.00 wib di kantor camat kecamatan sayur matinggi kabupaten tapanuli selatan telah terjadi pelanggaran netralitas asn berupa pengarahan dengan cara mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli selatan nomor urut 01 (h. gus irawan pasaribu, s.e., ak., m.m., ca. & h. jafar syahbuddin ritonga, m.b.a., d.b.a.) yang dilakukan oleh camat kecamatan sayur matinggi (enri cofermi batubara, m.pd.), pejabat lurah kelurahan sayur matinggi (sri yusnita), bersama-sama dengan 15 (lima belas) orang kepala desa se kecamatan sayur matinggi kabupaten	Selesai	Yth. Pelapor, silahkan mencantumkan bukti pendukung agar pengaduan anda dapat ditelaah dan ditindaklanjuti. Terima Kasih.

					<p>tapanuli selatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mukhtar pasaribu (kepala desa lumban huayan) 2. erwan adi pulungan (kepala desa sipange godang) 3. mardin harahap (kepala desa aek badak jae) 4. kumala nasution (kepala desa aek badak julu) 5. zufri sianipar (kepala desa huta pardomuan) 6. sadrak (kepala desa somanggal) 7. suparman (kepala desa aek libung) 8. safri tua (kepala desa silaiya) 9. tagor siregar (kepala desa silaiya tanjung leuk) 10. zulkifli (kepala desa silaiya ulu gading) 11. isnen hasibuan (kepala desa bange) 12. efendi harahap (kepala desa mondang) 13. yusuf pulungan (kepala desa siunjam) 14. mursal nasution (kepala desa sipange julu) 15. jakpar suparto (kepala desa sialang) <p>dengan barang bukti video pada akun facebook parko harahap.</p>		
227	18 November 2024	Rakhmat El Amin Siregar	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Netralitas Pejabat Kepala Daerah Dan Aparatur Sipil Negara	<p>Bahwa pada hari kamis tanggal 31 oktober 2024 bertempat di aula sarasi lantai 3 kantor bupati tapanuli selatan di sipirok. telah terjadi tindakan dan perbuatan pelanggaran terhadap netralitas aparat sipil negara dan pejabat kepala daerah kabupaten tapanuli selatan pada kegiatan rapat koordinasi peningkatan kapasitas</p>	Selesai	Yth. Pelapor, silahkan mencantumkan bukti pendukung agar pengaduan anda dapat ditelaah dan ditindaklanjuti. Terima Kasih.

					<p>kepala satwa pendidikan dasar sekabupaten tapanuli selatan menuju indonesia emas 2045 yang dihadiri dan diikuti oleh</p> <ol style="list-style-type: none">1. pejabat kepala daerah kabupaten tapanuli selatan (rasyid assaf dongoran m.si)2. sofyan adil (sekretaris daerah kabupaten tapanuli selatan)3. arman pasaribu (kadis pendidikan kabupaten tapanuli selatan)4. hamdan zein harahap (asisten 1 pemda tapanuli selatan)5. m. frananda s. e., m. m (kepala bpkpad tapanuli selatan)6. chairul rizal (kepala bappeda tapanuli selatan)7. novita sari wahyuni (kadis perdagangan dan koperasi ukm kabupaten tapanuli selatan)8. ontku muda atas sormin (kadis lingkungan hidup tapanuli selatan) <p>dan dihadiri oleh 287 orang kepala sekolah dasar se-kabupaten tapanuli selatan dan 50 orang kepala sekolah smp se-kabupaten tapanuli selatan dan juga pertemuan tersebut dihadiri oleh syahrul m. pasaribu sebagai narasumber serta kanit tipidkor polres tapsel (sahad mardian harahap). bahwa pada pertemuan tersebut telah diselewengkan menjadi ajang kampanye dan sekaligus melakukan penekanan kepada seluruh peserta yang hadir untuk memilih dan memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli selatan nomor urut 1 (gus irawan pasaribu & jafar syahbuddin</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>ritonga) disertai ancaman yang disampaikan oleh pejabat kepala daerah kabupaten tapanuli selatan rasyid assaf dongoran agar peserta tidak ada yang merekam pembicaraan tentang pengarahannya untuk mendukung dan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 (gus irawan pasaribu & jafar syahbuddin ritonga). apabila pertemuan tersebut ada yang membocorkan akan diperiksa oleh polisi (kani tipidkor sahad mardian harahap).</p> <p>bahwa, pada pertemuan tersebut baru diketahui oleh pelapor pada tanggal 18 november 2024. untuk itu, mohon laporan ini ditindaklanjuti dan diproses sebagaimana aturan yang berlaku.</p>		
228	29 November 2024	BUDIRMAN	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Lapor Kepala Desa	<p>@_12:@gerindra @partaigerindra admin mohon di cek kepala desa kami sudah 2 periode, di lanjutkan kembali istrinya lagi jdi 3 periode,tp di desa kami tidak ada pembangunan sama skli,mohon di tindak lanjuti admin,lokasidesa ulo kecamatan tellusiattinge kabupaten bone sulawesi selatankami sebagai rakyat sudah capek</p>	Selesai	<p>Yth. Pelapor</p> <p>1. Landasan aturan antara lain:</p> <p>a. Berdasarkan Pasal 115 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten meliputi melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa serta melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa</p> <p>b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:</p> <p>a). Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-</p>

						<p>Undang ini.</p> <p>b). Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.</p> <p>c). Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.</p> <p>d). Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang- Undang ini.</p> <p>e). Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>b. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 154 bahwa camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa melalui fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa.</p> <p>2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan kepada Saudara, dalam hal Pembinaan dan Pengawasan secara berjenjang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sampai kepada camat sebagaimana angka 1 dan 2. Selanjutnya Saudara dapat bersurat/melaporkan kepada Bupati melalui Camat terkait masa jabatan kepala Desa.</p>
--	--	--	--	--	--	--

							Demikian disampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
229	29 November 2024	Fachrudin Satari	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Tpp Tidak Cair	Assalamualaikum, perkenalkan saya fachrudin satari,s.pi. saya pns dari pemerintah kabupaten kuningan, ingin bertanya dengan kementerian dalam negeri, apakah tpp untuk pns tiap daerah sudah di atur peraturannya oleh pusat? karena tpp di tempat saya ini sering terlambat, dan untuk saat ini sudah tidak dibayarkan sejak bulan september, mohon minta informasi terkait peraturan yang mengatur pemberian tpp untuk pemerintah daerah, terima kasih	Selesai	Waalaikumsalam Bapak Fachrudin Satari. Sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat kami sampaikan bahwa "Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sehingga terkait dengan besaran perbulan, jumlah anggaran total, kriteria yang digunakan dan jumlah tpp per jabatan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dgn persetujuan DPRD. Adapun Kemendagri dan Kemenkeu memiliki fungsi untuk memverifikasi penggunaan kelas jabatan pada kriteria TPP yang digunakan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anggaran belanja pegawai sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022. Terkait hal tersebut agar dapat dikoordinasikan dan komunikasikan dengan Tim TPP Pemkab Kuningan karena TPP sifatnya tidak wajib dan mungkin ada prioritas lainnya yang perlu diselesaikan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Terimakasih
230	29 November 2024	Kadek Dwitayani	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Sk Pindah Instansi Belum Terbit, Pertek 7 November 2024	Saya a.n kadek dwitayani , nip. melakukan usulan pindah instansi dari pemda kab sumba timur (ntt) tujuan pemda kab buleleng (bali) . pada tanggal 7 november 2024 telah terbit pertek tmt mutasi tanggal 1 desember akan tetapi hingga saat ini sk dari kemendagri belum di terbitkan, mohon	Selesai	berikut saya lampirkan SK Pertek

					solusinya, proses yang seharusnya 15 hari kerja sangat tidak relevan.		
231	04 Desember 2024	Ranamardiana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Aplikasi Sipd	Selamat pagi, saya mau bertanya perihal aplikasi sipd utk penatausahaan keuangan daerah apakah ada tindak lanjutnya, dikarenakan aplikasi tersebut yidak berfungsi dengan maksimal, aplikasi sering terjafi error?	Selesai	selamat pagi Bapak/Ibu mohon maaf atas ketidaknyamanannya, akan kami evaluasi terkait permasalahan tersebut. terima kasih
232	03 Desember 2024	Fajar Halawa	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	E-Ktp	Ktp saya sudah pudar dan tdk jelas, saya lgi d perantauan, saya mau cek e ktp untuk keperluan pribadi saya	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan bahwa penerbitan kembali KTP-el karena rusak di luar domisili bisa dilakukan, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016, Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili karena KTP-el rusak, dengan persyaratan: 1. mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el kepada Instansi Pelaksana di luar domisili; dan 2. melampirkan KTP-el yang rusak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sarankan silahkan Saudara mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan membawa kelengkapan persyaratan di atas, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memfasilitasi penerbitan kembali KTP-el Saudara. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan

							administrasi kependudukan dan Salam Laport!
233	03 Desember 2024	Stanislaus	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Kekacauan Administrasi Pemerintahan Di Kota Parepare	<p>Pj walikota abdul hayat yang menggantikan pj. akbar ali sedang menjalankan pemerintahan yang bakal kacau balau.</p> <p>1. memberhentikan dewan pengawas perumda air minum, h. iwan asaad, ap. m.si yang baru 3 bulan mengemban penugasan dewas tersebut tanpa ada evaluasi. sk nomor 804 tanggal 25 november 2024 (h-2 pilkada) dan menyerahkan sk tersebut ke yang bersangkutan pada tanggal 28 november 2024 (h+1 pilkada).</p> <p>2. membatalkan sk pj. akbar ali yang telah menganulir keputusan mantan walikota taufan pawe terhadap h. iwan asaad yg dinonjobkan dari jabatan sekretaris daerah. sk walikota nomor 805 tanggal 26 november 2024.</p> <p>3. memberhentikan jabatan inspektur daerah kota parepare h. iwan asaad. sk nomor 806 tanggal 26 november 2024.</p> <p>sk walikota pada angka 2 dan 3 bertanggal 26 november diberikan kepada h. iwan asaad pada hari ini, selasa, 03 desember 2024. mohon bapak menteri bisa memperhatikan ini.</p> <p>ini sudah kekacauan pemerintahan di bawah kendali pj. abdul hayat.</p>	Proses	Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan Anda. Mohon agar dapat disertakan data dukungnya melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
234	24 Desember 2024	Cindy Natasia Sinukaban	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Indikasi Pungli Dan Tindakan Kurang Terpuji Dari Oknum Petugas	<p>Kepada yth. direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil saya ingin melaporkan kejadian pada tanggal 24 desember 2024 sekitar pukul 15.00 atas perlakuan tidak</p>	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media SP4N LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang dialami.

				<p>Disdukcapil Kota Medan</p> <p>terpuji dari oknum petugas dinas kependudukan dan catatan sipil kota medan, jl. iskandar muda no.270, petisah tengah, kec. medan petisah, kota medan, sumatera utara 20151, (terlapor - nama tidak di ketahui) di loket pada saat melayani warga a.n helena pinem (pelapor) yang pada tanggal dan jam diatas berkunjung kepentingan penerbitan akta kematian a.n suami dan kk terupdate.</p> <p>poin-poin pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berkas kk fisik yang dilampirkan pelapor (sudah dengan barcode) ditolak oleh terlapor dari sudin dukcapil medan dengan alasan bukan kk asli. padahal keluarga sudah melakukan konfirmasi dengan petugas sudin dukcapil dki jakarta dan kelurahan dki jakarta, dan diinformasikan bahwa kk tersebut valid dan dapat digunakan untuk mengurus sertifikat kematian dan penerbitan kk terbaru. 2. berkas kk fisik yang diserahkan oleh pelapor, ditahan oleh petugas (terlapor) dengan alasan kk tersebut fotokopian, padahal keluarga sudah tidak memiliki berkas fisik lagi. 3. Kk baru tidak diterbitkan sehingga malah makin mempersulit pengurusan administrasi. 4. pelapor diarahkan ke kantor polisi untuk mengurus surat keterangan kk hilang. padahal kk tersebut tidak hilang melainkan ditahan oleh petugas dukcapil terlapor. 5. terdapat perkataan kasar, tidak etis 	<p>Dapat kami informasikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 79A UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, "Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya". Lebih lanjut, pada Pasal 95B dinyatakan bahwa:"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring bahwa bahwa selain pelayanan manual datang ke kantor Dinas Dukcapil permohonan pelayanan juga dapat dilakukan secara online. Guna mengatasi kendala yang anda alami mohon untuk membuka tautan https://sibisa.medan.go.id/ untuk jenis pelayanan dokumen kependudukan.</p> <p>Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus membuat inovasi guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dengan disahkannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, maka seluruh Dokumen Kependudukan (kecuali KTP-el dan KIA) akan menggunakan kertas HVS 80 gr berwarna putih. Masyarakat dapat</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>dan bentakan dengan suara keras disampaikan kepada ibu helena, yaitu : &quot;ibu mengganggu pekerjaan dan bisanya hanya protes&quot;.</p> <p>ciri-ciri oknum terlapor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jenis kelamin laki-laki 2. usia tua 3. nama tidak diketahui <p>berdasarkan penjelasan oknum terlapor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wajib melampirkan kk fisik asli agar kk baru dapat diterbitkan. 2. kk fisik asli yang diakui oleh disdukcapil kota medan : terdapat tulisan tangan tinta biru dan kertas tebal (keberadaan barcode tidak diperhitungkan dan diperiksa) mohon penjelasan atas kritria kk fisik asli yang berlaku di seluruh indonesia? mengapa terdapat perbedaan antar wilayah dari dki jakarta dan kota medan? silakan tanggapan dikirimkan melalui no. wa email : natasiacindy@gmail.com 		<p>melakukan pencetakan Dokumen Kependudukan secara mandiri dengan spesifikasi kertas yang telah ditentukan dari email yang dicatitkan, tanpa perlu datang kembali ke Disdukcapil. Masyarakat juga memiliki file Dokumen Kependudukan seperti Akta dan Kartu Keluarga yang dapat dilakukan pencetakan berulang kali dan tidak kuatir untuk kehilangan. Untuk pengecekan keaslian Dokumen Kependudukan, dapat dilakukan dengan melakukan scan QR-code pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang ada pada masing-masing Dokumen Kependudukan.</p> <p>Selain hal tersebut, bahwa terdapat petugas yang sikap dan pelayanannya yang dianggap kurang sesuai dengan etika birokrasi yang bersih dari korupsi dan melayani masyarakat, akan kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Medan serta Dinas Dukcapil Kota Medan.</p> <p>Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih. Salam Lapor!</p>
235	24 Desember 2024	Enda Sulaeman	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Bikin Ktp 3 Bulan	<p>Apa benar bikin ktp sampe 3 bulan, di kantor kecamatan kemang kabupaten bogor</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan sesuai amanat Pasal 3 ayat (2) Permendagri 19 Tahun 2018 Penerbitan Dokumen Kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Batas waktu penyelesaian dokumen kependudukan</p>

							<p>tersebut dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan. Kemungkinan yang bisa terjadi di Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor, ada kendala keterbatasan stok blangko KTP-el sehingga menghambat penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan dalam hal pencetakan KTP-el.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut jika Saudara berkenan untuk secara berkala mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mengecek status pengajuan pencetakan KTP-el Saudara, Jika kendalanya ternyata terkait stok blangko KTP-el di DUkcapil Kabupaten Bogor yang terbatas, Saudara bisa menginformasikan ke petugas Dujkcapil Kab Bogor untuk mengambil tambahan blangko KTP-le ke Ditjen Dukcapil Kemendagri.</p> <p>Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapo!</p>
236	22 Desember 2024	Harun Agus Siswoyo STr.KG	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Blanko Ktp Tidak Tersedia	Kepada yth dirjen dukcapil kemendagri dengan hormat,apakah benar 3 bulan terakhir ini blangko ktp di batasi di wilayah kabupaten jember karena sudah 3 kali saya mengurus revisi ktp karena saya pindah domisili dari kota kendari ke jember sampai saat ini belum mendapatkan ktp padahal surat keterangan pindah	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!</p> <p>Terkait pertanyaan Saudara, jika Saudara berkenan coba disampaikan kepada kami informasi berupa:</p> <p>Nama:</p> <p>NIK:</p>

					domisili saya sudah sejak maret 2023.terimakasih atas bantuannya		informasi tersebut akan kami gunakan untuk melakukan pengecekan pada database kependudukan, apakah KTP-el Saudara dengan alamat Kabupaten Jember sudah selesai tercetak atau belum. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan administrasi kependudukan dan Salam Lapo!
237	24 Desember 2024	Cindy Natasia Sinukaban	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Indikasi Pungli Dan Tindakan Kurang Terpuji Dari Oknum Petugas Disdukcapil Kota Medan	Kepada yth. direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil saya ingin melaporkan kejadian pada tanggal 24 desember 2024 sekitar pukul 15.00 atas perlakuan tidak terpuji dari oknum petugas dinas kependudukan dan catatan sipil kota medan, jl. iskandar muda no.270, petisah tengah, kec. medan petisah, kota medan, sumatera utara 20151, (terlapor - nama tidak di ketahui) di loket pada saat melayani warga a.n helena pinem (pelapor) yang pada tanggal dan jam diatas berkunjung kepentingan penerbitan akta kematian a.n suami dan kk terupdate. poin-poin pengaduan : 1. berkas kk fisik yang dilampirkan pelapor (sudah dengan barcode) ditolak oleh terlapor dari sudin dukcapil medan dengan alasan bukan kk asli. padahal keluarga sudah melakukan konfirmasi dengan petugas sudin dukcapil dki jakarta dan kelurahan dki jakarta, dan	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang telah Saudara/i sampaikan melalui media SP4N LAPOR! Sebelumnya kami memohon maaf atas kendala yang dialami. Dapat kami informasikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 79A UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, "Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya". Lebih lanjut, pada Pasal 95B dinyatakan bahwa:"Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)." Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Adminstrasi Kependudukan

				<p>diinformasikan bahwa kk tersebut valid dan dapat digunakan untuk mengurus sertifikat kematian dan penerbitan kk terbaru.</p> <p>2. berkas kk fisik yang diserahkan oleh pelapor, ditahan oleh petugas (terlapor) dengan alasan kk tersebut fotokopian, padahal keluarga sudah tidak memiliki berkas fisik lagi.</p> <p>3. kk baru tidak diterbitkan sehingga malah makin mempersulit pengurusan administrasi.</p> <p>4. pelapor diarahkan ke kantor polisi untuk mengurus surat keterangan kk hilang. padahal kk tersebut tidak hilang melainkan ditahan oleh petugas dukcapil terlapor.</p> <p>5. terdapat perkataan kasar, tidak etis dan bentakan dengan suara keras disampaikan kepada ibu helena, yaitu : &quot;ibu mengganggu pekerjaan dan bisanya hanya protes&quot;.</p> <p>ciri-ciri oknum terlapor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jenis kelamin laki-laki 2. usia tua 3. nama tidak diketahui berdasarkan penjelasan oknum terlapor : <ol style="list-style-type: none"> 1. wajib melampirkan kk fisik asli agar kk baru dapat diterbitkan. 2. kk fisik asli yang diakui oleh disdukcapil kota medan : terdapat tulisan tangan tinta biru dan kertas tebal (keberadaan barcode tidak diperhitungkan dan diperiksa) mohon penjelasan atas kriteria kk fisik asli yang berlaku di seluruh indonesia? <p>mengapa terdapat perbedaan antar</p>	<p>Secara Daring bahwa bahwa selain pelayanan manual datang ke kantor Dinas Dukcapil permohonan pelayanan juga dapat dilakukan secara online. Guna mengatasi kendala yang anda alami mohon untuk membuka tautan https://sibisa.medan.go.id/ untuk jenis pelayanan dokumen kependudukan.</p> <p>Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus membuat inovasi guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dengan disahkannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, maka seluruh Dokumen Kependudukan (kecuali KTP-el dan KIA) akan menggunakan kertas HVS 80 gr berwarna putih. Masyarakat dapat melakukan pencetakan Dokumen Kependudukan secara mandiri dengan spesifikasi kertas yang telah ditentukan dari email yang dicatitkan, tanpa perlu datang kembali ke Disdukcapil. Masyarakat juga memiliki file Dokumen Kependudukan seperti Akta dan Kartu Keluarga yang dapat dilakukan pencetakan berulang kali dan tidak khawatir untuk kehilangan. Untuk pengecekan keaslian Dokumen Kependudukan, dapat dilakukan dengan melakukan scan QR-code pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang ada pada masing-masing Dokumen Kependudukan. Selain hal tersebut, bahwa terdapat petugas yang sikap dan pelayanannya yang dianggap kurang sesuai dengan etika birokrasi yang bersih dari korupsi dan melayani masyarakat, akan kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Medan serta Dinas</p>
--	--	--	--	--	---

					wilayah dari dki jakarta dan kota medan? silakan tanggapan dikirimkan melalui no. wa email :		Dukcapil Kota Medan. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih. Salam Lapor!
238	30 Desember 2024	Leni Marlina	Permintaan Informasi	Aktivasi Nik	Mengetahui valid atau tidaknya nik	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
239	27 Desember 2024	Yusi Azizah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permintaan Surat Pindah Domisili Antar Provinsi	Selamat pagi, keluarga saya saat ini sudah berada di kabupaten tujuan untuk pindah domisili dari kabupaten cirebon akan tetapi belum ada surat pindah tempat. untuk mengurus surat pindah tempat apakah bisa dilakukan secara online di ikd? karna untuk saat ini belum bisa datang ke kabupaten cirebon dan surat pindah tempatnya dibutuhkan segera. mohon bantuannya. terima kasih.	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Terhadap permasalahan Saudara, dapat kami sampaikan bahwa apabila penduduk sudah secara faktual berada di daerah tujuan dan belum mempunyai Surat Keterangan Pindah pengurusannya dapat dilakukan di Dinas Dukcapil Kab/Kota domisili saat ini. Dinas akan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil daerah asal dilengkapi dengan: 1. Penduduk mengisi F-1.03; 2. Pddk melampirkan fotokopi KK; Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika Saudara merasa penjelasan dari kami membantu, mohon dapat memberikan penilaian atas tanggapan kami. Terima kasih atas atensinya pada layanan

							administrasi kependudukan dan Salam Laport!
240	27 Desember 2024	Muhammad Jayyin Purdiansyah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Belum Terima Email Perubahan Elemen Kartu Keluarga	Belum terima email kk & biodata ektp setelah perubahan elemen kartu keluarga, mulai selesai dari tanggal 11 desember 2024 hingga sekarang 23 desember 2024, chat dukcapil sidoarjo katanya yang mengurus email itu kemendagri pusat, chat kemendagri katanya yang mengurus sesuai domisilinya, lalu gimana ini ?	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
2025							
241	02 Januari 2025	Kelurahan Prajurit Kulon	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Layanan Sipd	Selamat siang ,saya bpp kelurahan prajurit kulon kecamatan prajurit kulon kota mojkerto provinsi jawa timur . mau menanyakan terkait gu nihil . untuk sisa saldo kas kami baik tunai maupun bank sudah 0 rupiah .tapi pada bku kenapa masih ada sisa saldo tunai sebesar rp 300.000,- . sehingga jika kami mengikuti bku seharusnya ada sisa yang bisa di buatkan sts . namun sisa saldo kami sudah 0 rupaih .mohon arahannya . kami harap fastrespon ya . karena mengingat sudah akhir tahun .mohon maaf , terima kasih .	Selesai	selamat pagi Bapak/Ibu terkait permasalahan data tidak sinkron silahkan menghubungi helpdesk Regional 2 di nomer 085283953394. terima kasih
242	02 Januari 2025	Ton Magus	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Kendala Penggunaan Aplikasi Sipd	Selamat siang bapak/ibu kemendagridan salam hormat...mohon izin, kami dari dinas kesehatan kabupaten manggarai timur ingin menyampaikan kendala terkait sipd pada saat gu nuhi:ada penambahan saldo bank di tbp, yang seharusnya saldo tunai saja sebesar rp.33.812.856 tapi setelah ada penghapusan sts yang salah input dan	Selesai	selamat pagi Bapak/Ibu terkait permasalahan diatas dikarenakan pernah membuat sts up/gu kemudian dihapus dapat dilaporkan ke helpdesk Regional 2 di nomer 085283953393. terima kasih

					saldo bertambah menjadi rp.67.625.712.kami sudah koordinasi ke badan keuangan daerah kabupaten manggarai timur tapi smapai saat ini belum ada solusimohon solusinya dan terima kasih atas kerjasamanya		
243	02 Januari 2025	Hanifah Nur Azizah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Mengetahui Nik Dari Nomor Ktp Lama (1985)	Saya cucu dari yang memiliki ktp lama dan belum sempat update ke ktp baru, saya memerlukan nik untuk administrasi kendaraan, tetapi tidak tercantum di ktp lama. apakah saya bisa cek nik nya? nomor ktp: 00341/v-24/ks-474.4/1985	Selesai	<p>Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Terkait dengan pengaduan Saudara/i, mohon dilampirkan foto dokumen ktp dan kk denganjelas supaya memudahkan tim kami dalam pengecekan data tersebut.</p> <p>Terima kasih, salam sehat dan bahagia</p> <p>Dukcapil Prima Indonesia Maju</p> <p>Jangan lupa bintangnya.</p>
244	29 Januari 2025	Sadiya	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ktp Saya Tidak Mau Diurus Oleh Dukcapil Kabupaten Sumber Cirebon	Kata bank saat verifikasi data saya tidak ada di database, saya sudah mengajukan keluhan ini ke capil langsung, namun tidak ada hasil, ketika saya kembali ke bank satu tahun kemudian, saya ajukan lagi dan beberapa bulan terakhir saya cek di bank bni tidak ada, selama ini saya tidak bisa membuka rekening sampai sekarang nik saya	Selesai	<p>"Halo..! Salam Dukcapil PRIMATERima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam NegeriTerkait pengaduan saudara, nik tersebut terdaftar dalam sistem kami, namun untuk dokumen dkk nya sudah tidak aktif dengan alasan terdapat perubahan pada anggota keluarga. sarank kami saudara dapat mengajukan penerbitan kk kembali, dan jika ada perubahan pada elemen di ktp maka ktpnya juga bisa di ajukan. sekaligus bisa aktivasi IKD supaya kedepannya bisa lebih mudah dalam pengurusan dokumen kependudukan.Terima Kasih, salam sehat dan bahagiaJangan Lupa Bintangnya..."</p>

245	29 Januari 2025	Yoshua Andriano	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Nik Terdaftar	Mohon dibantu apakah nik terdaftar?	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia jangan lupa bintangnya
246	28 Januari 2025	Dona Ari Wijaya	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nik Tidak Terdaftar Di Dukcapil.	Halo, saya mengalami kendala saat ingin membuka rekening di aplikasi online dan verifikasi berbagai dokumen melalui ktp yaitu nik saya tidak terdaftar di dukcapil.	Selesai	"Halo..! Salam Dukcapil PRIMATERIMA kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait pengaduan saudara, mohon melampirkan dokumen kk dan ktp supaya kami dapat melakukan pengecekan ke dalam sistem kami. Terima Kasih, salam sehat dan bahagia Jangan Lupa Bintangnya..."
247	28 Januari 2025	Mahfuzi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Nik Ktp Tidak Aktif	Nik saya tidak aktif, setelah saya urus ke dukcapil di persulit harus sidang, saya bingung, sedangkan saya skrng tinggal di luar kota, mohon solusinya.. krena saya ga ada biaya untuk bolak balik urus ktp, nik ktp saya	Selesai	" ""Halo..! Salam Dukcapil PRIMATERIMA kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri Terkait pengaduan saudara, setelah kami lakukan pengecekan ke dalam sistem kami, di temukan data tersebut sudah terbit no akta kematian. jika data nik akta kematian tersebut memang milik saudara, kiranya saudara dapat datang langsung ke dukcapil dengan membawa dokumen pendukung untuk membuktikan bahwa saudaralah pemilik nik tersebut Misal (akta kelahiran, buku nikah, paspor, kk, ktp, dll yang mana dlm dokumen tersebut tercantum nik) Terima Kasih, salam sehat dan bahagia Jangan Lupa Bintangnya..."
248	28 Januari 2025	Supriadi Shalih	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Admistrasi Kependudukan	Kepala dinas capil kabupaten ogan komering ilir memaksa yang tidak bersedia mengurus data administrasi kependudukan melalui orang-orang yang sudah di sk kepala desa dengan	Selesai	Yth. Bapak/Ibu Pelapor, Terima kasih atas laporan yang disampaikan terkait dugaan pemaksaan jalur pengurusan administrasi kependudukan oleh oknum Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Ogan Komering

					<p>harga yang sangat mahal.sedangkan orang yang dipercayai oleh masyarakat dengan surat kuasa ditolak oleh kadistarduk okimohon tindak lanjut atas perbuatan oknum tersebut karena tindakannya tidak sesuai dengan uu administrasi kependudukan.</p>	<p>Ilir.Kami sangat menghargai perhatian Bapak/Ibu dalam menjaga integritas pelayanan publik dan keadilan akses terhadap hak-hak kependudukan warga. Berdasarkan isi laporan, kami mencatat adanya beberapa hal yang menjadi perhatian serius, yaitu:>Dugaan pemaksaan pengurusan dokumen melalui pihak-pihak tertentu yang ditunjuk melalui SK Kepala Desa dengan tarif tinggi;Penolakan terhadap kuasa resmi dari warga masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip inklusivitas pelayanan;Potensi pelanggaran terhadap asas non-diskriminasi, efisiensi, dan keterbukaan dalam pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.Sebagai informasi, pelayanan administrasi kependudukan diatur dalam:>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (Pasal 79A), dan pelayanan wajib dilaksanakan dengan mudah, cepat, dan tidak diskriminatif;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, yang mengatur mengenai pelayanan langsung kepada masyarakat serta pemanfaatan surat kuasa oleh pihak terpercaya;Setiap pembatasan atau pemaksaan mekanisme pengurusan yang bertentangan dengan asas pelayanan publik berpotensi melanggar ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan kode etik ASN.Menindaklanjuti laporan ini, kami akan meneruskan informasi kepada pihak terkait di daerah, serta mencatatnya sebagai indikasi awal</p>
--	--	--	--	--	--	---

							pengawasan dalam pembinaan terhadap kinerja aparatur penyelenggara pelayanan adminduk.Kami mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan jalur resmi dan sah secara hukum, serta menolak praktik perantara yang tidak sesuai ketentuan. Bila diperlukan, Bapak/Ibu juga dapat menyampaikan secara langsung bukti atau data pendukung ke kanal pengaduan resmi Inspektorat Daerah, atau melalui kanal pengawasan internal lainnya.Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak/Ibu dalam menjaga kualitas dan keadilan pelayanan administrasi kependudukan di daerah.Hormat kami,Admin LAPOR! – Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
249	31 Januari 2025	Tasdiqotul Farikah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Laporan Pendataan Nik Pada Emis	Nik di verval ptk integrasi emis atasa nama kapsim ni9k sudah sesuai dan sudah hijau, tetapi di ptk aktif masih silang merah. dan di emis masih dengan keterangan belum diverifikasi.. mohon untuk dicek atas nama kapsim nik di madrasah mis maarif nsm	Selesai	Yth Pelapor Berdasarkan sistem kami saat ini, data Saudara adalah sebagai berikut: NIK: NOKK: Nama: KAPSIM TTL: Data Saudara ada disistem Dukcapil dan tidak ada masalah. Dipastikan kembali pada saat mengurus di Emis. Terima kasih
250	30 Januari 2025	Krispina Nofu	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Apakah Nik Terdapat	Kepada yth, bapak/ibu mendagri di tempat salam sehat, saat ini terjadi transaksi jual beli yang mana proses jual beli sudah lama di lakukan, di mana pada saat transaksi jual beli pihak penjual memiliki ktp yang belum berupa e-ktp, untuk itu mohon informasinya apakah nik tersebut masih terdaftar atau tidak?	Selesai	"Halo..! Salam Dukcapil PRIMATERIMA kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam NegeriTerkait dengan pengaduan Saudara,Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat memeberikan informasi data/dokumen kependudukan kecuali kepada pemilik data tersebut, berkaitan dengan permasalahan saudara diatas, kiranya dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak

							berwajib (APH).Terima Kasih, salam sehat dan bahagiaJangan Lupa Bintangnya..."
251	10 Februari 2025	Cahya Syalom	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Dashboard Stunting Dan Cakupan Pelayanan Esensial Untuk Penurunan Stunting Tidak Dapat Diakses	<p>Selamat sore, bapak/ibu yang terhormat. saya ingin mengakses dashboard stunting dan cakupan pelayanan esensial untuk penurunan stunting dari url ini https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/dashtop/index/4. pesan ketika mengakses website ini https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/dashtop/index/4, muncul teks seperti ini atau seperti yang saya lampirkan digambar. saya harap website ini dapat diakses agar informasi tentang stunting bisa diakses kembali untuk diketahui oleh publik. atau apakah nama websitenya berubah? jika iya, mohon informasinya. terimakasih atas waktunya.</p> <p>pesan error:</p> <p>situs ini tidak dapat dijangkau</p> <p>periksa apakah ada kesalahan ketik di aksi.bangda.kemendagri.go.id.</p> <p>jika ejaan sudah benar, coba jalankan diagnostik jaringan windows.</p>	Selesai	<p>Yth. Pelapor,</p> <p>Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!</p>
252	10 Februari 2025	Dadang Hendrayana	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Nik Dan Kk Masih Aktif Atau Tidak	<p>Mau cek nik dan no kk aktif atau tidak</p> <p>dadang hendrayana</p> <p>nik</p>	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam NegeriTerkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada

					no kk		aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.kami tunggu.Terima kasih, salam sehat dan bahagiajangan lupa bintangnya
253	10 Februari 2025	Kurniawan Yoganing Dwijayanto	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Tanya Terkait Profesi Kepamongprajaan Ipdn / Kemendagri	Maaf bapak/ibu kemendagri / ipdn, saya mau tanya, saya cpns jalur umum gelar sarjana hukum ambil formasi fungsional penggerak swadaya masyarakat penempatan di kecamatan, apakah saya setelah jadi pns bisa ikut profesi kepomongprajaan untuk menjadi Camat? kalau bisa, syaratnya apa saja ya? trus apakah biaya mandiri atau ada beasiswa dari pemerintah.. terimakasih	Selesai	Selamat Siang, berikut kami lampirkan brosur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN. Terima Kasih
254	10 Februari 2025	Yulia Kartika Dewi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Status Nik	Apakah status nik berikut aktif	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri.Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.kami tunggu.Terima kasih, salam sehat dan bahagiajangan lupa bintangnya
255	09 Februari 2025	Muhammad Rizky Pratama	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Alamat Detail Saya	Saya ingin tahu alamat lengkap yang tercantuk di dukcapil untuk nik:	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri.Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.kami tunggu.Terima kasih, salam sehat dan bahagiajangan lupa bintangnya

256	09 Februari 2025	Agung Perbawa	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek No Nik	Cek no nik	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Jangan lupa bintangnya
257	10 Februari 2025	Cahya Syalom	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Dashboard Stunting Dan Cakupan Pelayanan Esensial Untuk Penurunan Stunting Tidak Dapat Diakses	Selamat sore, bapak/ibu yang terhormat. saya ingin mengakses dashboard stunting dan cakupan pelayanan esensial untuk penurunan stunting dari url ini https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/dashtop/index/4 . pesan ketika mengakses website ini https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/dashtop/index/4 , muncul teks seperti ini atau seperti yang saya lampirkan digambar. saya harap website ini dapat diakses agar informasi tentang stunting bisa diakses kembali untuk diketahui oleh publik. atau apakah nama websitenya berubah? jika iya, mohon informasinya. terimakasih atas waktunya.	Selesai	Yth. Pelapor, kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!
258	26 Februari 2025	Anonim	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Permintaan Informasi	Permintaan informasi untuk nik yang terlampirkan. fatril dengan tempat tanggal lahir 20 februari 2000 (terdapat perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pada nik) apakah telah sesuai nik tersebut dengan pemilik nik ?	Selesai	"Halo..! Salam Dukcapil PRIMATERIMA kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan pengaduan Saudara/i, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat memberikan informasi data/dokumen kependudukan kecuali kepada pemilik data tersebut, berkaitan dengan permasalahan saudara diatas, kiranya dapat datang langsung ke loket pelayanan adminduk

							setempat, dengan membawa dokumen terkait. Terima Kasih, salam sehat dan bahagia Jangan Lupa Bintangnya..."
259	26 Februari 2025	Manyp Sekali	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pns Dapat Tpp Sementara Pppk Tidak Di Pemerintah Aceh	Kepada bapak mendagri yang terhormat, mohon kiranya memperhatikan cara pengelolaan kebijakan keuangan di pemerintah aceh. pppk dan pns sama2 bekerja dan sama sama asn. dengan keluarnya aturan yang menyamakan tukin pns dan pppk tidak membuat pemerintah aceh memberikan hak yang sama yaitu tukin atau tpp pppk . sudah hampir 2 tahun pppk tidak mendapatkan tpp. aplikasi e kinerja pun baru feb 2025 kami mulai mengisi. terima kasih.	Selesai	<p>Yth. Bapak/Ibu</p> <p>Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi/pengaduan yang disampaikan.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan sebagai berikut:</p> <p>A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 146 ayat (1) menyatakan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.</p> <p>B. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:</p> <p>1. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja,</p>

						<p>tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.</p> <p>C. Pasal 58 ayat (3) menyatakan bahwa Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.</p> <p>D. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025:</p> <p>1. Butir 3.4.1.1.2.d.1) Prinsip Pemberian TPP menyatakan bahwa Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformative.</p> <p>2. Butir 3.4.1.1.2.d.6) Prinsip Pemberian TPP menyatakan bahwa Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.</p> <p>3. Butir 3.4.1.1.2.f.8) Kriteria penetapan besaran TPP ASN TA 2025 menyatakan bahwa Besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK.</p> <p>E. Berkenaan dengan hal tersebut, TPP ASN dapat diberikan kepada Pegawai PPPK</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>dengan memperhatikan alokasi belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD dan kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS. Pemberian TPP ASN bersifat dapat diberikan, artinya pemerintah daerah bisa memberikan TPP ASN atau tidak memberikan TPP ASN, bergantung kepada kondisi APBD dan alokasi belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.</p> <p>Dalam hal pemerintah daerah tempat saudara bekerja diduga tidak memberikan TPP ASN yang mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan, maka kami di Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mendorong saudara/i untuk melaporkan dugaan tersebut kepada lembaga yang lebih berwenang disertai dengan bukti-bukti yang mencukupi, mengingat hal tersebut adalah bukan menjadi kewenangan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.</p> <p>Demikian kami sampaikan, terima kasih.</p> <p>Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah</p> <p>Ditjen Bina Keuangan Daerah</p> <p>Kementerian Dalam Negeri</p>
--	--	--	--	--	--	---

							Telepon: 0213501161
260	26 Februari 2025	Muhamad Haikal Faiz	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Sipd Penatausahaan Sipd Error	Tracking id : #8681466 maaf terkait aplikasi sipd kenapa tidak muncul kegiatan dan sub kegiatannya ya. dari senin mau buat spp ls tidak bisa terus bahkan sudah coba tengah malam juga tidak bisa padahal koneksi internet nya bagus. mohon tindak lanjutnya ya min. terima kasih	Selesai	Selamat siang Bapak/Ibu, terkait permasalahan tsb dapat disampaikan ke group Kaban Provinsi. terima kasih
261	03 Maret 2025	Siti nurlaila	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Nik Ktp	Ingin mengecek nik ktp apakah masih aktif atau tidak	Selesai	"Halo..! Salam Dukcapil PRIMATERIMA kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam NegeriTerkait dengan pengaduan Saudara/i, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat memeberikan informasi data/dokumen kependudukan kecuali kepada pemilik data tersebut, berkaitan dengan permasalahan saudara diatas, kiranya dapat datang langsung ke loket pelayana adminduk setempat, dengan membawa dokumen terkait.Terima Kasih, salam sehat dan bahagiaJangan Lupa Bintangnya..."
262	02 Maret 2025	Andini S,Pd	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Validasi E-Ktp User: Sandy05	Validasi e-ktp :	Selesai	"Halo..! Salam Dukcapil PRIMATERIMA kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam NegeriTerkait dengan pengaduan Saudara/i, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat memeberikan informasi data/dokumen kependudukan kecuali kepada pemilik data tersebut, berkaitan dengan permasalahan saudara diatas, kiranya dapat datang langsung ke loket pelayana adminduk setempat, dengan membawa dokumen terkait.Terima Kasih, salam sehat dan bahagiaJangan Lupa Bintangnya..."

263	02 Maret 2025	Diva rahmadani	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Ktp Hilang	<p>1. jika ktp hilang dan akan mengurus ktp baru. apakah bisa menambah nama dan tempat lahir yang kurang lengkap di ktp sebelum nya?</p> <p>2. berkas apa yang perlu di bawa ke dukcapil?</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!</p> <p>Terkait pertanyaan Saudara, untuk penerbitan kembali KTP-el silahkan mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai domisili Saudara untuk mengajukan permohonan penerbitan kembali KTP-el yang hilang, dengan membawa kelengkapan persyaratan berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat dan FC Kartu Keluarga. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memproses penerbitan kembali KTP-el Saudara.</p> <p>Berkenaan dengan perubahan nama, dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya kebijakan terkait nama pada dokumen kependudukan dikenal 2 (dua) istilah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembetulan Nama, yaitu apabila ada perbedaan nama antar dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya yang umumnya bersifat kesalahan redaksional, misalnya nama ada yang disingkat dan ada yang dipanjangkan, pembetulan ejaan lama, pembetulan salah ketik/ejaan (misal penggunaan huruf i atau y pada nama), penambahan marga, dll. Terhadap pembetulan nama ini pemohon dapat melampirkan dokumen pendukung yang menjadi acuan nama yang akan digunakan, dapat berupa ijazah atau buku nikah. 2. Perubahan Nama, yaitu apabila nama pada berbagai dokumen sudah sama semua
-----	---------------------	-------------------	--	------------	---	---------	--

265	14 Maret 2025	Rega Fikriansyah	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Syarat Wajib Kepala Daerah: Harus Berbadan Ideal dan Good Looking Demi Citra Negara	<p>Yth. Pemerintah Republik Indonesia, Sehubungan dengan pentingnya citra pemimpin dalam pemerintahan, saya mengusulkan agar ada standar baru bagi kepala daerah, baik Gubernur, Wali Kota, Bupati, maupun Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Usulan kebijakan:</p> <p>1. Berat Badan Ideal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala daerah wajib memiliki BMI (Body Mass Index) yang ideal, tidak boleh obesitas atau terlalu kurus. - Jika dalam masa jabatan berat badan melebihi batas ideal, wajib mengikuti program diet dan olahraga yang difasilitasi oleh negara. <p>2. Good Looking:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus memiliki penampilan yang menarik dan enak dipandang, minimal setara aktor sinetron atau boyband Korea kelas menengah. - Jika sudah menjabat tapi kurang menarik, wajib mengikuti program make-over yang dibiayai APBN/APBD. - Setiap 6 bulan dilakukan sesi pemotretan resmi untuk memastikan wajah dan postur tetap sesuai standar. <p>Manfaat Kebijakan Ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan citra pemerintah di mata rakyat dan dunia internasional. - Mengurangi stress rakyat karena melihat pemimpin yang adem di mata- - Mencegah pejabat dari penyakit akibat obesitas, sehingga lebih produktif dalam bekerja. - Menarik perhatian investor asing, karena pemimpin yang berpenampilan menarik lebih meyakinkan dalam negosiasi. 	Selesai	<p>Yth. Bapak/Ibu di Tempat Dengan hormat, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap upaya peningkatan kualitas kepemimpinan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam usulan kebijakan yang Bapak/Ibu sampaikan mengenai pentingnya citra dan penampilan kepala daerah serta pejabat negara. Pada prinsipnya, Pemerintah Republik Indonesia sangat mendukung segala bentuk inovasi dan masukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan pejabat, serta citra positif pemerintah di mata masyarakat dan dunia internasional. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia, kriteria pemimpin lebih ditekankan pada kapasitas, kapabilitas, integritas, dan komitmen untuk melayani masyarakat. Persyaratan terkait fisik dan penampilan belum menjadi bagian dari norma hukum yang berlaku, mengingat asas persamaan hak dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Meskipun demikian, upaya untuk mendorong pola hidup sehat bagi seluruh pejabat negara, termasuk kepala daerah, tetap menjadi perhatian penting. Program-program kesehatan, pemeriksaan rutin, dan pembinaan gaya hidup sehat telah difasilitasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan pelayanan yang prima. Masukan Bapak/Ibu ini akan kami catat dan menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi-diskusi kebijakan berikutnya. Sekali lagi kami mengapresiasi kepedulian Bapak/Ibu dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat, cerdas, dan</p>
-----	---------------------	---------------------	--	--	--	---------	---

					<p>- Memberikan insentif bagi generasi muda untuk lebih menjaga kesehatan dan penampilan jika ingin berkarier di politik.</p> <p>Kebijakan ini akan membawa Indonesia ke era baru: pemerintahan yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga sehat dan estetik. Karena seperti kata pepatah, "pemimpin yang menarik, rakyat pun bahagia".</p> <p>Mohon pertimbangan serius dari pemerintah untuk diterapkan segera sebelum Pemilu berikutnya.</p> <p>Terima kasih.</p>		berkualitas. Atas perhatian dan usulan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami
266	14 Maret 2025	Rega Fikriansyah	Pengaduan Berkadar Pengawasan	<p>Usulan Pemerataan Partisipasi Warga Negara dalam Sektor Publik dan Swasta</p>	<p>Dengan hormat, saya ingin menyampaikan aspirasi terkait pemerataan partisipasi seluruh warga negara Indonesia dalam sektor publik maupun swasta. Saat ini, terdapat kecenderungan kelompok masyarakat tertentu yang lebih dominan di sektor swasta dibandingkan dengan sektor publik (PNS/BUMN). Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam persebaran tenaga kerja serta pengaruh ekonomi dan kebijakan di Indonesia.</p> <p>Sebagai upaya untuk memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme di berbagai sektor, saya mengusulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program insentif dan kebijakan afirmatif untuk mendorong keberagaman etnis dalam sektor PNS/BUMN, sehingga semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam berkontribusi terhadap negara. 2. Evaluasi keterwakilan berbagai 	Selesai	<p>Dengan hormat, Kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi dan perhatian yang Ibu/Saudara sampaikan terkait upaya pemerataan partisipasi seluruh warga negara Indonesia dalam sektor publik dan swasta. Pandangan Ibu/Saudara merupakan masukan yang sangat berharga dalam memperkuat prinsip keadilan sosial, kebhinekaan, serta semangat persatuan nasional dalam pembangunan nasional. Menanggapi usulan-usulan yang disampaikan, berikut kami sampaikan beberapa poin tanggapan: Kebijakan Afirmatif dan Insentif Keberagaman Etnis Pemerintah saat ini terus berupaya mendorong keberagaman dan inklusivitas, termasuk melalui program rekrutmen berbasis merit sistem yang adil dan terbuka, serta program afirmatif di daerah-daerah tertentu melalui penerimaan CPNS/ASN maupun BUMN. Aspirasi terkait insentif dan penguatan kebijakan afirmatif akan kami jadikan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan kepegawaian dan peraturan pelaksana</p>

					<p>kelompok dalam jabatan publik, agar komposisinya lebih mencerminkan keberagaman nasional.</p> <p>3. Pendidikan kebangsaan dan integrasi ekonomi yang mendorong semangat gotong royong antara sektor publik dan swasta tanpa dominasi kelompok tertentu.</p> <p>4. Transparansi dalam pola rekrutmen dan promosi di BUMN/PNS, agar setiap warga negara, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki peluang yang sama untuk mengabdikan kepada negara.</p> <p>Dengan kebijakan ini, diharapkan terjadi keseimbangan kontribusi dan distribusi tenaga kerja di semua sektor, sehingga rasa kebangsaan dan keadilan sosial semakin kuat di Indonesia.</p> <p>Demikian aspirasi ini saya sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperkuat persatuan nasional melalui kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif.</p> <p>Hormat saya, RF</p>		<p>lainnya. Kami percaya bahwa pemerataan kontribusi seluruh kelompok masyarakat di berbagai sektor kehidupan bangsa merupakan fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia yang lebih bersatu, adil, dan sejahtera. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam perumusan kebijakan ke depan. Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi aktif Ibu/Saudara dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hormat kami,</p>
267	14 Maret 2025	Dana Surya O	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	KETIDAK SINKRONAN ANTARA PP NO 11 TAHUN 2025 DENGAN SE MENDAGRI NOMOR 100.2.1.6/1876/O TDA	<p>Kepada Yth, Menteri Dalam Negeri</p> <p>Dengan hormat, Kami menyampaikan bahwa adanya ketidaksesuaian buntut Surat Edaran Mendagri NOMOR 100.2.1.6/1876/OTDA, tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.</p>	Selesai	<p>Berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/1876/OTDA tanggal 13 Maret 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025; 2. Bahwa kami telah melakukan kajian yuridis terhadap substansi surat edaran dimaksud, khususnya terkait pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada pegawai non-ASN yang bertugas pada</p>

					<p>didalam PP NO 11 Tahun 2025 di jelaskan secara jelas di pasal 3 ayat 3 huruf j bahwasanya yg menerima Tunjangan Hari Raya adalah Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi Pemerintah, termasuk Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada lembaga non struktural, Pegawai non pemerintah yg menerapkan pola BLUD, didalam SE mendagri hanya terdapat satu klausal yaitu untuk pegawai pemerintah yg menerapkan BLUD saja. mohon menjadi perhatian kepada bapak karena THR merupakan hak Pegawai Non Pemerintah Secara Keseluruhan bukan hanya pada satu Golongan saja. jika tidak dapat satu maka tidak sapat semua berperilaku sesuai Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia</p>		<p>instansi pemerintah daerah;3. Berdasarkan analisis hukum (terlampir), kami berpendapat bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan denganketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025.4. Surat Edaran dimaksud merupakan pedoman teknis pelaksanaan yang bersifatadministratif dan disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal sertafleksibilitas keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan belanja pegawai non-ASN.5. Pemerintah Daerah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP No.11 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri dimaksud, serta akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.</p>
268	23 Maret 2025	Arif Himawan	Permintaan Informasi	Permohonan Audit Dana Desa dan Segala Jenis Bantuan yang masuk ke Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak	<p>Setiap tahun setiap desa di Indonesia selalu mendapatkan alokasi dana desa, dan setiap tahun beberapa kali setiap atau perdesa mendapatkan jenis bantuan apapun, entah itu beras, pembangunan jalan ataupun lainnya namun sering kali setiap ada pembangunan selalu ada permintaan atau pungutan dari aparat desa dengan sebutan iuran sukarela atau administrasi untuk mendukung kegiatan atau program selanjutnya. Saya sebagai salah satu warga memohon untuk dilakukan audit dana desa dan bantuan-bantuan yang pernah diberikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada</p>	Selesai	<p>Menindaklanjuti Aduan pada aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dengan nomor aduan #11025231222497, dengan hormat dapat disampaikan tanggapan atas aduan dimaksud sebagai berikut:“Terima kasih atas aduan pelaporan terkait Permohonan Audit Dana Desa dan Segala Jenis Bantuan yang masuk ke Desa Surodadi, Kec. Sayung, Kab. Demak, dapat kami informasikan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, telah diatur kewajiban Kepala Desa dalam menyampaikan informasi seputar APB Desa kepada masyarakat pada pasal-pasal berikut:Pasal 39 Ayat (1) dan (2)(1) Kepala</p>

				<p>masyarakat desa Surodadi dan pemerintah pusat atas pembangunan maupun aliran dana bantuan yang masuk ke Desa Surodadi, karena sejauh ini sebagai warga saya merasa ada yang aneh setiap ada bantuan kenapa selalu ada administrasi yang sifatnya sukarela.</p> <p>Dan apakah boleh untuk Rekening Desa dipegang oleh seorang lurah atau kepala desa, karena setau dan sepemahaman saya bahwa rekening aliran dana desa tidak boleh dipegang oleh seorang lurah atau kepala desa saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.</p> <p>Dalam pengelolaan keuangan desa, harus dibentuk sebuah Tim Pengelola Keuangan Desa (TPKD) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa sebagai ketua 2. Sekretaris Desa sebagai sekretaris 3. Bendahara Desa sebagai bendahara <p>TPKD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk pengelolaan rekening desa. Rekening desa harus dipegang oleh bendahara desa dan harus ada persetujuan dari kepala desa dan sekretaris desa.</p> <p>Sehingga demi pertanggungjawaban sosial kepada pemerintah pusat dan sosial saya berharap lembaga terkait mulai dari Dinas yang menangani</p>	<p>Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:a); APB Desa;b); pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; danc);&nbsp; alamat pengaduan.Pasal 72 Ayat (1) dan (2)(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama) dan Pasal 70 (laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa) diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:a); laporan realisasi APB Desa;b); laporan realisasi kegiatan;c);&nbsp; kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;d); sisa anggaran; dane); alamat pengaduan.Terkait penggunaan rekening desa, telah diatur pada Permendagri 20 Tahun 2018 pasal 43 Ayat (1) dan (2)(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.Sehingga mengacu pada ketentuan diatas, Rekening Kas Desa tidak dipegang oleh Kepala Desa, namun oleh Pemerintah Desa, yang mekanisme penggunaannya mengikuti ketentuan perihal pengelolaan keuangan desa termasuk dalam penerimaan pendapatan di Desa seluruh transaksinya melalui Rekening Pemerintah Desa.Dalam hal adanya penerimaan</p>
--	--	--	--	--	---

					Desa, Dinas PU, Dinas Sosial, Kejaksaan dan BPK agar dilakukan audit terhadap aliran dana desa dan bantuan dalam bentuk apapun yang masuk ke desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Terima Kasih		bantuan dari Pemerintah Daerah/Pusat kepada masyarakat yang kemudian oleh Pemerintah Desa terdapat iuran tambahan guna mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud, dalam kodefikasi Pendapatan pada Permendagri 20 Tahun 2018 dikenal adanya akun Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, apabila pungutan dimaksud memang dicatat sebagai partisipasi masyarakat dan digunakan sesuai peruntukannya, maka pelaksanaan tersebut tidaklah menyalahi aturan namun terkait iuran-iuran masyarakat tersebut sebaiknya telah disepakati dalam Musyawarah Desa terlebih dahulu. Apabila iuran atas bantuan Pemerintah Daerah/Pusat tersebut sifatnya tidak dipertanggungjawabkan dalam APB Desa, maka hal ini memerlukan tindak lanjut pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Demak guna pemeriksaan lebih lanjut. Demikian kami sampaikan, terima kasih.
269	21 Maret 2025	Mubarak Ahmad520	Permintaan Informasi	Gaji 14 terlambat tidak sesuai instruksi Presiden	sampai saat laporan ini di buat, Gaji 14 PNS pada PEMDA kota sukabumi belum terealisasi	Selesai	Yth. Bapak/Ibu Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi/pengaduan yang disampaikan. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2025, menyatakan bahwa: 1. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya; 2. Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya; 3. Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang

							dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025. Mengacu pada regulasi diatas bahwa Pemerintah Daerah wajib membayarkan THR meskipun terlambat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Telepon: 0213501161
270	20 Maret 2025	gunawan	Permintaan Informasi	Penganggaran TPP ASN Kabupaten Cirebon Yang Tidak Berpedoman Pada Permendagri No 15 Tahun 2024	Yth Menteri Dalam Negeri Assalamualaikum wr. wb saya adalah seorang ASN PPPK Golongan X (Dokter) kabupaten cirebon dengan jabatan fungsional dokter ahli pertama disini saya ingin melaporkan penganggaran TPP kabupaten cirebon yang tidak berpedoman pada Permendagri No 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. yaitu dalam kasus pemberian besaran TPP ASN PPPK dan PNS dimana dalam permendagri no 15 tahun 2024 sudah jelas tertulis "Besaran TPP atau tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah memperhitungkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja serta pertimbangan objektif lainnya, sehingga pembayaran TPP kepada ASN sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya;" namun di kabupaten cirebon masih dibedakan. antara kami ASN PPPK dan PNS yan jabatan yang sama yaitu Dokter Ahli Pertama PPPK Menerima	Selesai	Yth. Bapak/Ibu Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi/pengaduan yang disampaikan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan sebagai berikut: Pada prinsipnya kementerian dalam negeri telah mengingatkan Pemerintah daerah bahwa dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah. Prinsip Pemberian TPP: 1) Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformatif. 2) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. 3) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. 5) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian

					<p>TPP Rp 350.000 sementara Dokter Ahli Pertama PNS menrima TPP Rp 3.590.000. Saya ingin menanyakan apakah penentuan kriteria besaran antara ASN PPPK dan ASN PNS dibedakan karena pada Permendagri No 15 Tahun 2024 hal itu tidak dibedakan. hal lain kami ASN PPPK Dokter Ahli Pertama PPPK Menerima TPP Rp 350.000 sementara Bidan Terampil yang kelas jabatannya 6 Menerima TPP Rp 1.600.000. ini sungguh tidak adil dimana beban kinerja lebih besar namun menerima TPP lebih kecil. Hal Ini juga terjadi Pada ASN PPPK lainnya, Kepada ASN PPPK Teknis dan ASN PPPK Guru. beserta laporan ini saya sertakan lampiran besaran TPP ASN PNS dan ASN PPPK mohon dengan sangat untuk menindak lanjuti laporan ini Terimakasih bapak/ibu</p>		<p>TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.6) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.7) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.9) Transformatif yang memacu kinerja ASN DaerahDemikian kami sampaikan, terima kasih.Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran DaerahDitjen Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam NegeriTelepon: 0213501161</p>
271	29 April 2025	Rudy Hartono	Permintaan Informasi	<p>INSEDA DOKTER SPESIALIS TIDAK DIBAYARKAN 24 BULAN</p>	<p>Yth, Bapak Menteri Dalam Negeri Menteri Kesehatan Gubernur Bengkulu Bupati Kepahiang</p> <p>PENTING</p> <p>Kami sampaikan Laporan Pengaduan bahwa INSEDA Dokter Spesialis di Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum dibayarkan 24 bulan sejak 2021 sampai dengan sekarang. Dikarenakan sistem pembayarannya INSEDA dibarengkan dengan TPP PNS, jika TPP macet maka otomatis</p>	Selesai	<p>Yth. Bapak/Ibu Terkait hal tersebut, dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang menangani hal tersebut seperti Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektorat Daerah Provinsi atau Inspektorat Jenderal Kemendagri disertai dengan bukti-bukti yang mencukupi, mengingat hal tersebut adalah bukan menjadi kewenangan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Namun dapat kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang berproses untuk mengundang rancangan Perpres tentang tunjangan dokter spesialis.Terima kasih</p>

					<p>INSEDA Dokter Spesialis juga macet. Kenapa Insesta Dokter Spesialis dan TPP harus dipisah karena INSEDA Dokter Spesialis punya urgensi khusus yaitu Insentif Pelayanan Kesehatan, bukan TPP biasa, karena terkait nyawa pasien. Insesta Dokter Spesialis harus dipisah dari TPP dalam POS Anggaran (misal via DAK Non-Fisik Kesehatan). Tujuannya untuk hindari keharusan bayar TPP massal, fokus pada jumlah kecil yang lebih feasible. Sekiranya jika INSEDA Dokter Spesialis bisa dipisahkan dari TPP maka pembayaran INSEDA Dokter Spesialis bisa lancar karena hanya untuk membayar Dokter Spesialis yg berjumlah 5-10 Dokter Spesialis, beban Pemda akan lebih ringan karena hanya mengeluarkan dana INSEDA untuk 5-10 dokter Spesialis saja dan tidak harus dibarengi dengan pengeluaran dana TPP untuk ribuan PNS yang nominalnya jauh lebih besar. Menurut pasal 144 PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diperkuat pasal 47 UU no.1 tahun 2022 Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, bahwa tunggakan INSEDA Dokter Spesialis yang sudah menjadi hak Dokter Spesialis adalah utang Daerah yang wajib dibayar oleh PEMDA bahkan ketika Dokter Spesialis resign pensiun atau mutasi.</p> <p>Tunggakan INSEDA Dokter Spesialis tidak bisa hangus meskipun sudah lewat Tahun Anggaran. Dokter punya HAK MENAGIH tunggakan INSEDA</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>Dokter Spesialis sebagai kreditur pribadi, meskipun sudah resign/pensiun/mutasi sekalipun.</p> <p>Berikut Langkah strategis yang bisa digunakan untuk segera melunasi tunggakan INSEDA dokter Spesialis :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pisahkan INSEDA Dokter Spesialis dari TPP untuk meringankan beban PEMDA sehingga tidak harus membayar sekaligus TPP ribuan PNS yang tertunggak, hanya membayar tunggakan INSEDA Dokter Spesialis (misal 5 dokter spesialis x Rp.25 juta x 24 bulan = Rp.3 Miliar ini jauh lebih kecil dibanding harus bayar TPP 1000 PNS dengan TPP rata-rata Rp.5 juta/bulan tunggakan 24 bulan = Rp.120 Miliar).2. Manfaatkan program WKDS dari Kemenkes dengan insentif 20-50juta/bulan (permenkes No.69/2016), Kemenkes bisa perhatikan masalah tunggakan ini dengan menyertakan program WKDS via RSUD, RSUD bisa menunjukkan jumlah tunggakannya sebagai alasan butuh dana pusat, minta dana WKDS dialihkan untuk tutup tunggakan INSEDA Dokter Spesialis karena Kemenkes juga harus ambil alih tanggung jawab dengan koordinasi dengan PEMDA. Jika PEMDA tak mampu, Kemenkes punya anggaran 10 persen APBN (pasal 413 UU Kesehatan). Tunggakan INSEDA Dokter Spesialis bisa jadi tanggung jawab pusat kalau dikaitkan dengan	
--	--	--	--	---	--

					<p>pemerataan dokter Spesialis. Tunggakan Inbeda bisa ancam pelayanan RSUD jika tidak segera di bailout oleh pusat untuk menutup tunggakan 2021-2025. 3. QS. Al-Baqarah: 282 Demikian Laporan kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan segera ditindaklanjuti Terimakasih Salam Sehat Pemerhati Kebijakan Kesehatan Nasional</p>		
272	28 April 2025	Nuqsabandi Mabruri	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Wajibkah mengikut pemda mengituh permendagri ?	<p>Wajibkah pemda mengikuti kebijakan baru seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, karena sampai saat ini belum dikeluarkan pergub terbaru atas tindaklanjut keluarnya aturan ini, terimakasih</p>	Selesai	<p>Terima kasih atas saudara Nuqsabandi Mabruri telah menyampaikan permohonan informasi terkait Wajibkah pemda mengikuti kebijakan baru seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri 10 Tahun 2024 yang berbunyi 'ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah waji memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Menteri ini'. Sehingga dari Pasal 2 ayat (1) Permendagri 10/2024 diatas dapat disimpulkan bahwa aturan terkait pakaian dinas dan atribut pada permendagri 10 tahun 2024 berlaku bagi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</p>
273	28 April 2025	Jakfar Sodik	Permintaan Informasi	Perbub TPP Bojonegoro No. 7 Tahun 2025 tidak sesuai dengan Permendagri No. 15 Tahun 2024	<p>Dengan ini menyampaikan pengaduan terkait Ketidaksesuaian Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro</p>	Selesai	<p>Yth. Bapak/IbuKementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi/pengaduan yang disampaikan.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan sebagai berikut:Pada prinsipnya kementerian dalam negeri telah mengingatkan Pemerintah daerah bahwa dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada</p>

				<p>dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025.</p> <p>Uraian Pengaduan: * Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. * Bahwa setelah dilakukan penelaahan, terdapat beberapa ketentuan dalam Perbup tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Pasal 10 ayat 10a disebutkan Pembayaran TPP pegawai ASN bagi PPPK tenaga teknis dibayarkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya dan sesuai dengan masa kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, padahal di dalam permendagri nomer 15 tahun 2024 dihalaman 69 pada Poin F terkait Kriteria penetapan besaran TPP ASN TA 2025 pada nomer 8 (delapan) menjelaskan bahwa Besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK. 	<p>pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.Prinsip Pemberian TPP:1) Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi,dan transformatif.2) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.3) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.5) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.6) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.7) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.9) Transformatif yang memacu kinerja ASN DaerahDemikian kami sampaikan, terima kasih.Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran DaerahDitjen Bina Keuangan</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>2. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakadilan, keresahan dan penurunan motivasi kerja di kalangan PPPK.</p> <p>3. Berikut ini kami lampirkan komparasi Perbandingan Perbub TPP Bojonegoro No. 7 Tahun 2025 dengan Permendagri No.15 Tahun 2024</p> <p>Harapan: Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Kemendagri untuk memberikan atensi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pemeriksaan dan peninjauan terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.2. Memberikan rekomendasi atau tindakan perbaikan yang diperlukan agar Perbup tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.3. Perlunya penambahan penggunaan Frasa "Besaran pembayaran TPP PPPK Wajib sama dengan Besaran TPP PNS sesuai dengan kelas jabatan, untuk mengantisipasi aturan sisipan tambahan dari daerah yang bisa mengurangi kesamaan Hak besaran TPP PPPK yang diterima4. Karena ketidakadilan dalam hal	<p>DaerahKementerian Dalam NegeriTelepon: 0213501161</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>kesamaan TPP PPPK dengan PNS terjadi di banyak daerah, mohon kiranya dari kemendagri untuk melakukan review terhadap seluruh peraturan tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara yang telah diterbitkan di sejumlah daerah</p> <p>Demikian laporan pengaduan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Hormat kami</p>		
274	26 April 2025	Kapal Perang	Permintaan Informasi	Tpp belum cair	<p>Tpp kabupaten musi banyuasin belum cair pak, gimana mau makan, ekonomi seret, tolong sah kan la perda tpp kabupaten musi banyuasin ini, kasian rakyat nya, pnsnya menderita, pelayanan tidak maksimal, rakyat menderita</p>	Selesai	<p>Yth. Bapak/IbuKementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi/pengaduan yang disampaikan.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan berdasarkan data yang terdapat di kami bahwa persetujuan TPP untuk Kabupaten Musi Banyuasin telah ditanda tangan dan disetujui pada tanggal 14 Mei 2025.Demikian kami sampaikan, terima kasih.Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran DaerahDitjen Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam NegeriTelepon: 0213501161</p>
275	26 April 2025	Jakfar Sodik	Permintaan Informasi	Perbub TPP Bojonegoro No. 7 Tahun 2025 tidak sesuai dengan Permendagri No. 15 Tahun 2024	<p>Dengan ini menyampaikan pengaduan terkait Ketidaksesuaian Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang</p>	Selesai	<p>Yth. Bapak/IbuKementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi/pengaduan yang disampaikan.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan sebagai berikut:Pada prinsipnya kementerian dalam negeri telah mengingatkan Pemerintah daerah bahwa dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian</p>

				<p>Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025.</p> <p>Uraian Pengaduan: * Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. * Bahwa setelah dilakukan penelaahan, terdapat beberapa ketentuan dalam Perbup tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Pasal 10 ayat 10a disebutkan Pembayaran TPP pegawai ASN bagi PPPK tenaga teknis dibayarkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya dan sesuai dengan masa kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, padahal di dalam permendagri nomer 15 tahun 2024 dihalaman 69 pada Poin F terkait Kriteria penetapan besaran TPP ASN TA 2025 pada nomer 8 (delapan) menjelaskan bahwa Besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK. 2. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakadilan, 	<p>reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.Prinsip Pemberian TPP:1) Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi,dan transformatif.2) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.3) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.5) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.6) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.7) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.9) Transformatif yang memacu kinerja ASN DaerahDemikian kami sampaikan, terima kasih.Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran DaerahDitjen Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam NegeriTelepon: 0213501161</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>keresahan dan penurunan motivasi kerja di kalangan PPPK.</p> <p>3. Berikut ini kami lampirkan komparasi Perbandingan Perbub TPP Bojonegoro No. 7 Tahun 2025 dengan Permendagri No.15 Tahun 2024</p> <p>Harapan: Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Kemendagri untuk memberikan atensi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pemeriksaan dan peninjauan terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.2. Memberikan rekomendasi atau tindakan perbaikan yang diperlukan agar Perbup tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.3. Perlunya penambahan penggunaan Frasa "Besaran pembayaran TPP PPPK Wajib sama dengan Besaran TPP PNS sesuai dengan kelas jabatan, untuk mengantisipasi aturan sisipan tambahan dari daerah yang bisa mengurangi kesamaan Hak besaran TPP PPPK yang diterima4. Karena ketidakadilan dalam hal kesamaan TPP PPPK dengan PNS terjadi di banyak daerah, mohon	
--	--	--	--	--	--

					<p>kiranya dari kemendagri untuk melakukan review terhadap seluruh peraturan tambahan penghasilan bagi aparat sipil negara yang telah diterbitkan di sejumlah daerah</p> <p>Demikian laporan pengaduan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Hormat kami</p>		
276	16 April 2025	Herr Ddiman	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Wahana Bermain Anak-Anak di alun Alun Kota Barru Sudah Rusak dan Sangat Berbahaya bagi anak -anak	Wahana-wahana bermain di Alun-alun kota barru kondisinya sudah sangat rusak (Corrosi, Patah, Bungkuk dan Kusam), Sangat berbahaya karena bisa menyebabkan Accident bagi anak-anak yang menggunakan fasilitas tersebut, Mohon Kiranya Fasilitas tersebut di Remajakan dan Materialnya di ganti dengan material yang non Corrosi, jika Pengerjaanya membutuhkan waktu, wahana yang ada sekarang perlu untuk di barricade/di tutup agar tidak di gunakan, agar mencegah terjadinya accident pada anak-anak kita yang bermain di sana.	Selesai	Terimakasih untuk laporan yang telah disampaikan kepada kami untuk segera kami tindaklanjutiTerimakash.
277	13 April 2025	Aisya Rosya03	Aspirasi	Kemiskinan Dinilai Penyebab Ujaran Kebencian dan Polarisasi Tinggi di Aceh	<p>Beranda</p> <p>Main navigation</p> <p>PROFIL</p> <p>PROGRAM</p> <p>DATA</p> <p>INFORMASI</p> <p>AJI KOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>PELAPORAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan Dinilai Penyebab Ujaran 	Selesai	Yth. Aisya Rosya03, Mohon maaf atas keterlambatan proses menjawabnyaDan Terimakasih atas informasinya

					<p>Kebencian dan Polarisasi Tinggi di Aceh - 20 December 2024</p> <p>Masalah kemiskinan dinilai menjadi salah satu faktor penyebab ujaran kebencian dan polarisasi tinggi di Aceh. Hal ini mengemuka dalam diskusi bertema "Ujaran Kebencian dan Polarisasi di Balik Pilkada Aceh 2024" yang digelar di Sirnagalih Coffee Shop, depan Sekretariat AJI Banda Aceh, Kamis (19/12/2024).</p> <p>Diskusi yang diinisiasi Koalisi Kawai Haba Demokrasi Aceh ini menghadirkan sejumlah pembicara, yaitu Teungku Faisal Ali (Ketua PWNU Aceh), Ahmad Mirza Safwandy (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh), serta Ika Idris (Co-Director Monash Data & Democracy Research Hub Monash University Indonesia). Diskusi dipandu Zuhri Noviandi, Sekretaris AJI Banda Aceh.</p> <p>Teungku Faisal Ali menilai ada korelasi antara tingkat kemiskinan dengan meningkatnya ujaran kebencian di Aceh. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang sulit mendorong tindakan-tindakan negatif, termasuk penyebaran fitnah dan hoaks.</p> <p>"Masyarakat kita bukan tidak paham masalah agama, tentang regulasi yang melarang ujaran kebencian, tapi karena tuntutan kemiskinan yang membuat mereka melakukan</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>tindakan-tindakan yang tidak lagi memikirkan bahwa itu fitnah, itu gibah, dan sebagainya," ujar Teungku Faisal.</p> <p>"Makanya sangat punya korelasi antara kemiskinan dan meningkatnya ujaran kebencian di Aceh," lanjutnya.</p> <p>Ia menawarkan solusi bahwa menghilangkan ujaran kebencian, kemiskinan harus diberantas. Selain itu, terkait isu agama yang dipakai dalam ujaran kebencian dan polarisasi, Teungku Faisal Ali menyebut keawaman dan keterbatasan literasi masyarakat termasuk di antara penyebabnya.</p> <p>"Isu agama ini sesuatu yang setiap saat terus berkembang, disebarkan, karena salah satu yang membuat itukan karena keawaman dan keterbatasan literasi masyarakat kita untuk melihat sesuatu yang diciptakan oleh orang ahli, sehingga mereka tidak mampu membedakan bahwa ini hoaks ataupun tidak," kata Teungku Faisal.</p> <p>Sementara itu, Ika Idris memaparkan hasil penelitian Monash University dan AJI yang menunjukkan bahwa Aceh merupakan provinsi dengan tingkat polarisasi tertinggi dari lima provinsi yang dipantau dalam rentang Agustus-November 2024 atau menjelang Pilkada 2024. Dari 180 ribu percakapan yang dikumpulkan, 63,8 persen di antaranya berasal dari Aceh.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>"Yang paling tinggi memang adalah polarisasi politik, namun juga masih ada isu-isu agama dan perempuan," kata Ika Idris.</p> <p>"Isu agama, secara general, baik antara kandidat muslim dan nonmuslim, tapi memang juga kandidat muslim ini ada narasi berlomba-lomba yang paling saleh. Juga narasi kepada kandidat perempuan dan melawan kotak kosong," lanjutnya.</p> <p>Terkait kemiskinan yang dinilai menjadi salah satu pemantik polarisasi di Aceh, Ika menyebutkan berdasarkan sejumlah hasil riset bahwa yang menjadi salah satu faktor polarisasi adalah gap pendapatan atau income in equality.</p> <p>"Hasil riset beberapa jurnal itu menyebutkan bahwa yang berkorelasi positif terhadap polarisasi itu adalah gap pendapatan atau income in equality. Kalau itu terlalu besar antara si kaya dan si miskin itu akan berkorelasi positif sebenarnya dengan polarisasi," kata Ika.</p> <p>"PR kepala daerah yang akan dilantik ini adalah memperkecil gap pendapatan itu," tegas Ika.</p> <p>Di sisi lain, Ahmad Mirza Safwandy menilai sangat penting untuk merefleksikan kembali dan</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>mengevaluasi sesuatu yang menjadi fenomena sosial pasca-pelaksanaan Pilkada. KIP Aceh mencatat, secara yuridis, fenomena itu terkait dengan sengketa hasil Pilkada. Di sisi lain, secara nonyuridis adalah keterbelahan masyarakat dampak dari ujaran kebencian.</p> <p>“Yang bersifat nonyuridis terkait dengan fenomena sosial polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat, keterbelahan, faktor-faktor yang merupakan efek daripada ujaran kebencian,” kata Ahmad Mirza Safwandy.</p> <p>Menurutnya, hal tersebut menjadi refleksi dan evaluasi penting untuk meningkatkan pendidikan politik. "Ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, KIP, tapi tanggung jawab kita semua, pasangan calon, partai politik, pers, dan kita semuanya," katanya.</p> <p>Diskusi ini kegiatan lanjutan dari Koalisi Kawai Haba Demokrasi Aceh yang dibentuk pada 3 Agustus 2024. Koalisi melibatkan penyelenggara Pilkada, organisasi masyarakat sipil, pekerja dan pemilik media, organisasi keagamaan hingga pemuda untuk melawan gangguan informasi Pilkada di Aceh.</p>		
278	29 April 2025	Rudy Hartono	Permintaan Informasi	INSEDA DOKTER SPESIALIS TIDAK	Yth, Bapak Menteri Dalam Negeri Menteri Kesehatan	Selesai	Yth. Bapak/Ibu Terkait hal tersebut, dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang menangani hal tersebut seperti Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektorat Daerah

				<p>DIBAYARKAN 24 BULAN</p> <p>Gubernur Bengkulu Bupati Kepahiang</p> <p>PENTING</p> <p>Kami sampaikan Laporan Pengaduan bahwa INSEDA Dokter Spesialis di Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum dibayarkan 24 bulan sejak 2021 sampai dengan sekarang. Dikarenakan sistem pembayarannya INSEDA dibarengkan dengan TPP PNS, jika TPP macet maka otomatis INSEDA Dokter Spesialis juga macet. Kenapa Insesta Dokter Spesialis dan TPP harus dipisah karena INSEDA Dokter Spesialis punya urgensi khusus yaitu Insentif Pelayanan Kesehatan, bukan TPP biasa, karena terkait nyawa pasien. Insesta Dokter Spesialis harus dipisah dari TPP dalam POS Anggaran (misal via DAK Non-Fisik Kesehatan). Tujuannya untuk hindari keharusan bayar TPP massal, fokus pada jumlah kecil yang lebih feasible. Sekiranya jika INSEDA Dokter Spesialis bisa dipisahkan dari TPP maka pembayaran INSEDA Dokter Spesialis bisa lancar karena hanya untuk membayar Dokter Spesialis yg berjumlah 5-10 Dokter Spesialis, beban Pemda akan lebih ringan karena hanya keluaran dana INSEDA untuk 5-10 dokter Spesialis saja dan tidak harus dibarengi dengan pengeluaran dana TPP untuk ribuan PNS yang nominalnya jauh lebih besar. Menurut pasal 144 PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan</p>		<p>Provinsi atau Inspektorat Jenderal Kemendagri disertai dengan bukti-bukti yang mencukupi, mengingat hal tersebut adalah bukan menjadi kewenangan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Namun dapat kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang berproses untuk mengundang rancangan Perpres tentang tunjangan dokter spesialis. Terima kasih</p>
--	--	--	--	---	--	---

				<p>Keuangan Daerah dan diperkuat pasal 47 UU no.1 tahun 2022 Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, bahwa tunggakan INSEDA Dokter Spesialis yang sudah menjadi hak Dokter Spesialis adalah utang Daerah yang wajib dibayar oleh PEMDA bahkan ketika Dokter Spesialis resign pensiun atau mutasi.</p> <p>Tunggakan INSEDA Dokter Spesialis tidak bisa hangus meskipun sudah lewat Tahun Anggaran. Dokter punya HAK MENAGIH tunggakan INSEDA Dokter Spesialis sebagai kreditur pribadi, meskipun sudah resign/pensiun/mutasi sekalipun.</p> <p>Berikut Langkah strategis yang bisa digunakan untuk segera melunasi tunggakan INSEDA dokter Spesialis :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pisahkan INSEDA Dokter Spesialis dari TPP untuk meringankan beban PEMDA sehingga tidak harus membayar sekaligus TPP ribuan PNS yang tertunggak, hanya membayar tunggakan INSEDA Dokter Spesialis (misal 5 dokter spesialis x Rp.25 juta x 24 bulan = Rp.3 Miliar ini jauh lebih kecil dibanding harus bayar TPP 1000 PNS dengan TPP rata-rata Rp.5 juta/bulan tunggakan 24 bulan = Rp.120 Miliar).2. Manfaatkan program WKDS dari Kemenkes dengan insentif 20-50juta/bulan (permenkes No.69/2016), Kemenkes bisa perhatikan masalah tunggakan ini dengan menyertakan program WKDS via RSUD, RSUD	
--	--	--	--	--	--

					<p>bisa menunjukkan jumlah tunggakannya sebagai alasan butuh dana pusat, minta dana WKDS dialihkan untuk tutup tunggakan INSEDA Dokter Spesialis karena Kemenkes juga harus ambil alih tanggung jawab dengan koordinasi dengan PEMDA. Jika PEMDA tak mampu, Kemenkes punya anggaran 10 persen APBN (pasal 413 UU Kesehatan). Tunggakan INSEDA Dokter Spesialis bisa jadi tanggung jawab pusat kalau dikaitkan dengan pemerataan dokter Spesialis. Tunggakan Insesta bisaancam pelayanan RSUD jika tidak segera di bailout oleh pusat untuk menutup tunggakan 2021-2025.</p> <p>3. QS. Al-Baqarah: 282</p> <p>Demikian Laporan kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan segera ditindaklanjuti Terimakasih Salam Sehat Pemerhati Kebijakan Kesehatan Nasional</p>		
279	28 April 2025	Nuqsabandi Mabruri	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Wajibkah mengikut pemda mengituh permendagri ?	<p>Wajibkah pemda mengikuti kebijakan baru seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, karena sampai saat ini belum dikeluarkan pergub terbaru atas tindaklanjut keluarnya aturan ini, terimakasih</p>	Selesai	<p>Terima kasih atas saudara Nuqsabandi Mabruri telah menyampaikan permohonan informasi terkait Wajibkah pemda mengikuti kebijakan baru seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri 10 Tahun 2024 yang berbunyi 'ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah waji memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Menteri ini'. Sehingga dari Pasal 2 ayat (1) Permendagri 10/2024 diatas dapat disimpulkan bahwa</p>

							aturan terkait pakaian dinas dan atribut pada permendagri 10 tahun 2024 berlaku bagi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
280	17 Mei 2025	Mufi Aziis	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Keaslian KTP	Mohon cek keaslian KTP yang saya lampirkan	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kami tunggu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Jangan lupa bintangnya
281	16 Mei 2025	Henri Muqorobi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Tertipu 90 jt, update IKD	Penipuan dg modus update Identitas Kependudukan Digital menimpa istri saya dg hilang dana 90 jt	Selesai	Halo..! Salam Dukcapil PRIMATERIMA KASIH sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan pengaduan Saudara, silahkan melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian terdekat supaya bisa segera ditindaklanjuti. Terima Kasih, salam sehat dan bahagia. Jangan Lupa Bintangnya..
282	16 Mei 2025	Febtri Lala	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	kk	kira ² untuk perpindahan kk berapa lama. dan 1 satu bulan saya mengajukan perpindahan kk sampai sekarang belum selesai juga	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, saudara dapat menghubungi dukcapil setempat sesuai domisili saudara untuk meminta bantuan petugas dukcapil untuk mempercepat penyelesaian berkas. Terima Kasih
283	14 Mei 2025	inar cintai	Permintaan Informasi	Dugaan Rangkap Jabatan Anggota BPD menjadi Kepala Unit BUMDES	Ditemukan Temuan Dugaan Rangkap Jabatan Anggota BPD menjadi Kepala Unit Bumdes Hendrosari, Saat ditanya SK mereka semua Kabur dan tak memberikan Jawaban, terindikasi Semuanya terstruktur dari Pemerintahan Desa Hendrosari, Ada Dugaan Kuat terjadinya	Selesai	Bagaimana kelanjutannya pak/Bu

					penyalahgunaan keuangan bumdes untuk kepentingan pribadi para pejabat pejabat desa, mohon segera ditelisik		
284	14 Mei 2025	Aditya Budi Raharjo	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cetak KTP-el baru(pindah domisili) susah	<p>Ganti KTP/KK karena pindah domisili bertele-tele dan panjang seperti pembuatan KTP/KK baru. Jadi pada pertengahan Januari 25 saya pindah domisili dr DKI Jakarta ke kab Tegal, untuk menempati rumah sendiri. Dari kelurahan Cakung saya sdh mendaftarkan & mendapatkan surat keterangan pindah untuk 1 KK. Dan sudah pula dicetak di kelurahan. Saya mendapat informasi, tinggal menuju ke kelurahan tujuan untuk mendapatkan KTP/KK baru. Karena kesibukan saya di kampung, saya baru bisa meneruskan kegiatan administratif pada sekitar awal Maret 25. Dan...karena saya tidak tahu bahwa di kampung Balai Desa adalah Kantor Kades, saya memutuskan ke kantor Kecamatan Pangkah. Pihak kecamatan menyarankan saya untuk ke Kelurahan atau ke Dukcapil. Dan sekali lagi karena ketidaktahuan saya bahwa balai desa adalah kantor desa, saya langsung ke dukcapil kab Tegal, tepatnya di Slawi. Pada tanggal 14 Mei 25 baru saya bisa ke Dukcapil Kab. Tegal. Oleh bagian konsultasi, disampaikan bahwa untuk mencetak KTP/KK baru musti ke kecamatan, menurut pihak tersebut peraturan baru per 2 Mei 25, dengan saya disodorkan form pernyataan menggunakan alamat rumah milik sendiri/form pernyataan perubahan</p>	Selesai	<p>Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR! Berkaitan dengan keluhan saudara akan kami lakukan tindak lanjut dan pembinaan kepada Dinas Dukcapil Tegal untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan layanan. Perlu kami informasikan bahwa setelah Saudara memperoleh Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asal, langkah selanjutnya adalah menyerahkan SKP tersebut kepada Disdukcapil di daerah tujuan untuk proses penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang baru, serta menyerahkan KTP-el lama untuk dicetak ulang sesuai alamat yang baru. Apabila tidak terdapat perubahan pada elemen data lainnya dalam KK atau KTP-el, maka tidak diperlukan dokumen pendukung tambahan. Atas ketidaknyamanannya kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terimakasih</p>

					<p>elemen Kependudukan/form pendaftaran peristiwa Kependudukan. Itu juga masih disertai buku nikah/akta lahir/ijazah terakhir. Dan yang paling menyebalkan ada materai 10rb 2 lembar,, dan ke RT/RW lagi untuk minta stamp & tanda tangan. Materai 2 lembar 24rb,belum kasi kas RT/RW 50rbx2. 150rb hanya utk ganti KTP/KK!! Belum termasuk bensin dan waktu yang dikeluarkan. Tolonglah untuk pemerintah setempat, Inovatif&kreatif dalam hal pelayanan publik, sah sah saja. Tapi jangan bersifat memberatkan. Tidak semua warga kab Tegal punya domisili tetap. Bagaimana dengan pengemis/gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal. Bagaimana mereka dipelihara negara, jika pembuatan/revisi data saja susah. Untuk pihak terkait, itu yg saya maksud dengan bertele tele. Data saya tidak ada perubahan, hanya alamat saja yang berubah, dan pasti data saya sdh ada dibase data Kependudukan secara nasional? Kenapa persyaratan cetak ktp/kk saja seperti pembuatan baru? Mohon tanggapan dan kerjasama dari pihak pihak terkait. Terima kasih</p>		
285	14 Mei 2025	Salfatore Agassy	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pelantikan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba	<p>Selamat Pagi. Saya salah seorang ASN di Pemerintah Kabupaten Toba ingin melaporkan terkait pelantikan Jabatan Fungsional. SK jabatan Fungsional sudah diterbitkan sejak September 2024, namun sampai Bulan Mei 2025 tidak ada juga kelanjutan dari</p>	Selesai	Yth. Pelapor.Terkait hal ini agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba dan Gubernur Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah pusat. dikarenakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian/ Kepala Daerah.Terimakasih,Ditjen Otonomi Daerah

					<p>pelantikan Jabatan Fungsional. Pada saat ditanya kepada Pihak BKPSDM Kab.Toba , kami tidak dapat jawaban yang benar karena mereka mengatakan bahwasanya harus ada persetujuan dari Kemendagri . Namun sesuai surat dari BKPSDM Provinsi Sumatera Utara, tidak perlu persetujuan dari Kemendagri. Dimohon kepada Bapak/Ibu , mohon bantuannya untuk menelusuri lebih lanjut terkait proses ini.</p>		
286	11 Mei 2025	Rumin	Permintaan Informasi	<p>Seragam Perangkat Desa tidak sesuai</p>	<p>Kepada Yth, Direktur Jenderal Bina Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</p> <p>Saya dengan hormat melalui kanal Laporan ini hendak menanyakan secara teknis, mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengapa seragam Aparatur Desa (Sekretaris, Kaur, Kasi dan Kadus), menyerupai ASN Pemerintah Daerah..?? yakni menggunakan warna (Khaki, Name Tag, Bet Daerah, Bet Kemendagri dan Pin KORPRI) - Berdasarkan UU ASN Tahun 2023, ASN hanya ada dua yakni PNS dan PPPK, bukan termasuk Perangkat Desa lalu apa dasar Ditjen Bina Pemerintahan Desa menyerupakan seragam dengan ASN..?? - Apakah aparatur Desa anggota KORPRI, sehingga menggunakan Pin KORPRI..?? - Aparatur Desa tidak dibawah naungan manajemen Kepegawaian 	Selesai	<p>Yth. Pelapor Terima kasih atas saran dan masukannya akan kami pertimbangkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait seragam bagi pemerintah Desa. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.</p>

					<p>yang diatur oleh Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara, otomatis bukan ASN dan tidak memiliki NIP.</p> <p>Mohon apa yang sampaikan diatas menjadi pertimbangan, untuk membedakan seragam Aparatur Desa dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah, karena bukan ASN.</p> <p>Terimakasih.</p>		
287	17 Mei 2025	Mufi Aziis	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek Keaslian KTP	Mohon cek keaslian KTP yang saya lampirkan	Selesai	Terima kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam NegeriTerkait dengan pengaduan Saudara/i, dimohon untuk melampirkan dokumen pendukung (foto KK dan foto KTP EI) untuk memudahkan kami dalam pengecekan pada aplikasi data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.kami tunggu.Terima kasih, salam sehat dan bahagiajangan lupa bintangnya
288	28 Mei 2025	Hespi, S.Sos	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Cek NIK KTP	Cek NIK KTP apakah sudah online atau belum	Selesai	"Halo..! Salam Dukcapil PRIMATERIMA kasih sudah menghubungi portal pengaduan Kementerian Dalam NegeriTerkait dengan pengaduan Saudara/i.nik dalam ktp tersebut seharusnya tidak ada masalah dengan layanan online di lembaga pengguna.Terima Kasih, salam sehat dan bahagiaJangan Lupa Bintangnya..."
289	27 Mei 2025	Niko Rahmat putra	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Dokumen pengurusan surat pindah domisili	Tanggal 14/05/2024 saya mengurus surat pindah domisili. Setelah antri dari jam 9 pagi dan nomor antrian saya dipanggil jam 2 siang.setelah memberikan berkas2 yang diminta serta fotocopy 2 rangkap.petugas mengatakan kalau nanti dokumen PDF bakalan dikirim lewat WA 1-3 bulan. Dan petugas	Selesai	Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terima kasih atas pengaduan/laporan/saran yang telah Saudara sampaikan melalui media LAPOR!Berkaitan dengan pertanyaan saudara, mohon dapat diinfokan KTP-el dan KK untuk dapat kami lakukan pengecekan kepada Dinas Dukcapil Tangerang.Terimakasih

					<p>meminta nomor WA saya dan ditulis diberkas yang saya kasih.</p> <p>Setelah menunggu 3 bulan,dokumen belum dikirim juga ke WA saya ,saya kembali ke disdukcapil yang berada di puspem Tigaraksa tangerang. Setelah mengantri berjam2 ,dan menyampaikan keluhan,petugas disana bilang kalau nanti dikirim lewat wa.</p> <p>Tolong dibantu karena ini sudah setahun dokumen belum juga jadi.</p> <p>Bukti yang saya kirim copyan dan masih ada tulisan petugas diloket 2.</p>		
300	17 Juli 2025	Tsaqila Nashifa Utami	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Informasi Penelitian	<p>Dengan hormat, saya bermaksud untuk mengajukan permohonan izin pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PPSDM Regional Bukittinggi, dengan harapan dapat memperoleh akses, dukungan, serta kemudahan dalam pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di institusi PPSDM Regional Bukittinggi, demi kelancaran dan keberhasilan penelitian yang akan saya laksanakan.</p>	Selesai	<p>Terima kasih telah menyampaikan permohonan melalui aplikasi SPAN Lapor. PPSDM Regional Bukittinggi pada prinsipnya mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pelaksanaan penelitian, pemohon dapat menyampaikan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, disertai dengan proposal penelitian dan dokumen pendukung lainnya. Setelah itu, pemohon dapat langsung datang ke kantor untuk proses lebih lanjut. Untuk informasi dan koordinasi, silakan menghubungi Bapak Anggy Reonal selaku Ketua Tim Pelayanan Publik 0853-7476-0654.</p>
301	17 Juli 2025	Shabilla Yovanda Lukman	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Tidak adanya tisu toilet	<p>Saya ingin menyampaikan keluhan bahwa di toilet tidak tersedia tisu toilet di PPSDM Regional Bukittinggi. Hal ini cukup menyulitkan pengguna toilet, terutama bagi perempuan.</p>	Selesai	<p>Terima kasih telah menyampaikan keluhan melalui aplikasi SP4N Lapor. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami akibat ketidaksiediaan tisu toilet di fasilitas PPSDM Regional Bukittinggi</p>

					Mohon agar tisu toilet dapat segera disediakan kembali demi kenyamanan dan kebersihan pengguna. Terima kasih atas perhatiannya.		beberapa waktu lalu. Keluhan Anda sangat kami apresiasi sebagai bentuk perhatian terhadap pelayanan kami. Saat ini, tisu toilet telah ditambahkan kembali dan kami akan terus berupaya menjaga ketersediaannya secara rutin demi kenyamanan, kebersihan, dan kepuasan seluruh pengguna fasilitas, terutama bagi pengguna perempuan. Kami juga akan meningkatkan pengawasan terhadap pemeliharaan fasilitas umum agar kejadian serupa tidak terulang. Terima kasih atas perhatian dan masukan yang Anda berikan.
302	12 Juli 2025	SUMARNO	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	TANAH PERUMAHAN TERBELAH BATAS DAERAH KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU	Melalui surat ini saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan status tanah saya akibat Batas Wilayah Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar: 1. Pada tanggal 10 Januari 2025 saya mengajukan Perubahan Hak atas Tanah rumah saya, dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi/ke Hak Milik (HM) atas tanah yang terletak di Perumahan Taman Arengka Indah Blok I No.5, Sidomulyo Barat, Tampan/Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau. 2. Hasil Pengecekan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, diinformasikan ke saya bahwa Permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena: TANAH TERSEBUT TERBELAH OLEH BATAS DAERAH KOTA PEKANBARU DAN KABUPATEN KAMPAR (Lampiran 3. luas tanah yang terbelah batas) 3. Hasil penelusuran saya melalui online, memang Batas Daerah Kota	Selesai	Yth. Bapak Sumarno Terkait hal yang Bapak sampaikan, dengan hormat disampaikan sebagai berikut: 1. Bahwa batas daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Bahwa batas daerah yang telah ditetapkan dalam Permendagri menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terkait kewilayahan, salah satunya terkait administrasi pertanahan yang merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.2. Mempedomani Pasal 34 huruf b Permenagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, Batas daerah yang telah diatur oleh Mendagri dapat diubah dalam hal adanya kesepakatan antar daerah kabupaten/kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri melalui Gubernur.3. Perlu juga kami sampaikan bahwa Penegasan Batas Daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada

				<p>Pekanbaru dan Kabupaten Kampar melewati/membelah tanah rumah saya. Batas tersebut ternyata tidak berdasarkan jalan atau sungai, tetapi hanya garis lurus yang ditarik dari suatu titik ke titik lainnya sehingga memotong tanah rumah saya. Kalau ditelusuri lebih lanjut, ada banyak perumahan lain yang terdampak sama. (Lampiran 4, 5, 6, 7).</p> <p>4. Saya disuruh pegawai BPN Pekanbaru (secara lisan) supaya mendatangi Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau untuk menanyakan tentang masalah batas tanah tersebut.</p> <p>5. Saya mendatangi Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau menyampaikan masalahnya; hasilnya: tentang batas tanah menjadi Wewenang BPN (disampaikan pegawainya secara lisan).</p> <p>6. Saya kembali ke BPN Pekanbaru menyampaikan informasi dari Biro Tata Pemerintahan Riau, (bahwa tentang batas tanah menjadi wewenang BPN). Pegawai BPN Pekanbaru menjawab: untuk solusinya, Sertifikatnya dipecah, sebagian Kota Pekanbaru dan sebagiannya lagi Kabupaten Kampar. Saya menyampaikan bahwa tanah ini awalnya Kota Pekanbaru bagaimana memecahnya; terlebih lagi yang masuk Kota Pekanbaru sekarang hanya 49 m persegi.</p> <p>7. Setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata solusi dari BPN prosesnya tidak sederhana tetapi cukup rumit dan sangat memberatkan.</p>	<p>masyarakat. Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatian Bapak</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>8. Akhirnya pada tgl 16 Juni 2025 saya mengirim pengaduan ke Kemendagri. Jawaban dari Direktorat Toponimi dan Batas Daerah seperti berikut:</p> <p>Yth. Bapak Sumarno</p> <p>Terkait hal yang Bapak sampaikan, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa batas daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Bahwa batas daerah yang telah ditetapkan dalam Permendagri menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terkait kewilayahan, salah satunya terkait administrasi pertanahan yang merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.2. Mempedomani Pasal 34 huruf b Permenagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, Batas daerah yang telah diatur oleh Mendagri dapat diubah dalam hal adanya kesepakatan antar daerah kabupaten/kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri melalui Gubernur. Melalui Laporan ini, mohon dengan hormat kepada pihak-pihak yang berwenang, khususnya Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Bupati Kampar, dan Bapak Gubernur Riau berkenan untuk memperbaiki Peraturan tentang Batas Daerah	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau (Permendagri No.18 Tahun 2015) agar saya dan warga lainnya tidak dirugikan dengan batas yang membelah tanah rumah kami. Demikian pengaduan saya sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya dihaturkan banyak terimakasih.</p> <p>Salam hormat saya,</p> <p>Sumarno</p>		
303	10 Juli 2025	Muhammad Luthfi	Permintaan Informasi	<p>Permohonan Keringanan Biaya Restribusi di Pusat Pertokoan Pasar Atas</p>	<p>Yth: Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Menindak lanjuti surat peringatan dari pemerintah kota Bukittinggi terhadap pedagang pusat pertokoan pasar atas - kota Bukittinggi - provinsi Sumatera Barat, dimana pemerintah kota Bukittinggi menagihkan biaya restribusi dan denda periode Januari 2024 s.d. Mei 2025 sejumlah Rp. 19.824.600 yang sangat memberatkan bagi pedagang dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2024 - 2025 merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 2. Pedagang sedang berjuang untuk memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi covid 19 3. Daya beli masyarakat yang berbelanja di Pusat pertokoan Pasar Atas masi sangat lemah 4. Kondisi pasar sepi pengunjung 5. Semakin banyaknya toko online. 6. Zonasi toko tidak teratur. <p>Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan saya menyampaikan</p>	Selesai	<p>Yth. Bapak Muhammad Luthfi, Menindaklanjuti surat Bapak mengenai Permohonan Keringanan Biaya Restribusi di Pusat Pertokoan Pasar Atas, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Restribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Restribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Restribusi sesuai dengan amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Wajib Restribusi dapat mengajukan permohonan keringanan atau pengurangan pokok Restribusi dengan cara bersurat kepada Bupati. Isi surat dimaksud harus menjelaskan juga alasan mengapa Wajib Restribusi mengajukan permohonan keringanan atau pengurangan pokok Restribusi untuk pertimbangan Bupati dalam memberikan keputusan keringanan atau</p>

					<p>permohonan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan keringan biaya retribusi di pusat pertokoan pasar atas. 2. Permohonan penilaian biaya retribusi yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi pedagang dengan menimbang daya beli masyarakat dan lokasi toko (strategis/tidak strategis) yang mana hasil penilaian tersebut dapat digunakan oleh pemerintah setempat sebagai patokan nilai maksimal penagihan biaya retribusi di lingkungan pusat pertokoan pasar atas. <p>Demikian saya sampaikan, besar harapan saya permohonan ini dapat ditindak lanjuti lebih lanjut. Atas perhatian dan perkenan Bapak / Ibu saya mengucapkan terima kasih.</p>		<p>pengurangan atas pokok Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.</p>
304	10 Juli 2025	Muhammad Luthfi	Permintaan Informasi	<p>Permohonan Keringanan Biaya Restribusi di Pusat Pertokoan Pasar Atas</p>	<p>Yth: Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Menindak lanjuti surat peringatan dari pemerintah kota Bukittinggi terhadap pedagang pusat pertokoan pasar atas - kota Bukittinggi - provinsi Sumatera Barat, dimana pemerintah kota Bukittinggi menagihkan biaya retribusi dan denda periode Januari 2024 s.d. Mei 2025 sejumlah Rp. 19.824.600 yang sangat memberatkan bagi pedagang dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2024 - 2025 merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 2. Pedagang sedang berjuang untuk memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi covid 19 	Selesai	<p>Yth. Bapak Muhammad Luthfi, Menindaklanjuti surat Bapak mengenai Permohonan Keringanan Biaya Retribusi di Pusat Pertokoan Pasar Atas, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi sesuai dengan amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan atau</p>

					<p>3. Daya beli masyarakat yang berbelanja di Pusat pertokoan Pasar Atas masi sangat lemah</p> <p>4. Kondisi pasar sepi pengunjung</p> <p>5. Semakin banyaknya toko online.</p> <p>6. Zonasi toko tidak teratur.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan saya menyampaikan permohonan berupa:</p> <p>1. Permohonan keringan biaya restribusi di pusat pertokoan pasar atas.</p> <p>2. Permohonan penilaian biaya restribusi yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi pedagang dengan menimbang daya beli masyarakat dan lokasi toko (strategis/tidak strategis) yang mana hasil penilaian tersebut dapat digunakan oleh pemerintah setempat sebagai patokan nilai maksimal penagihan biaya restribusi di lingkungan pusat pertokoan pasar atas.</p> <p>Demikian saya sampaikan, besar harapan saya permohonan ini dapat ditindak lanjuti lebih lanjut. Atas perhatian dan perkenan Bapak / Ibu saya mengucapkan terima kasih.</p>		<p>pengurangan pokok Retribusi dengan cara bersurat kepada Bupati. Isi surat dimaksud harus menjelaskan juga alasan mengapa Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan atau pengurangan pokok Retribusi untuk pertimbangan Bupati dalam memberikan keputusan keringanan atau pengurangan atas pokok Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.Demikian yg dapat kami sampaikan, terimakasih</p>
305	20 Agustus 2025	Arli taufik	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Aspirasi	<p>Kegiatan diklat damkar di bpsdm satpol pp dan damkar kemang luar biasa, alangkah lebih baiknya ada pembangunan tower rapling untuk menunjang kegiatan diklat, supaya tidak ada pergerakan yang lumayan memakan waktu.</p>	Selesai	<p>Terima kasih atas sarannya, untuk saat ini sudah tersedia design untuk pembangunan Tower Rapling dikarenakan sedang terjadi efesiensi anggaran sehingga belum dapat di realisasikan. Terima kasih</p>
306	20 Agustus 2025	Amirudin	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Jadwal diklatsar pol pp	<p>Masukannya buat balai pengembangan dan kompetensi pol pp untuk di perbanyak jadwal diklatnya dan digratiskan biaya nya</p>	Selesai	<p>Terima kasih atas saran dan masukan anda, untuk saat ini diklat yang diadakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Satpol-PP dan Damkar menggunakan mekanisme</p>

					karena masih banyak yang belum diklat dan terkendala biaya		PNBP/kontribusi. Apabila kedepannya terdapat diklat yang diadakan menggunakan mekanisme RM akan kami beritahu melalui sosial media kami. Terima kasih
307	19 Agustus 2025	Anang Kurnianto	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Perbedaan Penamaan Pulau Burung (Provinsi Jambi) pada KepKemendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 dengan Peta lama milik Bakosurtanal dan Informasi dari Dinas Perikanan Tanjab Timur	Mohon izin, saya sebelumnya sedang menginventarisir pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Jambi dengan menggunakan base data KepKemendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022. Kemudian saya bandingkan dengan informasi dari Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur dan Peta Bakosurtanal yang lama dan hasilnya adalah "Pulau Burung" (01°06'32.32" S 104°01'39.67" T) berdasarkan KepKemendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 berbeda dengan informasi dari Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur dan Peta Bakosurtanal baik dari titik koordinat dan letak pulauanya. Mohon dikoreksi kembali apakah ada kekeliruan. Karena bila ditanyakan ke masyarakat Nipah Panjang yang berada di sekitar lokasi, "Pulau Burung" yang letaknya dan koordinatnya sebagaimana dimaksud Kemendagri (dalam KepKemendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022) adalah tidak benar. Terimakasih.	Selesai	Yth. Bapak Anang Kurnianto. Terimakasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada KamiDapat kami sampaikan bahwa KamiDapat kami sampaikan bahwa Kepmendagri 100.1.1-6117 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan yang dalam hal ini telah diubah menjadi Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Untuk Pulau Burung di Kabupateng Tanjung Jabung Timur dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 titik koordinatnya adalah 01.0632.32 S 104.0139.67 T , dan titik koordinat dimaksud merupakan data yang diambil berdasarkan data gazetir tahun 2024
308	22 Juli 2025	bujang sambilan	Permintaan Informasi	Kabupaten Solok tidak membayar tunjangan JF	Apakah keputusan pemerintah daerah tidak membayarkan tunjangan jabatan fungsional penyetaraan hasil penyederhanaan birokrasi dengan alasan efisiensi anggaran dibenarkan? Mohon Kantor Sekretariat Presiden, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman RI membentuk tim untuk mengunjungi	Selesai	Yth. Bapak Eka PutraKementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih atas informasi/pengaduan yang disampaikan.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan sebagai berikut:Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

				<p>daerah kami dan daerah yang tidak membayarkan tunjangan jabatan fungsional penyetaraan karena kalau dibaca peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terjadi maladministrasi. Sedikit bercerita kami dahulu adalah seorang pejabat administrasi eselon IV.a di Kabupaten Solok Sumatera Barat yang dialihkan dan dilantik menjadi pejabat fungsional pada 27 Mei 2022 bersama 257 orang lainnya dan sampai saat ini belum menerima tunjangan jabatan fungsional padahal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2022 tentang penghasilan pejabat administrasi yang berdampak penataan birokrasi berhak menerima tunjangan jabatan fungsionalnya. Disini kami menanyakan apakah setelah seseorang yang telah dilantik dalam suatu jabatan maka tunjangan jabatan boleh tidak dibayarkan? Sewaktu pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional kabupaten kami sempat viral karena tidak melaksanakan pengalihan jabatan dan pelantikan pejabat fungsional sebelum 31 Desember 2021 dan dikunjungi deputi Kemenkopolhukam ketika itu. Sekarang walaupun kami sudah purna tugas tapi masih ada ± 195 orang yang menjalani tugas pokok dan fungsi sebagai fungsional di jabatannya dan belum menerima tunjangan jabatan fungsional. Demikian pengaduan kami. terimakasih</p>	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, tidak disebutkan bahwa belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang masuk ke dalam efisiensi. B. & nbsp; Berkenaan dengan hal tersebut, belanja pegawai yang di dalamnya terdapat tunjangan Jabatan Fungsional tidak menjadi komponen yang masuk ke dalam efisiensi dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 maupun SE Mendagri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025. Berkaitan dengan saudara yang menanyakan terkait tunjangan Jabatan Fungsional hasil penyederhanaan birokrasi yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan alasan adanya efisiensi, maka dalam hal ini kami hanya dapat menjawab sebatas kewenangan kami di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yaitu terkait efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Hormat kami Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri</p>
--	--	--	--	---	--

309	17 Juli 2025	Adila tsurayya	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	info magang	<p>Saya ingin meminta informasi terkait pelaksanaan program magang di PPSDM Regional Bukittinggi. Informasi yang saya butuhkan meliputi ketersediaan program magang, persyaratan bagi mahasiswa, alur pendaftaran, periode pelaksanaan, serta hak dan kewajiban peserta magang. Selain itu, saya juga ingin mengetahui apakah PPSDM Regional Bukittinggi menerima mahasiswa dari semua jurusan dan siapa yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saya tertarik untuk melaksanakan magang di instansi tersebut dan berharap dapat memperoleh penjelasan yang jelas dan terperinci.</p>	Selesai	<p>Terimakasih sudah bertanya melalui Aplikasi SP4N Lapor. PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan program magang di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi. Mahasiswa dari berbagai jurusan dipersilakan untuk mendaftar, selama relevan dengan kegiatan dan kebutuhan unit kerja yang ada. Untuk informasi terkait ketersediaan program magang, persyaratan, alur pendaftaran, periode pelaksanaan, serta hak dan kewajiban peserta magang, calon peserta dapat langsung datang ke kantor PPSDM Regional Bukittinggi atau menghubungi Bapak Anggy Reonal selaku Ketua Tim Pelayanan Publik 0853-7476-0654 guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan memastikan ketersediaan kuota magang.</p>
-----	--------------	----------------	-------------------------------------	-------------	--	---------	--